

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KETAHANAN  
PANGAN DI DESA JANGGALA  
KECAMATAN CIDOLOG KABUPATEN CIAMIS**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh

**Oleh :**

**SYARA AGITA  
NIM. 3506200044**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS GALUH  
2024**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KETAHANAN  
PANGAN DI DESA JANGGALA KECAMATAN CIDOLOG  
KABUPATEN CIAMIS**

**Oleh :**

**SYARA AGITA  
NIM. 3506200044**

**Mensahkan :**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Regi Refian Garis, S.IP.,M.Si.**  
NIDN.0421019101

**Asep Nurdin Rosihan Anwar S.IP., M.Si.**  
NIDN. 0430127902

**Mengetahui,**

**Dekan FISIP Universitas Galuh**

**H. Cecep Cahya Supna, S.H., M.H., M.Si.**  
NIDN. 0424117001

## LEMBAR PERSETUJUAN

Dewan Penguji Ujian Sidang Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

### **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI DESA JANGGALA KECAMATAN CIDOLOG KABUPATEN CIAMIS**

#### **KARYA:**

**SYARA AGITA  
NIM. 3506200044**

Telah diujikan dalam Ujian Sidang Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P) dan telah diperbaiki sebagaimana mestinya. Oleh karena itu kami setuju skripsi ini sebagai hasil karya ilmiah.

Ciamis, 3 Agustus 2024

Dewan Penguji:

1. H. Asep Nurwanda, S.Hi., M.Si. : .....
2. H. Ootong Husni Taufiq, S.IP., M.Si : .....
3. Regi Refian Garis, S.IP., M.Si. : .....

**Mengetahui :  
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan,**

**Dr. Hj. Kiki Endah, S.Sos.,M.Si  
NIDN. 0421017703**

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

### **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI DESA JANGGALA KECAMATAN CIDOLOG KABUPATEN CIAMIS**

Adalah benar-benar karya ilmiah yang saya susun berdasarkan kemampuan yang saya miliki, dan segala isi yang terdapat dalam karya ilmiah ini bukan merupakan hasil penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku.

Dengan demikian saya bersedia menanggung resiko/sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya, jika ternyata dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan seperti dinyatakan diatas.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ciamis, 3 Agustus 2024

Yang menyatakan,

Meterai 10.000

**SYARA AGITA**  
**NIM. 3506200044**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, yang berjudul: **“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ketahanan Pangan di Desa Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis”**.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat banyak pihak yang berperan memberikan bimbingan, arahan, saran dan kritik, serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Regi Refian Garis, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan dengan sabar mengarahkan, membimbing, memberikan waktu, motivasi dan ilmunya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Bapak Asep Nurdin Rosihan Anwar, S.IP., M.Si., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti;
3. Bapak H. Cecep Cahya Supena, S.H. M.H., M.Si., selaku Dekan FISIP Universitas Galuh;
4. Ibu Etih Henriyani, S.IP.,M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh atas segala arahannya.
5. Ibu Dr. Hj. Kiki Endah, S.Sos.,M,Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh atas segala arahannya
6. Segenap Dosen program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta pengalaman kepada penulis baik secara tertulis maupun lisan.

7. Kepala Desa Janggala dan seluruh staf jajaran pemerintah desa janggala kecamatan cidolog
8. Syara Purnamasari S.I.P dan Adinda Ratna Febrianti S.I.P selaku teman, sahabat keluarga yang selalu mendukung mensupport penulis, terimakasih sudah menjadi tempat untuk berkeluh kesah bertukar pikiran dan untuk semua cerita berwarna di masa perkuliahan ini.
9. Keluarga besar kelas ABC Ilmu Pemerintahan 2020, Demisioner Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan (HMPIP) 2021-2022, Demisioner Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM FISIP) 2022-2023, terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan penulis semasa menempuh perkuliahan ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari bentuk penyusunan maupun materinya. Penulis berharap saran dan kritik dari bapak, ibu sekalian. Semoga ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan semoga Allah yang maha pengasih dan maha penyayang selalu memberikan rahmat dan karunia-nya, serta membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Demikian yang dapat penulis sampaikan.

Ciamis, 3 Agustus 2024

Peneliti

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
RINGKASAN .....	vii
BAB I     PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II     TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2. Landasan Teori .....	14
2.2.1 Pemberdayaan .....	14
2.2.2 Pemberdayaan Masyarakat.....	16
2.2.3 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat .....	18
2.2.4 Manfaat Pemberdayaan Masyarakat .....	19
2.2.5 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat .....	21
2.2.6 Pengertian Ketahanan Pangan.....	21
2.2.7 Aspek Ketahanan Pangan.....	23
2.2.8 Indikator Ketahanan Pangan .....	23
2.2.9 Strategi Ketahanan Pangan .....	24
2.3 Kerangka Pemikiran .....	25
2.4 Proposisi .....	28
BAB III    METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Desain Penelitian.....	29
3.2 Oprasionalisasi Konsep.....	31

	3.3 Data dan Sumber Data.....	32
	3.4 Teknik pengumpulan Data.....	34
	3.5 Teknik Pengolahan Data.....	34
	3.6 Jadwal Penelitian.....	35
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
	4.1 Hasil Penelitian .....	36
	4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	36
	4.1.1.1 Sejarah Desa Janggala .....	36
	4.1.1.2 Visi dan Misi Desa Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis .....	37
	4.1.1.3 Struktur Organisasi Kantor Desa Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis .....	38
	4.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa Janggala.	39
	4.1.1.5 Kondisi Geografis Desa Janggala .....	44
	4.1.1.6 Keadaan Penduduk Dea Janggala .....	46
	4.1.2 Sarana dan Prasarana Desa Janggala.....	50
	4.1.3 Karakteristik Informan Penelitian .....	53
	4.1.4 Dasar Hukum.....	56
	4.2 Pembahasan.....	58
	4.2.1 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program ketahanan Pangan di Desa Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis.....	58
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>134</b>
	5.1 Kesimpulan .....	134
	5.2 Saran.....	136
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>139</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah informan.....	33
Tabel 3.2	Jadwal Penelitian.....	35
Tabel 4.1	Penduduk Desa Janggala Berdasarkan Jenis Kelamin .....	46
Tabel 4.2	Data Umur Penduduk Desa Janggala .....	46
Tabel 4.3	Data Pendidikan Penduduk desa Janggala .....	47
Tabel 4.4	Data Pekerjaan Penduduk Desa Janggala.....	48
Tabel 4.5	Sarana Pendidikan Desa Janggala .....	50
Tabel 4.6	Sarana dan Prasarana Olah Raga Desa Janggala.....	52
Tabel 4.7	Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin .....	54
Tabel 4.8	Karakteristik Informan Berdasarkan Umur.....	54
Tabel 4.9	Karakteristik Informan berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Masalah Gizi yang Dialeami Balita Indonesia .....	4
Gambar2.1	Kerangka Pemikiran .....	27
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Janggala Kecamatan Cidolog .....	38
Gambar 4.2	Pembekalan Kepada Kelompok Pengelola Program .....	67
Gambar 4.3	Pemasaran Susu Kambing Etawa .....	93
Gambar 4.4	Sarana dan Prasarana Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ketahanan Pangan.....	98
Gambar 4.5	Upaya pemeliharaan lingkungan Sekitar .....	110

## ABSTRAK

**Syara Agita, NIM. 350620044. 2024. Skripsi ini berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ketahanan Pangan Di Desa Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis”**

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan terdapatnya masyarakat khususnya seorang ibu yang belum sadar akan pentingnya asupan gizi terhadap perkembangan otak dan fisik anak hal ini dilatarbelakangi karena masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat perihal gizi anak sehingga pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini akan menangani permasalahan gizi di Desa Janggala, Belum terpenuhinya fasilitas penunjang pada program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan seperti halnya pendamping kesehatan untuk pengelolaan program, serta Belum adanya strategi dari pemerintah terhadap pemasaran hasil dari program pemberdayaan masyarakat.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan di Desa Janggala Kecamatan Cidolog. Metode penelitian ini kualitatif menggunakan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan wawancara dengan langkah analisa yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan belum optimal. Dalam aspek bina manusia, pengembangan kapasitas individu melalui pelatihan jangka panjang, pendek, dan menengah belum dilakukan secara rutin. Sementara itu, pengembangan kapasitas entitas kelembagaan dan sistem telah optimal. Pada aspek bina usaha, program telah mencapai hasil optimal dengan terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pemasaran produk secara langsung maupun daring. Untuk aspek bina lingkungan, komitmen pemerintah, kelompok pengelola, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan telah optimal. Namun, bina kelembagaan belum optimal karena belum adanya peraturan desa yang spesifik dan adanya permasalahan dalam struktur organisasi kelompok pengelola, khususnya pengelolaan peternakan kambing etawa. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelatihan rutin untuk pengembangan kapasitas individu, penyusunan peraturan desa yang spesifik, dan perbaikan struktur organisasi kelompok pengelola untuk meningkatkan efektivitas program.

**Kata Kunci:** *Pemberdayaan, Masyarakat, Ketahanan Pangan*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan nasional adalah pembangunan di Indonesia dan pembangunan untuk seluruh masyarakat. Tujuan-tujuan pembangunan nasional ini dapat dicapai dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masyarakat, khususnya potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam, adanya program-program yang bertujuan untuk meningkatkan potensi sumber daya tersebut, sehingga tercapainya tujuan dari pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan di masyarakat.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam kesatuan sistem pengelolaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa mengimplementasikan program pembangunan yang merupakan program desa dilaksanakan oleh aparat pemerintah desa, yang dilaksanakan bersama-sama dengan lembaga desa yang ada dan mampu menggerakkan dan masyarakat untuk melakukan kegiatan Pembangunan.

Setelah masa desentralisasi, desa dan desa adat telah mendapat peraturan yang komprehensif. dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwasanya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Desa mempunyai potensi strategis karena kaya akan sumber daya alam dan budaya. Desa juga mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di wilayahnya. Saat ini tujuan pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan ke dalam agenda pembangunan nasional daerah, khususnya di tingkat provinsi dan beberapa kabupaten/kota. Pemerintah kemudian melakukan beberapa langkah selanjutnya dalam mengintegrasikan *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke dalam pembangunan daerah.

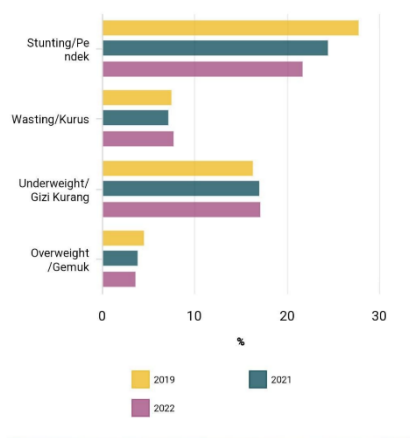
Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi (Kemendes PDTT) yang menerbitkan Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 dilatarbelakangi oleh refleksi terkait model pembangunan nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang terhadap terlaksananya tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. fokus pada SDGs desa. Dalam Peraturan Menteri PDTT Nomor 13 Tahun 2020, aturan tersebut berprioritas pada penggunaan dana desa pada tahun 2021 yang juga fokus pada upaya pencapaian SDGs Desa.

Negara Indonesia merupakan negara berkembang, di negara berkembang permasalahan gizi terus muncul dan menjadi persoalan bagi

negara. Permasalahan gizi ini masih menjadi permasalahan yang kompleks di Indonesia sebagaimana Hasil dari Survei Status Gizi (SSGI) Kementerian Kesehatan RI terdapat adanya empat masalah gizi, antara lain:

Pertumbuhan (*stunting*) saat ini masih menjadi perhatian penuh oleh pemerintah dan masyarakat karena prevalensinya masih cukup tinggi dan akan mencapai 21,6 % pada tahun 2022. Angka tersebut melebihi ambang batas 20% yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Hal ini menunjukkan bahwa *stunting* masih tergolong kronis di Indonesia, namun prevalensi pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,8 poin persentase atau 24,4% dibandingkan tahun 2021. Dibandingkan tahun 2019, prevalensi bayi *stunting* di Indonesia mengalami penurunan sebesar 6,1 poin persentase. yaitu 27,7% pada saat itu.

*wasting* (kurus) Menurut SSGI 2022, prevalensi balita yang kurus di Indonesia meningkat sebesar 0,6 poin persentase pada tahun lalu dari 7,1% menjadi 7,7% Kemudian prevalensi anak balita atau anak gizi buruk menjadi 17,1% pada tahun 2022 atau meningkat 0,1% . poin dari tahun lalu. Prevalensi balita yang kelebihan berat badan atau obesitas akan mencapai 3,5% pada tahun 2022, sehingga berkurang 0,3 poin persentase dibandingkan tahun lalu.



**Gambar 1. 1**

**Masalah Gizi yang Dialami Balita Indonesia Menurut SSGI (2019-2022)**

Sumber : Data Box, *Masalah Gizi yang Dialami Balita Indonesia Menurut SSGI (2019-2022)*

Desa yang merupakan dasar dari sistem sosial yang kompleks yang mencakup politik, sosial, budaya, hukum dan keamanan. Dalam pelaksanaannya desa mempunyai peran yang strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Apabila suatu desa dapat secara mandiri mengurus kebutuhan warganya, maka dapat dikatakan desa tersebut telah mampu meningkatkan kesejahteraan warganya sekaligus menciptakan kehidupan bagi dirinya. Salah satu program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa adalah melalui program Pemberdayaan yang merupakan upaya mengurangi tidak merataan dengan memperluas kemampuan manusia.

Pemberdayaan masyarakat yang dipadukan dengan program Ketahanan Pangan merupakan Program pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dapat terciptanya peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui program pengembangan, kegiatan pelatihan keterampilan, namun program

pendampingan diperlukan untuk mewujudkan masyarakat berdaya dan mandiri. Bentuk pemberdayaan harus sesuai dengan potensi daerah dan dapat diakses oleh masyarakat itu sendiri, hal ini juga dijelaskan oleh Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan (2019: 8), “pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.”

Pemberdayaan masyarakat desa sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan seperti halnya yang di sebutkan dalam pasal 1 ayat (12) Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa bahwasanya “Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa”

Desa Janggala merupakan salah satu desa di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis, berdasarkan hasil observasi peneliti Desa Janggala mempunyai permasalahan gizi pada masyarakatnya. maka dari itu dalam upaya menyejahterakan rakyat perlu diadakannya suatu program pemberdayaan masyarakat yang dipadukan dengan program Ketahanan Pangan oleh pemerintah desa. Adapun program yang di implementasikan oleh pemerintah Desa Janggala dalam pemberdayaan masyarakat melalui program



ketahanan pangan yaitu dengan Peternakan kambing Etawa dan budidaya buah Naga Pemberdayaan kelompok tani .

Program pemberdayaan masyarakat ini juga pemerintah Desa Janggala lakukan sebagai implementasi dalam SDGS Desa poin 2 yaitu Tanpa Kelaparan menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Di Desa Janggala capaian yang tercantum dalam capaian SDGs Desa poin ke 2 yaitu 33.33% maka program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan di jadikan program prioritas sebagai perhatian serta penanganan pemerintah desa terhadap permasalahan gizi di Desa Janggala.

Namun dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini masih memiliki kendala dalam pengimplementasiannya hal ini dapat dilihat dengan adanya indikator-indikator sebagai berikut.

1. Belum terealisasinya pelatihan rutin yang telah rencanakan untuk pengelola ternak kambing etawawa dan juga pengelola perkebunan buah naga. Hal ini mengakibatkan pengetahuan dan keterampilan terkait pengelolaan belum optimal. Akibat dari tidak terlaksananya pelatihan tersebut adalah pengetahuan dan keterampilan para pengelola belum mencapai tingkat yang optimal. Hal ini dapat berdampak pada produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan ternak kambing etawa maupun perkebunan buah naga. Tanpa pelatihan yang memadai, para pengelola mungkin tidak dapat menerapkan teknik-teknik terbaru atau mengatasi tantangan yang ada.

2. Belum adanya peraturan desa yang spesifik untuk mengatur pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan ini. Akibatnya, Tanpa adanya landasan hukum yang jelas, program pemberdayaan masyarakat ini mungkin tidak memiliki pedoman yang kuat untuk pelaksanaannya, sehingga bisa menimbulkan kebingungan atau ketidakjelasan dalam prosedur dan tanggung jawab pihak-pihak terkait.
3. Adanya permasalahan struktur kepengurusan yaitu struktur organisasi kelompok pengelola program. Terdapat perbedaan pendapat dan ketidakjelasan terkait peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam struktur organisasi tersebut, khususnya dalam pengelolaan peternakan kambing etawa. Kondisi ini dapat menyebabkan terhambatnya koordinasi dan sinergi antar anggota kelompok pengelola, sehingga berdampak pada efektivitas pelaksanaan program.

Berdasarkan latar belakang di atas maka indikator permasalahan tersebut jika di biarkan akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan. Penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ketahanan Pangan di Desa Janggala Kecamatan Cidolog”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut

“Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ketahanan Pangan di Desa Janggala Kecamatan Cidolog”

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai rumusan masalah di atas maka, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

“Untuk menggambarkan pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan di Desa Janggala Kecamatan Cidolog.”

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung, khususnya bagi diri peneliti pribadi. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Untuk kepentingan dunia akademik, diharapkan penelitian ini dijadikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya kepustakaan dalam bidang ilmu pemerintahan, khususnya tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ketahanan Pangan di Desa Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis.

#### **2. Kegunaan Praktis**

a. Bagi Instansi

penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan referensi dan informasi yang digunakan instansi dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat berupa program inovasi lainnya yang ada dalam masyarakat desa saat ini.

b. Bagi Masyarakat

hasil penelitian bisa digunakan sebagai penambah wawasan dan pengalaman tentang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs desa.

d. Bagi Peneliti Bagi peneliti, penelitian yang dilakukan bisa menambah keilmuan, pengetahuan dan juga wawasan tentang pelaksanaan suatu program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Setelah Peneliti melakukan penelaahan terkait hal ini, secara garis besarnya belum ada yang mengkaji mengenai rumusan masalah di atas, di samping itu ada beberapa penelitian yang mungkin berkorelasi dengan rumusan masalah di atas yaitu :

1. Skripsi Dimas Sheva Scondio 2022 dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ketahanan Pangan Budidaya Lele Sistem Bioflok di Rumah Pemberdayaan Yayasan Insan Mulia Sejahtera Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses pemberdayaan terhadap masyarakat dilakukan melalui program ketahanan pangan budidaya lele sistem bioflok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan budidaya lele sistem bioflok, dan hasil pemberdayaan yang diperoleh dalam program ketahanan pangan budidaya lele sistem bioflok di Rumah Pemberdayaan Yayasan Insan Mulia Sejahtera.

Proses pemberdayaan terhadap masyarakat dilakukan melalui program ketahanan pangan budidaya lele sistem bioflok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan budidaya lele sistem bioflok, dan hasil

pemberdayaan yang diperoleh dalam program ketahanan pangan budidaya lele sistem bioflok di Rumah Pemberdayaan Yayasan Insan Mulia Sejahtera.

Hasil dari penelitian ini yaitu proses pemberdayaan terhadap masyarakat dilakukan melalui program ketahanan pangan budidaya lele sistem bioflok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan budidaya lele sistem bioflok, dan hasil pemberdayaan yang diperoleh dalam program ketahanan pangan budidaya lele sistem bioflok di Rumah Pemberdayaan Yayasan Insan Mulia Sejahtera.

2. Jurnal Siska Diana Sari dan Ana Irawati 2021 dengan judul Pemberdayaan Masyarakat melalui P2L (Program Pekarangan Pangan Lestari) sebagai Pemenuhan Hak Konstitusional Ketahanan Pangan

Penelitian ini mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat melalui P2L (Program Pekarangan Pangan Lestari) sebagai pemenuhan hak konstitusional ketahanan pangan, dengan isu hukum yang dibahas adalah pemenuhan hak konstitusional warga negara terhadap ketahanan pangan.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah masyarakat kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun, instrumental penelitian dengan pengamatan, wawancara dan dokumentasi, prosedur pengumpulan data dengan observasi, investarisasi dan kesimpulan, dan analisis data dengan menggunakan analisis data interaktif

Hasil penelitian ini adalah pemenuhan hak konstitusional warga negara di bidang ketahanan pangan dapat dicapai melalui program P2L (Pekarangan Pangan Lestari). Pemberdayaan masyarakat dalam program tersebut sangat bermanfaat selain pemenuhan ketahanan pangan keluarga, masyarakat juga dapat memperoleh pengalaman, ilmu dan bahan pangan yang bernilai gizi dan ekonomi tinggi

3. Jurnal Zuhriina Aidha dan Reni Agustina Harahap 2021 dengan judul Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Ketahanan Pangan Selama Pandemi COVID-19 di Kecamatan Bilah Barat

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya pandemi COVID-19 yang dihadapi secara global menyebabkan masalah pada sektor kesehatan, dan sektor lain seperti ekonomi, pertanian, dan sosial masyarakat. Beberapa negara termasuk Indonesia menerapkan kebijakan bekerja dan sekolah dari rumah untuk mencegah peningkatan penularan COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggapan masyarakat tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat dan manfaat pemberdayaan masyarakat dalam upaya ketahanan pangan di Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu selama pandemi COVID-19.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *action research*. Aksi yang dilakukan adalah membagi kelompok masyarakat di 10 desa/kelurahan di Kecamatan Bilah Barat. Setiap kelompok beranggotakan 10 orang, sehingga yang terlibat dalam aksi ada 100 orang. Kelompok diberi bibit sayuran (cabai, tomat, terong) dan pelatihan menanam bibit tersebut,

kemudian di monitoring dengan melihat perkembangan bibit dan dievaluasi dengan melihat hasil produksi, dan menanyakan tanggapan, manfaat dari pemberdayaan yang dilakukan

Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat mengatakan pemberdayaan masyarakat dan pelatihan menanam bibit pohon produktif seperti cabai, tomat dan terong dalam upaya ketahanan pangan di Kecamatan Bilah Barat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Manfaat yang dirasakan masyarakat dibagi 3 kategori, yaitu sangat baik (57%), baik (38%) dan kurang (5%). Tanggapan masyarakat dari pemberdayaan yang dilakukan juga baik (88%).

Berdasarkan uraian hasil penelitian terdahulu di atas bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan program ketahanan pangan, metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif untuk penelitian yang pertama dan ketiga dengan subyek penelitian yaitu masyarakat. Sedangkan perbedaannya yaitu permasalahan yang terjadi, metode dengan penelitian terdahulu yang kedua, teori strategi yang digunakan, dan jumlah informan yang diwawancarai dan objek serta waktu penelitian.



## 2.2. Landasan Teori

### 2.2.1 Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan kekuasaan. Istilah kekuasaan sering kali disinonimkan dengan kemampuan individu untuk memaksa dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkannya. Kemampuan ini sangat bagus untuk mengelola diri sendiri dan orang lain sebagai individu atau kelompok/organisasi, terlepas dari kebutuhan, potensi, atau keinginan orang lain. Dengan kata lain, kekuasaan menjadikan orang lain sebagai objek pengaruh atau keinginannya.

Kartasmita, (1996) dalam Mardikanto (2017:53) menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang didinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dan lain-lain (Mardikanto 2017:28)

Menurut Suharto (2014) dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, mezzo, dan makro.

1. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stres manajemen, krisis

*intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang Berpusat pada Tugas (*task centered approach*).

2. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran. Pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
3. Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (*large systemstrategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi Sistem Besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak

Menurut Parsons (1994) (Mardikanto 2017:29) menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dana atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya, yang berupa : modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran, dan lain-lain. Agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan

kesempatan kerja demi perbaikan kehidupan dan kesejahteraan (Sumodiningrat 2003) Mardikanto (2015:33-34)

Dalam konsep pemberdayaan, menurut Prijano dan Pranarka (1996) dalam Mardikanto (2015:51) menyebutkan bahwa manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus di tunjukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

### **2.2.2 Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pengembangan sumber daya manusia/diri sosial berupa penemuan kapasitas pribadi, kreativitas, bakat dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari sebelumnya. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pembangunan yang menggugah masyarakat untuk secara proaktif memulai suatu proses tindakan sosial untuk memperbaiki keadaan dan kondisinya sendiri.

Pemberdayaan masyarakat hanya dapat terjadi jika masyarakat itu sendiri dilibatkan. Kunci pemberdayaan meliputi: proses pembangunan, inisiatif masyarakat, perbaikan keadaan mereka sendiri. Keberhasilan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melaksanakan pemberdayaan tetapi juga oleh kegiatan pihak yang

diberdayakan dalam mengubah situasi dan kondisi menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Mardikanto (2017 :100) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat yaitu “ proses perubahan sosial ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang berpartisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua *stakeholders* (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.”

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sebagai mereka yang memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, menjangkau sumber sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan- keputusan yang mempengaruhi mereka. (Suharto, 2014 :58)

Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Kegiatan ini kemudian menjadi basis program daerah, regional dan bahkan program nasional Mardikanto (2015:62).

Edi Suharto (2014; hlm 63-64) menyimpulkan bahwa terdapat indikator-indikator keberdayaan masyarakat meliputi:

1. Kekuasaan Dalam (*power within*) Adanya kesadaran dan keinginan untuk berubah, yaitu meliputi keinginan untuk berperan dalam mengembangkan kearifan lokal tikar mendong, keinginan untuk berpartisipasi dan mengembangkan potensi diri dalam pengembangan kearifan lokal tikar mendong.
2. Kekuasaan untuk (*power to*) Kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses meliputi bertambahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat, kemudahan dalam memperoleh kredit dan kemudahan bekerja sama dengan lembaga-lembaga eksternal dan perusahaan.
3. Kekuasaan Atas (*power over*) Kemampuan menghadapi hambatan meliputi terpenuhinya kebutuhan hidup, perubahan dan kepemilikan aset, adanya perubahan peran di dalam keluarga, serta peran dan keterlibatan di dalam masyarakat.
4. Kekuasaan Dengan (*power with*) Kemampuan kerja sama dan solidaritas meliputi adanya kerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

### 2.2.3 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan ialah untuk membimbing orang dan masyarakat menjadi bebas. Kebebasan ini mencakup kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Demikian juga, penting untuk menyelidiki apa yang sebenarnya disimpulkan sebagai masyarakat otonom.

Menurut Mardikanto (2015:202), terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat, :

1. Perbaikan kelembagaan (*better institution*). Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
2. Perbaikan usaha (*better business*). Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibisnislitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

3. Perbaikan pendapatan (*better income*). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
4. Perbaikan lingkungan (*better environment*). Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
5. Perbaikan kehidupan (*better living*). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
6. Perbaikan masyarakat (*better community*). Kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

#### **2.2.4 Manfaat Pemberdayaan Masyarakat**

1. Memberikan partisipasi dan peningkatan kapasitas

Pada dasarnya ketika masyarakat diberdayakan, orang merasa bebas untuk bertindak dan pada saat yang sama mengasosiasikan rasa memiliki terhadap masyarakat tersebut. Hal ini dilakukan melalui partisipasi dan peningkatan kapasitas, orang-orang akan menemukan kembali potensi mereka dan mendapatkan kepercayaan diri. Mereka juga merasa berharga bagi masyarakat, atas bantuan yang mereka berikan-untuk membuat perubahan.

2. Memberikan Inisiasi Tindakan

Kegunaan pemberdayaan masyarakat dapat menginisiasi tindakan di tingkat individu, yang dapat mencapai tingkat masyarakat bahkan nasional. Dalam hal ini misalnya saja seseorang yang menjadi korban kecelakaan, dapat mengumpulkan sekelompok orang untuk bisa jadi teman dekat, keluarga, atau bahkan orang asing yang telah

bergabung untuk tujuan baik dan membantu membuat orang lain peka tentang langkah-langkah keselamatan jalan raya.

### 3. Pengembangan kelompok kecil

Proses dalam pengembangan kelompok kecil dapat memulai tindakan kolektif. Hal ini juga merupakan sarana bagi praktisi untuk mendapatkan keterampilan pengabdian masyarakat, keterampilan kepemimpinan untuk beberapa, keterampilan manajemen, mengembangkan empati, memperluas jaringan, membentuk kemitraan dan mewujudkan kohesi sosial.

### 4. Menawarkan Penyelesaian Masalah

Banyak berbagai jenis organisasi masyarakat menawarkan cara untuk menyelesaikan masalah kemasyarakatan. Itu termasuk kelompok muda, kelompok kepercayaan, dewan komunitas dan asosiasi. Mereka memiliki kekuatan untuk memobilisasi sumber daya. Pengembangan organisasi masyarakat memerlukan beberapa bentuk kepemimpinan dan mereka yang melayani masyarakat memiliki peluang lebih baik untuk mengembangkan kapasitas masyarakat dan dapat menjadi pemimpin masa depan.

### 5. Memberikan Pengaruh Implementasi Program

Individu yang diberdayakan pada tujuan pemberdayaan akan mampu mempengaruhi arah dan implementasi program melalui partisipasi mereka. Mereka berkembang dari tindakan pribadi ke titik di mana mereka terlibat secara kolektif.

### **2.2.5 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat**

Mathew dalam Mardikanto (2017:105) menyatakan bahwa prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten.

Prinsip merupakan aspek yang penting di bahas dalam proses pemberdayaan masyarakat yaitu masalah prinsip pemberdayaan yang terkait dengan persoalan kebijakan yang dapat di gunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberdayaan secara utuh, komprehensif dan menyeluruh sehingga sasaran yang ingin di capai terutama dalam memberdayakan kelompok yang di nilai sangat rentan terhadap masalah kemiskinan dapat terealisasi.

Dahama dan Batnagar (1980) dalam Mardikanto (2017:106) menyebutkan prinsip-prinsip pemberdayaan mencakup :

1. Minat dan kebutuhan, artinya pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu pada minat dan kebutuhan masyarakat.
2. Organisasi masyarakat bawah, artinya pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan/ menyentuh organisasi masyarakat bawah.
3. Keragaman budaya, artinya pemberdayaan harus memperhatikan adanya keragaman budaya.
4. Kerja sama dan partisipasi, artinya pemberdayaan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan masyarakat untuk kerja sama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang.

### **2.2.6 Pengertian Ketahanan Pangan**

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup. Untuk mewujudkan kecukupan pangan bagi seluruh warga desa, pencapaian kemandirian pangan desa, dan memastikan



desa terlepas dari kerawanan pangan untuk itu desa harus segera bersiap melaksanakan langkah-langkah pencegahan krisis pangan. Pola konsumsi masyarakat yang tidak berpijak pada sumber pangan lokal, akan menciptakan krisis pangan di masa yang akan datang.

Ketahanan pangan didefinisikan sebagai: “Ketahanan pangan terjadi apabila semua orang secara terus menerus, baik secara fisik, sosial, dan ekonomi mempunyai akses untuk pangan yang memadai/cukup, bergizi dan aman, yang memenuhi kebutuhan pangan mereka dan pilihan untuk hidup aktif dan sehat”. Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan secara fisik di daerah, yang diperoleh baik dari hasil produksi domestik, impor/perdagangan maupun bantuan pangan.

Ketersediaan pangan ditentukan dari produksi domestik, masuknya pangan melalui mekanisme pasar, stok pangan yang dimiliki pedagang dan pemerintah, serta bantuan pangan baik dari pemerintah maupun dari badan bantuan pangan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau tingkat Masyarakat.

Undang-undang republik Indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang pangan Pasal 1 ayat (4) menyebutkan Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

### 2.2.7 Aspek Ketahanan Pangan

Aspek ketahanan pangan terdiri dari empat elemen utama, yaitu:

1. Ketersediaan pangan (*availability*), yaitu kesiapan pasokan pangan yang mencukupi baik dari produksi domestik maupun impor.
2. Keterjangkauan pangan (*affordability*), yaitu kemampuan masyarakat untuk membeli pangan sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya.
3. Pemanfaatan pangan (*utilization*), yaitu kemampuan masyarakat untuk mengonsumsi pangan secara sehat, bergizi, dan aman.
4. Stabilitas pangan (*stability*), yaitu keberlanjutan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan tanpa terganggu oleh faktor-faktor risiko seperti bencana alam, perubahan iklim, konflik sosial, atau fluktuasi harga.

### 2.2.8 Indikator Ketahanan Pangan

Indikator ketahanan pangan adalah alat ukur untuk menilai tingkat ketahanan pangan suatu negara atau wilayah. Indikator ketahanan pangan dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif. Beberapa contoh indikator ketahanan pangan adalah:

1. Persentase penduduk yang mengalami kelaparan atau kurang gizi (*undernourishment*).
2. Persentase penduduk yang mengalami kerawanan atau ketidakamanan pangan (*food insecurity*).
3. Indeks Ketahanan Pangan Global (*Global Food Security Index*) yang mengukur ketahanan pangan dari empat indikator besar: keterjangkauan harga pangan (*affordability*), ketersediaan pasokan (*availability*),

kualitas nutrisi dan keamanan makanan (*quality and safety*), serta ketahanan sumber daya alam (*natural resources and resilience*).

4. Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) yang mengukur tingkat pembangunan manusia dari tiga aspek: harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.
5. Indeks Kemiskinan Multidimensi (*Multidimensional Poverty Index*) yang mengukur kemiskinan dari tiga dimensi: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.

### **2.2.9 Strategi Ketahanan Pangan**

Strategi ketahanan pangan adalah rencana aksi yang dirancang untuk mencapai tujuan ketahanan pangan. Strategi ketahanan pangan dapat bersifat nasional, regional, atau lokal. Beberapa contoh strategi ketahanan pangan di Indonesia adalah:

1. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui pengembangan teknologi, peningkatan modal usaha tani, penyediaan sarana irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya.
2. Mendorong diversifikasi produksi dan konsumsi pangan melalui pengembangan komoditas lokal yang berpotensi dan sesuai dengan kondisi agrioeкологи masing-masing daerah.
3. Meningkatkan kualitas dan keamanan pangan melalui penerapan standar mutu, pengawasan sanitasi, dan peningkatan gizi masyarakat.
4. Meningkatkan akses dan distribusi pangan melalui peningkatan kesejahteraan petani, pengembangan sistem logistik dan rantai pasok, serta perlindungan konsumen.

5. Meningkatkan ketahanan sumber daya alam melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Menurut Sugiyono (2019) kerangka berpikir adalah sintesis yang mencerminkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis penelitian yang berbentuk bagan alur yang dilengkapi penjelasan kualitatif.

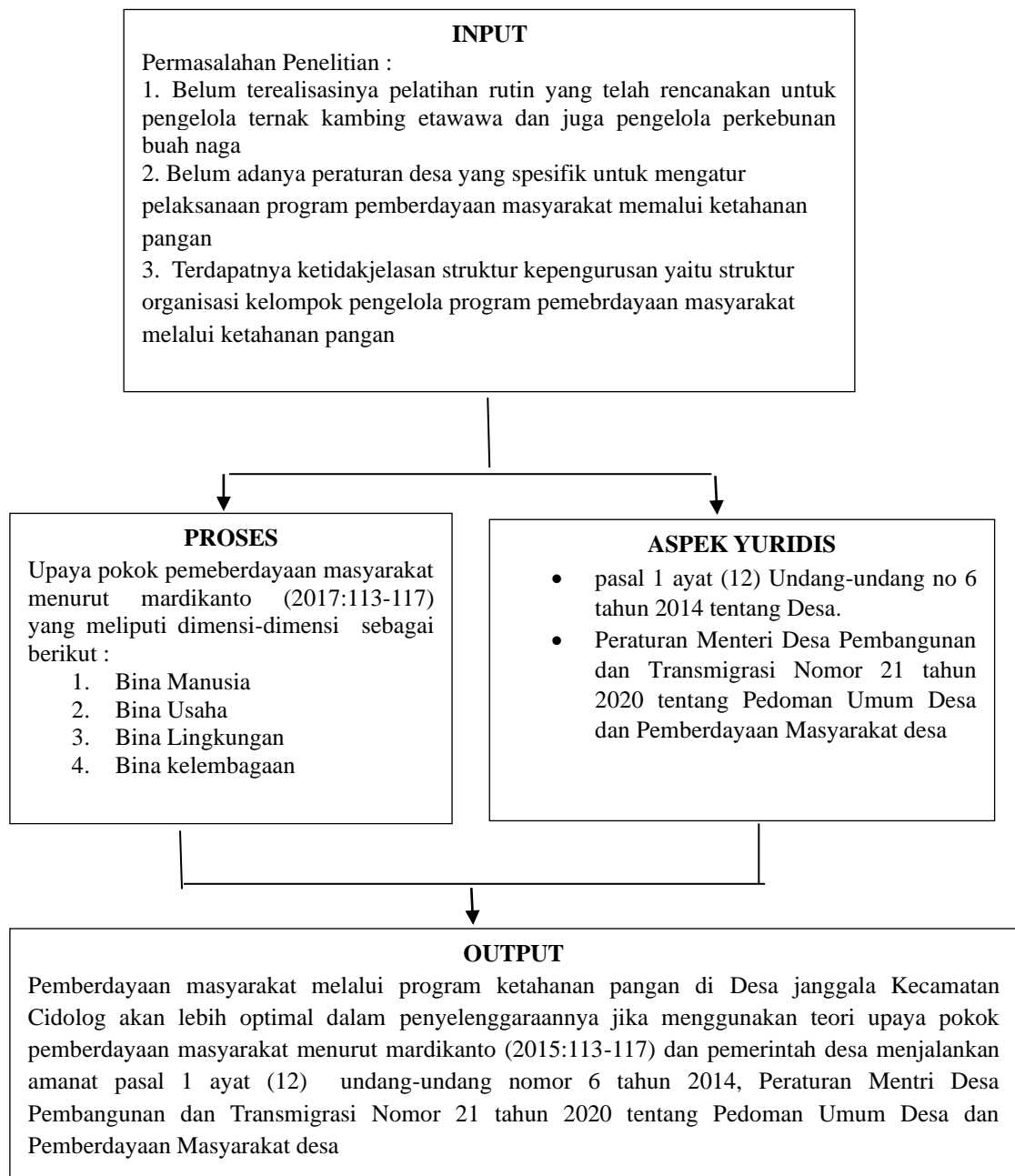
Berdasarkan kajian teori yang telah di jelaskan sebelumnya di atas , maka dibuatlah kerangka fikir yang bertujuan untuk meminimalisir adanya kekeliruan peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan.

penelitian ini dilakukan melihat dari masalah yang terjadi di lapangan, yaitu masih terdapatnya masyarakat yang belum memahami akan pentingnya asupan gizi pada masa tumbuh kembang anak, di Desa Janggala ini juga masih terdapat masyarakat yang kurang pengetahuannya terhadap pengelolaan sumber daya alam yang merupakan salah satu pilar ketahanan pangan yang mana nantinya hasil dari pengelolaanya dapat dijadikan salah satu cara untuk memperbaiki keadaan gizi di Desa Janggala yang masih tinggi.

Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu bidang kajian ilmu pemerintahan pada mata kuliah sistem pemerintahan desa, maka dari itu dalam

melakukan analisa dari permasalahan dan teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang berdasarkan teori-teori Ilmu Pemerintahan.

Pemberdayaan masyarakat yang di artikan sebagai merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial (Subejo dan Narimo (2004) dalam Mardikanto (2017:32), maka dari itu pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini perlu adanya di Desa Janggala untuk mendorong salah satu capaian masyarakat yang sejahtera melalui turunnya angka gizi buruk di Desa Janggala.



**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**

Sumber : Diolah Peneliti 2023

## 2.4 Proposisi

Proposisi adalah dugaan sementara dari sebuah penelitian terhadap fenomena yang terjadi. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka proposisi pada penelitian adalah sebagai berikut:

Permasalahan yang terjadi di masyarakat Desa Janggala yaitu masih terdapatnya masyarakat yang belum sadar akan pentingnya asupan gizi bagi perkembangan otak dan fisik anak yang mengakibatkan angka gizi buruk meningkat, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat dalam pengelola sumber daya alam yang tersedia sebagai salah satu pilar program ketahanan pangan, dan belum optimalnya fasilitas penunjang di masyarakat dalam sektor ketahanan pangan maka perlu adanya implementasi pasal 1 ayat (12) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Desa yaitu:

“Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa”.

Pemberdayaan masyarakat di Desa Janggala akan lebih optimal apabila dilakukannya sesuai teori upaya pokok pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto (2017 :113-117) yaitu meliputi dimensi-dimensi sebagai berikut :

1. Bina Manusia
2. Bina Usaha,
3. Bina Lingkungan
4. Bina kelembagaan

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian bertujuan untuk memberi pegangan yang jelas dan terstruktur kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya

Dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan di Desa Janggala Kecamatan Cidolog. Penulis akan menganalisis temuan data dan kemudian memaparkan hasil analisis hingga akhirnya peneliti menyimpulkan pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan di Desa Janggala Kecamatan Cidolog.

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang merupakan suatu metode penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.



Menurut Ibrahim (2018:52) mengatakan bahwa pendekatan kualitatif merupakan cara kerja penelitian yang menitik beratkan pada aspek pendalaman data untuk memperoleh kualitas dari penelitian yang dilakukan. Pendekatan kualitatif menggunakan kata atau kalimat deskriptif, dimulai dengan pengumpulan data sampai dengan menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian.

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana penelitian ini bersifat deskriptif, maka dari itu nantinya data yang akan di masukan ke dalam tulisan ini berbentuk narasi yang akan mendeskripsikan data-data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan informan di lapangan.

Sugiyono (2022:9) mengatakan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pos positivisme, atau interpretif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah di mana peneliti sendiri adalah instrumennya, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi) data yang diperoleh cenderung data kualitatif, dan di analisis yang bersifat kualitatif /induktif dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan , mengonstruksi fenomena dan menemukan hipotesis.

### 3.2 Operasionalisasi Konsep

Sugiyono, (2022) menyatakan definisi operasional dalam variabel penelitian ialah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Konsep penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat. Adapun operasionalisasi konsep pada penelitian ini yaitu upaya pokok pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto (2015:113-117) yang meliputi dimensi-dimensi sebagai berikut :

1. Bina Manusia
  - a. Pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kapasitas kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan ke profesionalan.
  - b. Pengembangan kapasitas entitas/kelembagaan
  - c. Pengembangan kapasitas sistem
2. Bina Usaha
  - a. Pemilihan komoditas dan jenis usaha
  - b. Pembentukan badan usaha
  - c. Pengembangan sarana dan prasarana
3. Bina Lingkungan

Kewajiban dipenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang terkait dengan perlindungan,

pelestarian, dan pemulihan (rehabilitasi/reklamasi) sumber daya alam dan lingkungan.

4. Bina kelembagaan
  - a. Komponen personal, dimana orang-orang yang terlibat di dalam suatu kelembagaan dapat difikasi dengan jelas,
  - b. Komponen kepentingan, dimana orang-orang tersebut pasti sedang diikat oleh kepentingan atau tujuan, sehingga diantara mereka terpaksa harus saling berinteraksi,
  - c. Komponen aturan, dimana setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam kelembagaan tersebut.
  - d. Komponen struktur, dimana setiap orang memiliki posisi dan peran yang harus dijalankannya secara benar, orang tidak bisa merubah-ubah posisinya dengan kemauan sendiri.

### **3.3 Data dan Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni dari yang menjadi subjek pada penelitian ini. Data primer dalam penelitian adalah data yang di hasilkan dari wawancara langsung bersama informan. Adapun informan yang akan di lakukan wawancara oleh peneliti pada penelitian ini meliputi :

**Tabel 3.1**  
**Daftar Informan Penelitian**

No.	Informan	Jumlah	Informasi
1.	Kepala Desa	1	Untuk mengetahui latar belakang adanya program pemberdayaan
2.	Kasi perencanaan	1	Untuk mengetahui tindak lanjut dari perencanaan program pemberdayaan masyarakat
3.	Kasi Kesejahteraan	1	Untuk mengetahui upaya dalam pemberdayaan masyarakat
4.	Kepala Dusun	1	Untuk mengetahui potensi SDA di lingkungan Dusun
5	Perwakilan Kelompok Karang taruna dan Tani	3	Untuk mengetahui progres dari implementasi program pemberdayaan masyarakat
6.	Masyarakat	2	Untuk mengetahui hasil dari adanya program pemberdayaan
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	

*Sumber : Diolah Peneliti 2023*

## 2. Data Sekunder

Data yang di peroleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap meliputi buku-buku dan dokumen sebagai referensi terhadap tema yang peneliti angkat. Data Sekunder dalam penelitian ini terdiri dari jurnal ilmiah, buku, buku, dokumen dan artikel yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sugiyono (2022:104).

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

1. Observasi dengan jenis terus-terang atau tersamar pada penelitian ini peneliti lakukan dengan cara terus terang kepada sumber data
2. wawancara dengan jenis semi terstruktur yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.
3. Studi kepustakaan melalui hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan, buku-buku, maupun jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini
4. Dokumentasi

### 3.5 Teknik Pengolahan/Analisis Data

Nasution dan Sugiyono (2022:130) menyatakan bahwa melakukan analisis data adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang disarankan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data dari Miles dan Huberman, (Sugiyono, 2022:134), yaitu:

1. *Data collection*/(Pengumpulan data). dalam kegiatan ini peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi/obyek yang diteliti, dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang banyak dan bervariasi.

2. *Data reduction*/(reduksi data). Setelah diperoleh data dari lapangan maka dilakukan reduksi data dengan hal tersebut akan memberikan gambaran yang jelas. Dalam hal ini peneliti akan dipandu oleh teori dan tujuan yang akan dicapai.
3. *Data display*/(penyajian data) Setelah data direduksi maka selanjutnya yaitu penyajian data Pada tahap ini akan memudahkan memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya.
4. *Conclusion drawing*/(verification) Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan dengan disertai bukti-bukti yang valid.

### 3.6 Jadwal Penelitian

Rencana penelitian yang penulis lakukan selama 6 bulan, terhitung mulai dari bulan November 2023 sampai dengan bulan April 2024, rencana untuk tahap awal penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2**  
**Jadwal Dan Waktu Penelitian**

No.	Kegiatan	2023			2024						
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli
1.	Observasi										
2.	Studi Kepustakaan										
3.	Penyusunan Proposal										
4.	Seminar Proposal										
5.	Penelitian										
6.	Penyusunan Skripsi										
7.	Sidang Skripsi										

Sumber: Diolah Peneliti 2023

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

###### **4.1.1.1 Sejarah Desa Janggala**

Istilah Kata Janggala berasal dari kata “Jang” yang artinya “untuk” ;dan “Ngala” yang berarti “Meraih” pada waktu itu potensi Sumber Daya Alam masih alami dan subur sehingga mayoritas masyarakat bermatapencaharian sebagai petani dan hasil tani yang termashur adalah tembakau, yang dikenal dengan tembakau obrog, banyak masyarakat yang datang bahkan dari luar daerah sehingga desa pun dinamai Desa Janggala.

Selanjutnya sehubungan tempat tersebut dikeramatkan maka pusat pemerintahan mengalami perpindahan ke Desa kolot (sekarang Dusun Sukmaju). Secara geografis dan jumlah penduduk pada saat itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sehingga pusat pemerintahan Desa Berpindah lagi ke Dusun Gandapura dikarenakan agar pusat pemerintahan Desa berada di tengah- tengah Desa, yang pada waktu itu jumlah Dusun sebelum dimekarkan berjumlah 7 (Tujuh) yaitu Gandapura, Cinangsi, Sukamaju, Sukalillah, Sukajadi, Sukadana dan Gunungsari setelah melihat berbagai pertimbangan luas wilayah dan jumlah penduduk memenuhi persyaratan untuk pemekaran maka Desa Janggala dimekarkan menjadi 2 Desa pada tanggal 28 Februari 1983 dengan Desa awal tetap bernama Desa Janggala dan Desa Pemekaran Bernama Desa Hegarmanah.

Untuk pusat pemerintahan Desa Janggala tetap berlokasi di Dusun Gandapura dengan jumlah Dusun ada 6 (enam) yaitu: Dusun Gandapura, Dusun Cinangsi, Dusun Sukamaju, Dusun Sukasari, Dusun Karangtingal dan Dusun Sukalillah, selain itu juga Desa Janggala diapit oleh 2 (dua) Sungai Yaitu: Sungai Cihapitan yang berhulu di Gunung Pangajar dan Sungai Cikembang yang berhulu di Gunung Gadung yang ke semuanya berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

#### **4.1.1.2 Visi dan Misi Desa Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis**

Visi dan misi Desa Janggala ini disesuaikan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah kabupaten Ciamis, hal ini dimaksudkan supaya ada korelasi positif dalam proses pencapaiannya. Dimana Visi dan misi Pemerintah Daerah kabupaten Ciamis adalah *"Terwujudnya Ciamis yang Mandiri dalam Ekonomi, Adil dalam Budaya dan Demokratis dalam Politik dengan Didasari Ridlo Allah SWT."* Berangkat dari hal tersebut, maka kepala Desa Janggala menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

##### **A. Visi**

***"Gotong royong membangun desa janggala yang jujur, adil dan sejahtera  
berbudaya dan berahklak mulia "***

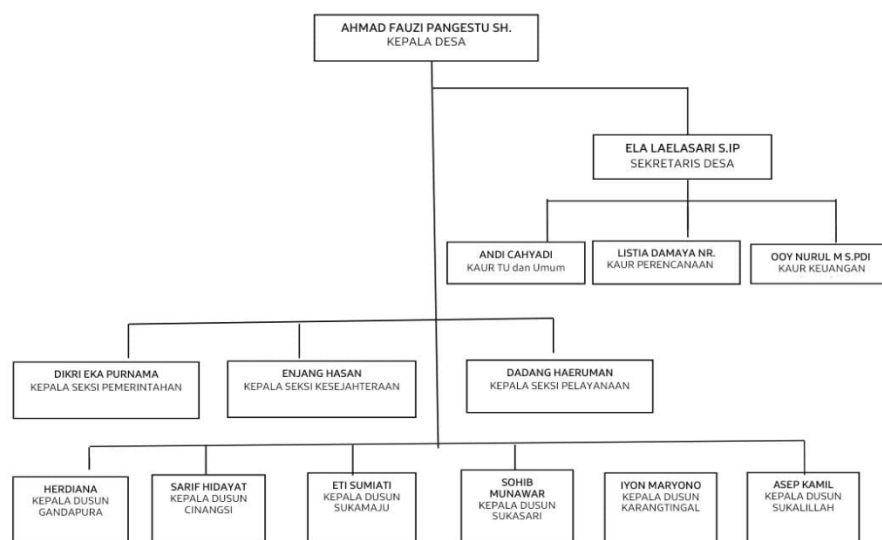
##### **B. Misi**

1. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
2. Mengedepankan kejujuran dan munyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat Desa.
3. Meningkatkan Profesionalitas dan mengoptimalkan seluruh Perangkat Desa untuk percepatan Pembangunan.



4. Mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai.
5. Mewujudkan dan meningkatkan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan optimalisasi kebutuhan yang menjadi prioritas khususnya di bidang pertanian.
6. Meningkatkan pelayanan Kesehatan masyarakat desa yang maksimal.
7. Meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan.
8. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa.
9. Membangun dan meningkatkan PAD desa untuk kesejahteraan masyarakat dan desa salah satunya dengan cara membuat desa wisata.
10. Mewujudkan pengembangan pengelolaan sistem informasi desa.

#### 4.1.1.3 Struktur Organisasi Kantor Desa Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis



**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Pemerintah Desa Janggala Kecamatan Cidolog**

*Sumber: profil desa janggala 2023*

#### **4.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa Janggala**

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- j. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- k. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- l. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- m. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Desa berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian dan pengendalian kegiatan kesekretariatan meliputi golongan ketatausahaan, administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi dan tata laksana serta pemberian layanan teknis administratif kepada satuan organisasi Pemerintah Desa.

Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kerja serta fasilitasi organisasi dan tata laksana;
- b. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Desa;
- c. Pengelolaan ketatausahaan, administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- d. Pelaksanaan koordinasi kebersihan dan keindahan lingkungan di dalam dan di luar kantor;
- e. Penyusunan rancangan Peraturan Desa dan laporan pertanggungjawaban;
- f. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya.

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh kepala seksi Pemerintahan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan serta bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Urusan melaksanakan tugas, urusan pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program kerja di bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban umum;
- b. Penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- c. Fasilitasi administrasi pertanahan;
- d. Pelaksanaan pembinaan lingkungan;
- e. Pelaksanaan pembinaan lingkungan warga;
- f. Pelaksanaan pembantuan pemungutan pajak dan retribusi serta pendapatan lain;
- g. Pelaksanaan pembantuan pendataan obyek dan subjek pajak;
- h. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
- i. Pelaksanaan fasilitasi sistem keamanan lingkungan;
- j. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- k. Melaksanakan kegiatan lain yang diperintahkan kepala desa; dan
- l. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya.

Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Urusan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, urusan Kesejahteraan masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program kerja di bidang Kesejahteraan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat meliputi fasilitas pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengembangan kelembagaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan kesejahteraan masyarakat meliputi bidang sosial, tenaga kerja, transmigrasi dan kehidupan keagamaan;
- d. Pendataan masalah sosial;
- e. Fasilitasi pembinaan generasi muda, olahraga dan kesenian;
- f. Melaksanakan kegiatan lain yang diperintahkan kepala desa; dan
- g. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya.

Urusan Tata Usaha dan Umum dipimpin oleh kepala Tata Usaha dan Umum berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa. Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, pemeliharaan barang inventaris, rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, penyusunan rencana kebutuhan perangkat, rotasi perangkat, pemberhentian perangkat, serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas, Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program kerja di urusan umum dan kepegawaian
- b. Pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat
- c. Penyusunan rencana kebutuhan Perangkat Desa, rotasi Perangkat Desa, pemberhentian Perangkat Desa, pengembangan kapasitas Perangkat Desa, peningkatan kesejahteraan Perangkat Desa dan pembinaan administratif Perangkat Desa

- d. Pengelolaan rumah tangga, administrasi kepegawaian, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang-barang inventaris;
- e. Pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan di dalam dan di luar kantor;
- f. Melaksanakan kegiatan lain yang diperintahkan sekretaris desa; dan
- g. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya.

Urusan Perencanaan dipimpin oleh Kepala Urusan Perencanaan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa. Urusan Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan Penyusunan program kerja pemerintah desa, rencana anggaran dan evaluasi kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas, Urusan Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program, pengelolaan data dan penyajian laporan kegiatan;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana program pemerintah desa dari tiap-tiap bidang urusan dan seksi;
- c. Pelaksanaan pengendalian program;
- d. Melaksanakan kegiatan lain yang diperintahkan sekretaris desa; dan
- e. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya.

Urusan keuangan dipimpin oleh kepala urusan keuangan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa. Urusan keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan keuangan desa dan fasilitasi kebendaharaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok urusan keuangan mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan administrasi keuangan dan pemeliharaan dokumen Keuangan perhitungan anggaran dan fasilitasi kebendaharaan;
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan yang baru untuk dikembangkan;
- c. Pelaksanaan teknis administrasi bidang keuangan;
- d. Melaksanakan kegiatan lain yang diperintahkan sekretaris desa; dan
- e. Penyusunan laporan kegiatan keuangan desa.

Unsur Kewilayahan dipimpin oleh kepala dusun berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Kepala dusun mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya serta menjalankan tugas lain dari pemerintah desa.

#### **4.1.1.5 Kondisi Geografis Desa Janggala**

##### **1. Letak Geografis**

Luas wilayah Desa Janggala 1031,47 Ha, yang terdiri dari 6 (enam) Dusun dengan jumlah RW sebanyak 14 (empat belas) dan RT sebanyak 29 (dua puluh sembilan).

Wilayah administratif/batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	:Desa Beber dan Desa Jayaraksa Kecamatan Cimaragas
Sebelah Timur	:Desa Cidolog Kecamatan Cidolog
Sebelah Selatan	:Kabupaten Tasikmalaya
Sebelah Barat	:Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog

## 2. Topografi

- a. Ketinggian dari permukaan laut : 35m – 60m MDPL
- b. Suhu maksimal/minimum : 25° c / 30° c
- c. Jarak kantor Desa dari
  - Ibu kota Kecamatan : 3.5 km
  - Ibu kota Kabupaten : 25 km
  - Ibu kota Provinsi :150 km
  - Ibu kota Negara :270 km
- d. Curah hujan :1541 mm Tipe C
- e. Letak Desa
  - Perbukitan : 12 ha/m<sup>2</sup>

## 3. Hidrologi dan klimatologi

Aspek hidrologi suatu wilayah Desa sangat diperlukan dalam pengendalian dan pengaturan tata air wilayah desa. Berdasarkan hidrologinya aliran – aliran sungai di wilayah Desa Janggala diantaranya sungai cihapitan yang bermuara ke sungai cise,el dan sungai cikembang yang bermuara ke citanduy.

Disamping itu ada pula beberapa mata air yang bisa digunakan sebagai sumber mata air bersih maupun untuk sumber air pertanian namun bilamana terjadi musim kemarau Panjang, sumber mata air tersebut kurang berfungsi mata air yang ada di Desa Janggala diantaranya :mata air Cijengkol, cikiara, cilanggong, pongpoklanak, cawenekoneng, cibayongbong, bunter, cinemol, cimande, ladur, citunduy, cikirinjing, sukaasih, Cicalung, batu lawang, tenjolaya, babakan domba, gunung putri, rancaputat dan karacak.



#### 4.1.1.6 Keadaan Penduduk Desa Janggala

Penduduk Desa Janggala terdiri dari 3.915 orang laki-laki berjumlah 1.959 dan perempuan 1.956. adapun data umur warga desa janggala adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Penduduk Desa Janggala Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Kategori	Jumlah
1.	Laki-laki	1.959 Orang
2.	Perempuan	1.956 Orang
3.	<b>Total</b>	<b>3.915 Orang</b>

*Sumber: Profil Desa Janggala 2023*

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa terkait dengan data kependudukan di Desa Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis menyajikan data jumlah penduduk Desa Janggala berdasarkan jenis kelamin. Terdapat 3.915 penduduk yang tinggal di Desa Janggala, dengan rincian 1.959 orang laki-laki dan 1.956 orang Perempuan. Data ini menunjukkan bahwa populasi Desa Janggala relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan.

**Tabel 4.2**  
**Data Umur Penduduk Desa Janggala**

No	Kategori	Jumlah
1.	0-5 Tahun	164 Orang
2.	11-15 Tahun	301 Orang
3.	16-20 Tahun	295 Orang
4.	21-25 Tahun	345 Orang

5.	26-30 Tahun	296 Orang
6.	31-35 Tahun	242 Orang
7.	36-40 Tahun	221 Orang
8.	41-50 Tahun	516 Orang
9.	51-60 Tahun	554 Orang
10.	6-15 Tahun	266 Orang
11.	61-70 Tahun	435 Orang
12.	71-75 Tahun	126 Orang
13.	75 Keatas	154 Orang

*Sumber: Profil Desa Janggala 2023*

Berdasarkan Tabel 4.2 Data Umur Penduduk Desa Janggala Tabel tersebut menunjukkan jumlah penduduk Desa Janggala yang dipilih berdasarkan rentang usia tertentu. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Janggala berada pada usia produktif, yaitu antara 21-60 tahun, dengan jumlah yang cukup besar. Namun, terdapat juga penduduk yang berusia di bawah 21 tahun dan di atas 60 tahun, meskipun dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok usia produktif.

**Tabel 4.3**  
**Data Pendidikan Penduduk desa Janggala**

<b>NO</b>	<b>Kategori</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Akademi/Diploma III/S. Muda	10 Orang
2.	Diploma I/II	5 Orang
3.	Diploma IV/Strata I	50 Orang

4.	SLTA/Sederajat	266 Orang
5.	SLTP/Sederajat	704 Orang
6.	Strata II	2 Orang
7.	Tamat SD/Sederajat	1823 Orang
8.	Tidak Tamat SD/Sederajat	356 Orang
9.	Tidak/Belum Sekolah	699 Orang

*Sumber: Profil Desa Janggala 2023*

Berdasarkan Tabel 4.3 Data Pendidikan Penduduk Desa Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis menunjukkan distribusi tingkat pendidikan penduduk Desa Janggala. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Janggala masih cukup rendah, dengan sebagian besar hanya menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama.

**Tabel 4.4**  
**Data Pekerjaan Penduduk Desa Janggala**

No.	Kategori	Jumlah
1.	Belum/Tidak Bekerja	1432 Orang
2.	Mengurus Rumah Tangga	997 Orang
3.	Petani/Pekebun	574 Orang
4.	Wiraswasta	247 Orang
5.	Buruh Harian Lepas	227 Orang
6.	Pedagang	135 Orang

7.	Perdagangan	57 Orang
8.	Pelajar/Mahasiswa	53 Orang
9.	Karyawan Swasta	41 Orang
10.	Buruh Tani/Perkebunan	31 Orang
11.	Sopir	21 Orang
12.	Pegawai Negeri Sipil	16 Orang
13.	Karyawan Honorer	11 Orang
14.	Tukang Kayu	10 Orang
15.	Pensiunan	9 Orang
16.	Guru	9 Orang
17.	Perangkat Desa	8 Orang
18.	Ustadz/Mubaligh	7 Orang
19.	Tukang Batu	6 Orang
20.	Tukang Jahit	5 Orang
21.	Imam Mesjid	4 Orang
22.	Buruh Peternakan	4 Orang
23.	Mekanik	4 Orang
24.	Transportasi	1 Orang
25.	Kepala Desa	1 Orang
26.	Bidan	1 Orang
27.	Karyawan BUMN	1 Orang
28.	Lainnya	2 Orang

Sumber: Profil Desa Janggala 2023

Berdasarkan Tabel 4.4 Data Pekerjaan Penduduk Desa Janggala, menunjukkan berbagai kategori pekerjaan yang ditekuni oleh penduduk Desa Janggala dan jumlah orang yang menekuni pekerjaan tersebut. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Janggala belum atau tidak bekerja, dengan jumlah mencapai 1.432 orang. Selain itu, terdapat 997 orang yang mengurus rumah tangga, dan 574 orang bekerja sebagai petani atau pekebun. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Janggala bekerja di sektor pertanian dan sektor informal, seperti wiraswasta, buruh harian lepas, dan pedagang, serta ada juga yang bekerja sebagai karyawan swasta dan Pegawai Negeri Sipil, meskipun dengan jumlah yang lebih sedikit.

#### 4.1.2 Sarana dan Prasarana Desa Janggala

**Tabel 4.5**  
**Sarana Pendidikan Desa Janggala**

No	Nama Sekolah	Satus	Lokasi
1	PAUD Tsamrotul Fuad	Swasta	Gandapura 02/01
2	PAUD Al Falah	Swasta	Sukasari 16/08
3	TK/TPA Tsamrotul Fuad	Swasta	Gandapura 02/01
4	MDTA Miftahulhair	Swasta	Gandapura 01/01
5	SDN 1 Janggala	Negeri	Gandapura 02/01
6	TKA/TPA Asyifa	Swasta	Cinangsi 10/05
7	MDTA Asyifa	Swasta	Cinangsi 10/05
8	TKA/TPA Nurul Ihsan	Swasta	Cinangsi 09/05
9	TKA/TPA Al Ikhlas	Swasta	Sukamaju 12/06

10	MDTA Al Iklas	Swasta	Sukamaju 14/07
11	MIS Janggala 2	Swasta	Sukamaju 15/07
12	TKA/TPA Tyasirul Umur	Swasta	Sukasari 21/10
13	MDTA Nurul Huda	Swasta	Sukasari 16/08
14	MIS Janggala 1	Swasta	Karangtingal 24/12
15	MDTA Al Huda 1	Swasta	Karangtingal 23/11
16	MDTA Al Huda 2	Swasta	Karangtingal 22/11
17	PAUD Al Huda	Swasta	Karangtingal 24/12
18	TK/TPA Nurul Huda	Swasta	Sukalillah 27/13
19	MDTA Nurul Huda	Swasta	Sukalillah 27/13
20	SDN Janggala 2	Negeri	Sukalillah 29/14

*Sumber : Profil Desa Janggala 2023*

Berdasarkan table 4.5 terdapat 20 lembaga pendidikan yang tersebar di beberapa wilayah. Sebagian besar merupakan lembaga pendidikan swasta, dengan hanya dua lembaga yang dikelola oleh pemerintah sebagai sekolah negeri. Jenjang pendidikan yang tercakup cukup beragam, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Pendidikan Al-Quran (TPA), Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA), hingga Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN).

Lembaga-lembaga pendidikan ini tersebar di lokasi-lokasi seperti Gandapura, Sukasari, Cinangsi, Sukamaju, Karangtingal, dan Sukalillah.

**Tabel 4.6****Sarana dan Prasarana Olah Raga Desa Janggala**

No	Sarana olah raga	Jumlah
1	GOR	1
2	Lapangan bola volley	4
3	Lapangan sepak bola	3
4	Lapangan tenis meja	1

*Sumber: Profil Desa Janggala 2023*

Berdasarkan Tabel 4.6 terdapat beberapa sarana olahraga yang tersedia untuk mendukung aktivitas fisik dan olahraga masyarakat. Sarana olahraga yang cukup beragam, meliputi sarana untuk olahraga indoor maupun outdoor.

Pertama, terdapat satu buah Gedung Olahraga (GOR) yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis olahraga seperti bola basket, senam, bulu tangkis, futsal, dan lain-lain. Keberadaan GOR ini penting untuk mewadahi aktivitas olahraga terutama pada saat cuaca buruk atau saat dibutuhkan ruangan tertutup.

Selain GOR, terdapat pula beberapa sarana olahraga *outdoor*. Salah satunya adalah empat buah lapangan bola voli yang tersebar di lokasi yang berbeda. Lapangan bola voli merupakan sarana olahraga yang cukup populer dan banyak diminati masyarakat, baik untuk kegiatan olahraga rekreasi maupun kompetisi.

Untuk olahraga sepak bola, terdapat tiga buah lapangan sepak bola yang dapat digunakan oleh masyarakat. Lapangan sepak bola ini menjadi fasilitas

penting bagi para pecinta olahraga sepak bola, baik untuk bermain secara rekreasi maupun untuk menggelar pertandingan antar klub atau komunitas.

Terakhir, terdapat satu buah lapangan tenis meja yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang menyukai olahraga tenis meja. Meski jumlahnya hanya satu, namun keberadaan lapangan tenis meja ini tetap penting untuk mengakomodasi minat masyarakat terhadap olahraga tersebut.

#### **4.1.3 Karakteristik Informan Penelitian**

Untuk membahas mengenai permasalahan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan Informan sebagai sumber primer dalam penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 9 orang yang terdiri dari Pemerintah Desa sebanyak 1 orang, dan Perangkat Desa sebanyak 3 orang, kelompok pengelola program 3 orang dan juga masyarakat sebanyak 2 orang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan diperoleh beberapa karakteristik Informan dilihat dari segi jenis kelamin, umur, dan tingkat pendidikan. Berikut diuraikan pada bagian di bawah ini.

Karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Ketahanan Pangan di Desa Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis yang dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:



**Tabel 4.7**  
**Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi
1	Laki-Laki	2 Orang
2	Perempuan	7 Orang
	Jumlah	9 Orang

*Sumber: Hasil Penelitian, 2024.*

Dari tabel 4.7 di atas, menunjukkan bahwa informan dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki berjumlah 7 orang dan perempuan berjumlah 2 orang. Dalam penentuan informan bahwa dalam hal ini tidak terdapat perbedaan gender. Serta dalam mendukung proses wawancara yang dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan yang diharapkan dan mampu memenuhi kebutuhan dari peneliti.

Adapun karakteristik informan berdasarkan Umur dalam penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Karakteristik Informan Berdasarkan Umur**

No.	Umur	Frekuensi
1	25-35	3
2	36-45	4
3	46-55	2
4	>56	-
	Jumlah	9

*Sumber: Hasil Penelitian, 2024.*

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, terlihat bahwa karakteristik informan berdasarkan umur adalah bervariasi dari sisi umur. Dengan demikian, maka

informan tersebut memiliki pengetahuan dan pengalaman serta wawasan yang diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan sesuai dengan fakta mengenai Optimalisasi Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis.

Selanjutnya untuk karakteristik informan berdasarkan tingkat pendidikan dalam penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Karakteristik Informan berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi
1	SLTP	1 Orang
2	SLTA	6 Orang
3	S1	1 Orang
4	S2	1 Orang
	Jumlah	9 Orang

*Sumber: Hasil Penelitian 2023*

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, terlihat bahwa karakteristik dari informan berdasarkan tingkat pendidikan cukup memadai dengan adanya informan berdasarkan tingkat pendidikan tersebut di harapkan keterangan-keterangan yang disampaikan lebih objektif karena memiliki pemahaman dan wawasan yang luas mengenai pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ketahanan Pangan di Desa Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis.

#### **4.1.4 Dasar Hukum**

##### **4.1.4.1 Pemberdayaan Masyarakat**

Undang-undang tentang desa pasal 1 ayat (12) menyebutkan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi sangat penting karena bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat desa, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tidak hanya membawa sumber pendanaan pembangunan bagi desa, namun juga memberi cara pandang baru pada masyarakat untuk mentransformasi wajah desa melalui pemberdayaan masyarakat desa yang diharapkan mampu membawa perubahan nyata sehingga harkat dan martabat mereka diperhitungkan.

Penyelenggaraan dan pembangunan desa di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (12) ditunjukkan melalui pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku,

kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat desa.

#### **4.1.4.2 Dasar Hukum Ketahanan Pangan**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), perubahan Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), dan pertanggungjawaban Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) setiap tahun ditetapkan dengan Undang-undang.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 juga mengatur penggunaan dana tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tepatnya di pasal

5 ayat 4 (2) yaitu program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen).

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN dimana desa diwajibkan untuk menyelenggarakan program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen).

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program ketahanan Pangan di Desa Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis**

Pemberdayaan Masyarakat melalui program ketahanan pangan ini merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah desa dalam upaya memberdayakan masyarakat khususnya di bidang ekonomi adapun program ketahanan pangannya yaitu peternakan kambing etawa dan perkebunan buah naga yang di kelola oleh kelompok masyarakat. Program ketahanan pangan ini pemerintah desa mengalokasikan dari dana desa, kambing yang dibagikan sebanyak 26 ekor. Program ketahanan pangan ini diharapkan bisa menjadi modal untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ini perlu adanya upaya pokok untuk mencapai tujuan yang di inginkan, adapun menurut Mardikanto (2016:113-117) sebagai berikut :

1. Bina Manusia
2. Bina Usaha
3. Bina Lingkungan
4. Bina Kelembagaan

Untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di melalui program ketahanan pangan di Desa Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis, peneliti dalam hal ini melakukan observasi lapangan beserta wawancara terhadap pemerintah desa Janggala dan kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka peneliti melakukan wawancara yang telah di susun sebelumnya serta mengacu pada beberapa teori yang ada. Salah satunya teori yang dipakai adalah teori menurut Mardikanto (2017: 113-117), yang menjelaskan upaya pokok dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam mengkaji teori pemberdayaan ini adapun beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti guna untuk terselenggaranya tujuan yang di tentukan, kemudian berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan sebelumnya, maka dalam bagian ini akan di deskripsikan lebih jelas dan mendalam mengenai bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan di desa Janggala Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis, adalah sebagai berikut:

### **1. Bina Manusia**

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, definisi bina manusia lebih ditekankan kepada upaya meningkatkan kapasitas dan potensi manusia melalui pembangunan kapasitas (*capacity building*). Bina manusia dalam pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai serangkaian upaya terencana dan sistematis untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan individu maupun kelompok masyarakat agar mereka

dapat berdaya. Upaya bina manusia dalam pemberdayaan masyarakat dimulai dengan membantu mereka memahami potensi diri dan lingkungan sekitarnya. Melalui pemetaan potensi, masyarakat dibantu untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan yang ada di wilayah mereka. Pemahaman ini penting agar mereka dapat mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan yang sesungguhnya untuk kemudian dicarikan solusi yang tepat sasaran.

Setelah merumuskan masalah dan kebutuhan, masyarakat didampingi untuk merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan. Mereka diajak menyusun rencana aksi, membentuk kelompok kerja, serta melaksanakan program-program sesuai kebutuhan seperti penguatan ekonomi, perbaikan infrastruktur, pelestarian lingkungan dan sebagainya. Dalam prosesnya, fasilitator membimbing mereka untuk mampu mengakses dan mengelola sumber daya yang tersedia, baik yang berasal dari dalam maupun luar masyarakat.

Selanjutnya proses pemberdayaan ini bertujuan untuk memampukan masyarakat mengambil keputusan secara mandiri terkait pembangunan di wilayah mereka. Masyarakat dilatih untuk menganalisis situasi, menimbang pilihan, serta mengambil keputusan terbaik dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan kepentingan bersama. Pada akhirnya, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dengan kesadaran dan inisiatif sendiri dalam setiap upaya pembangunan di lingkungan mereka demi mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Bina manusia merupakan salah satu aspek penting dalam program pemberdayaan masyarakat. Aspek ini berfokus pada pengembangan kapasitas dan potensi individu dalam masyarakat tersebut. Melalui bina manusia, masyarakat diberikan pelatihan, pendidikan, dan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mengoptimalkan partisipasi mereka dalam program pemberdayaan. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki kemampuan yang cukup untuk mengelola sumber daya secara mandiri, mengidentifikasi masalah, dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi tantangan yang dihadapi.

Bina manusia merupakan aspek yang sangat penting dalam program pemberdayaan masyarakat karena tanpa adanya pengembangan kapasitas individu, masyarakat akan sulit untuk mengambil alih tanggung jawab dan mengelola sumber daya secara mandiri. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya berfokus pada penyediaan fasilitas atau infrastruktur, tetapi juga membutuhkan upaya untuk memberdayakan masyarakat dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Melalui bina manusia, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri mereka dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Hal ini akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program pemberdayaan, serta membantu mereka untuk menjadi lebih mandiri dan mampu mengatasi tantangan secara berkelanjutan.



Oleh karena itu, bina manusia merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari program pemberdayaan masyarakat yang efektif. Dengan mengembangkan kapasitas individu, masyarakat akan lebih siap dan mampu untuk mengambil kendali atas proses pemberdayaan dan mencapai kemandirian dalam jangka panjang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ketahanan Pangan Di Desa Janggala Kecamatan Cidolog pada dimensi Bina Manusia. Penulis akan menyajikan hasil wawancara dan observasi berdasarkan indikator-indikatornya.

**a) Terdapatnya pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan**

Pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan, merupakan aspek penting dalam meningkatkan kinerja dan kesuksesan individu maupun organisasi. Pengembangan kapasitas individu mencakup berbagai proses pembelajaran yang saling berkaitan, termasuk penyesuaian diri. pengembangan kapasitas individu juga melibatkan aspek kepribadian, seperti kemampuan menghadapi tantangan, bekerja dalam tim, dan penyesuaian diri di lingkungan kerja.

Aspek kepribadian memegang peranan penting dalam pengembangan kapasitas individu. Kemampuan menghadapi tantangan,

bekerja secara efektif dalam tim, serta penyesuaian diri di lingkungan kerja yang dinamis merupakan kualitas penting yang harus dimiliki. Individu yang mampu mengembangkan kepribadian yang tangguh, adaptif, dan proaktif akan lebih siap dalam menghadapi berbagai situasi dan perubahan. Pengembangan kapasitas individu juga melibatkan peningkatan keterampilan interpersonal, manajemen emosi, kreativitas, serta kemampuan memimpin dan mempengaruhi orang lain. Dengan menyinergikan pengembangan kepribadian dan kapabilitas teknis, individu akan lebih produktif, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi organisasi maupun lingkungan sekitarnya.

Kapasitas di dunia kerja mengacu pada kemampuan individu untuk memenuhi tuntutan dan tanggung jawab dalam lingkungan pekerjaan mereka. Ini melibatkan pengembangan keterampilan teknis, pengetahuan, dan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas pekerjaan dengan efektif. Pengembangan kapasitas di dunia kerja memungkinkan individu untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas kinerja mereka dalam pekerjaan yang diberikan.

Kapasitas di dunia kerja juga mencakup kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, menghadapi tantangan baru, dan terus belajar untuk mengikuti perkembangan tren dan teknologi dalam lingkungan kerja yang dinamis. Ini melibatkan pengembangan keterampilan seperti pemecahan masalah, pemikiran kritis, komunikasi efektif, kerja tim, dan manajemen waktu yang efisien. Dengan memiliki

kapasitas yang memadai di dunia kerja, individu dapat meningkatkan prospek karir mereka, menjadi lebih berharga bagi organisasi tempat mereka bekerja, dan berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Pengembangan keprofesionalan mengacu pada proses meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang diperlukan untuk menjadi profesional yang kompeten dalam bidang tertentu. Ini melibatkan pengembangan diri secara berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja untuk memastikan bahwa individu tetap up-to-date dengan praktik terbaik dan perkembangan terbaru dalam profesi mereka.

Pengembangan keprofesionalan juga melibatkan penguasaan kode etik dan standar perilaku yang diharapkan dalam profesi tertentu. Ini mencakup pengembangan integritas, tanggung jawab, disiplin diri, dan komitmen untuk memberikan layanan berkualitas tinggi kepada klien atau masyarakat. Melalui pengembangan keprofesionalan yang berkelanjutan, individu dapat meningkatkan kredibilitas, reputasi, dan kepercayaan dalam profesi mereka, serta berkontribusi pada peningkatan status dan penghargaan terhadap profesi tersebut secara keseluruhan.

Sebagaimana hasil wawancara terkait dengan pengembangan kapasitas individu yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan berikut ini adalah hasil wawancara yang telah peneliti lakukan:

Informan ke 1 Kepala Desa Janggala menjelaskan bahwa :

*“Pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan dilakukan terhadap kelompok pengelola dengan cara mengadakan sosialisasi terhadap program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini.”*

Informan ke 2 Kasi Perencanaan Desa Janggala mengatakan bahwa:

*“Pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan yaitu dengan di buatnya rencana pelatihan jangka pendek, menengah, panjang.”*

Kemudian Informan Ke 3 Kasi Kesejahteraan Desa Janggala mengatakan bahwa :

*“Pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan yaitu dengan melakukan studi banding”*

Selanjutnya Informan ke 4 Anggota Kelompok pengelola program mengatakan bahwa :

*“ dilakukannya pelatihan kepada kami langsung di tempat yang memang sudah menjadi fasilitas untuk mengelola program.”*

Sejalan dengan pendapat sebelumnya Informan ke 5 yaitu ketua kelompok tani mengatakan :

*“terdapatnya pelatihan dan pembekalan dan pernah ada juga pengarahan dari camat kecamatan cidolog terkait dengan pengelolaan program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini”*

Kemudian Informan Ke 6 Anggota Kelompok Tani mengatakan :

*“sudah adanya pelatihan sebagai upaya bina manusia namun tidak rutin pelatihannya, jadi kami kelompok pengelola selain mengandalkan fasilitas pelatihan juga dengan cara mempelajari melalui media sosial terkait pengelolaan itu”*

Informan Ke 7 Kepala Dusun Karangtingal mengatakan bahwa :

*“sudah ada pelatihan kepada kelompok terkait pengelolaan sebelum merealisasikan program”*

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa dalam aspek pengembangan kapasitas individu, terdapat upaya yang baik untuk meningkatkan kepribadian, kapasitas di dunia kerja, serta pengembangan keprofesionalan. Hal ini dapat dilihat dari adanya pembekalan dan pelatihan yang diberikan kepada kelompok sasaran. Kegiatan pembekalan dan pelatihan ini menjadi langkah penting dalam mempersiapkan individu untuk memiliki kepribadian yang kuat, keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan di dunia kerja, serta profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hambatan utama yang dihadapi dalam upaya pengembangan kapasitas adalah belum terealisasinya pelatihan rutin yang seharusnya diselenggarakan. Meskipun rencana pelatihan telah disusun, namun pelaksanaannya tidak berjalan secara rutin dan berkelanjutan.

Selain itu, informasi yang diperoleh juga menunjukkan bahwa terdapat rencana pelatihan jangka pendek, menengah, dan panjang yang telah disusun. Adanya rencana pelatihan yang terstruktur ini mencerminkan komitmen untuk melakukan pengembangan kapasitas individu secara berkelanjutan dan sistematis. Pelatihan jangka pendek mungkin berfokus pada keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan saat ini, sedangkan pelatihan jangka menengah dan panjang mempersiapkan individu untuk tantangan dan peluang di masa depan.

Dengan adanya rencana pelatihan yang komprehensif, diharapkan individu dapat terus meningkatkan kapasitas mereka sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dalam bidang masing-masing.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi bahwa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan di Desa Janggala belum optimal, meskipun telah ada rencana pelatihan jangka panjang, menengah, dan pendek dalam program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan, hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum optimal. Rencana pelatihan yang telah disusun tersebut belum dilaksanakan secara rutin dan konsisten. Hal ini mengakibatkan kelompok pengelola yang bertanggung jawab dalam menjalankan program tidak mendapatkan pelatihan dan pendampingan yang memadai secara berkelanjutan. Kondisi ini tentunya dapat menghambat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan.



**Gambar 4.2**  
**Pembekalan Kepada Kelompok Pengelola Program**

*Sumber: Data Penelitian 2024*

Berdasarkan gambar 4.3 dapat dijelaskan bahwa terdapat pembinaan oleh perangkat Desa Janggala dan Camat Kecamatan Cidolog

kepada kelompok sebagai bekal untuk pengelolaan peternakan kambing etawa. Sepertihanya hasil wawancara Informan ke 5 yaitu ketua kelompok tani yang mengatakan bahwa terdapatnya pelatihan dan pembekalan dan pernah ada juga pengarahan dari camat kecamatan cidolog terkait dengan pengelolaan program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini. Kegiatan pembinaan ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan di Desa Janggala Kecamatan Cidolog.

Kurangnya pelaksanaan pelatihan secara rutin seperti yang direncanakan menyebabkan kelompok pengelola mengalami kendala dalam proses pemeliharaan dan pengelolaan program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan. Tanpa pelatihan dan pendampingan yang memadai, kelompok pengelola mungkin kekurangan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan program secara efektif dan berkelanjutan. Hal ini dapat berdampak pada kualitas pelaksanaan program, partisipasi masyarakat, serta pencapaian tujuan program dalam mewujudkan ketahanan pangan di masyarakat.

Salah satu hambatan utama yang dihadapi dalam upaya pengembangan kapasitas adalah belum terealisasinya pelatihan rutin yang seharusnya diselenggarakan. Meskipun rencana pelatihan telah disusun, namun pelaksanaannya tidak berjalan secara rutin dan berkelanjutan.

Akibatnya, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh individu atau kelompok sasaran terkait pengelolaan program atau kegiatan belum optimal. Kurangnya pelatihan rutin ini dapat menghambat proses peningkatan kapasitas individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.

Tidak terealisasinya pelatihan rutin dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satu faktor yang mungkin menjadi kendala adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pelatihan. Selain itu, kesibukan tim atau sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan juga dapat menjadi faktor penghambat. Faktor lain yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya pelatihan rutin adalah adanya kendala teknis, seperti keterbatasan fasilitas atau infrastruktur pendukung. Berbagai faktor ini perlu diidentifikasi dan diatasi agar pelatihan rutin dapat diselenggarakan secara teratur dan efektif dalam mendukung pengembangan kapasitas individu atau kelompok sasaran.

Upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan yaitu penyelenggaraan pelatihan yang dilakukan untuk mengatasi kebutuhan yang mendesak. Selain itu Memanfaatkan sumber belajar mandiri juga menjadi salah satu upaya dalam mengatasi hambatan, para pengelola didorong untuk memanfaatkan sumber belajar mandiri seperti buku, *platform online* untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka.



Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengembangkan kapasitas individu yang mencakup aspek kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan, diperlukan pelatihan dan pendampingan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Pelatihan dan pendampingan yang bersifat insidental atau sekali waktu saja tidak akan cukup efektif dalam membangun dan mempertahankan kapasitas individu secara optimal.

Hal ini sejalan dengan Mardikanto (2017:70) yang menyebutkan bahwa pengembangan kapasitas individu adalah segala upaya untuk memperbaiki atau mengembangkan mutu karakteristik pribadi agar lebih efektif dan efisien, baik di dalam entitasnya maupun dalam lingkup global.

Melalui pelatihan dan pendampingan rutin, individu dapat terus memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan perkembangan terkini di bidangnya. Dengan rutinitas tersebut, proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan kapasitas individu dapat terasah secara berkelanjutan. Pelatihan dan pendampingan rutin memungkinkan individu untuk selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan perkembangan terbaru di bidang mereka. Ini penting agar individu tetap relevan dan kompeten dalam bidang mereka masing-masing.

Selain itu, pembinaan yang rutin juga memungkinkan adanya umpan balik, evaluasi, dan penyesuaian program pengembangan kapasitas sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap individu. Pendampingan yang rutin memberikan kesempatan untuk mendapatkan umpan balik, evaluasi,

dan penyesuaian program pengembangan kapasitas sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap individu. Ini memastikan bahwa program pengembangan kapasitas yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan unik yang dihadapi oleh setiap individu.

Dengan rutinitas tersebut, proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan kapasitas individu dapat terasah secara berkelanjutan. Rutinitas pelatihan dan pendampingan membuat proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan memungkinkan kapasitas individu untuk terus diasah secara berkelanjutan. Ini menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan mendorong pertumbuhan dan peningkatan terus-menerus dalam pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi individu. Latihan yang *kontinue* juga dapat memastikan bahwa individu selalu *up-to-date* dengan pengetahuan dan keterampilan terbaru, mampu beradaptasi dengan perubahan, terus meningkatkan kapasitas mereka, serta mendapatkan pendampingan yang diperlukan untuk pengembangan diri yang berkelanjutan.

Praktik pelatihan dan pendampingan rutin juga membantu individu membangun kemampuan adaptasi, menghadapi tantangan, dan mengembangkan keprofesionalan dalam jangka panjang. Aspek kepribadian seperti manajemen stres, kerja sama tim, dan kepemimpinan dapat dibentuk secara bertahap melalui program pengembangan kapasitas yang terstruktur dan berkesinambungan.

Selanjutnya jika tidak adanya pelatihan dan pendampingan rutin menyebabkan individu tertinggal dalam pengetahuan dan keterampilan, menurunkan kinerja, kurangnya evaluasi, ketidaksesuaian program pengembangan, kurangnya pelatihan dan pendampingan rutin juga dapat membawa konsekuensi negatif bagi kelompok pengelola. Kelompok pengelola mungkin tertinggal dalam pengetahuan dan keterampilan, mengalami penurunan kinerja, hal ini dapat menyebabkan motivasi rendah, dan budaya kerja yang negatif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Desa Janggala untuk memperhatikan dalam pelatihan dan pendampingan rutin untuk kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan . Dengan menyediakan program yang ditargetkan, menggunakan berbagai metode pelatihan, dan menciptakan budaya belajar, pemerintah Desa Janggala dapat membantu kelompok pengelola mencapai potensi penuh mereka dan meningkatkan kinerja dalam proses pengelolaan secara keseluruhan.

Dengan demikian, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan kapasitas individu, yang mencakup pengembangan kepribadian, peningkatan kapasitas di dunia kerja, serta pengembangan keprofesionalan dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Janggala belum optimal belum sepenuhnya sejalan dengan teori yang ada. Karena belum terealisasinya pelatihan rutin terhadap kelompok pengelola program, yang mana seharusnya proses pengembangan kapasitas ini membutuhkan pelatihan dan pendampingan yang rutin dan berkesinambungan. Melalui

program yang terstruktur dan berkelanjutan, sehingga kelompok pengelola dapat terus mengasah kepribadian, meningkatkan kompetensi, serta mengembangkan profesionalismenya sehingga kelompok pengelola menjadi Individu dengan kapasitas yang mumpuni, baik dari aspek kepribadian, kapasitas di dunia kerja, maupun pengembangan ke profesionalan, dan akan mampu memberikan kontribusi yang optimal, serta meraih kesuksesan dan keberlanjutan karier di lingkungan kerjanya

**b) Terdapatnya Pengembangan Kapasitas entitas kelembagaan**

Pengembangan kapasitas entitas kelembagaan merupakan langkah krusial dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas lembaga tersebut. Dengan fokus pada pengembangan kapasitas, entitas kelembagaan dapat memperkuat kemampuan internalnya, meningkatkan keterampilan anggota, dan memperluas cakupan pelayanan yang diberikan. Hal ini menjadi pondasi yang kokoh untuk mencapai tujuan organisasi serta memberikan dampak positif dalam menjawab tuntutan zaman yang terus berkembang.

Sebagaimana hasil wawancara terkait dengan pengembangan kapasitas entitas kelembagaan, berikut ini adalah hasil wawancara yang telah peneliti lakukan:

Informan ke 1 kepala desa Mengatakan :

*“dengan adanya pelatihan dan pendampingan terhadap kelompok pengelola program perdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan baik kelompok pengelola ternak kambing etawa maupun kelompok tani yang mengelola perkebunan buah naga”*

Informan ke 2 kasi perencanaan mengatakan :

*“dibuatnya strategi pengembangan kapasitas entitas kelembagaan jangka panjang yang terintegrasi dengan program-program lain di desa.*

Informan Ke 3 Kasi Kesejahteraan Mengatakan :

*“memfasilitasi tenaga ahli dalam pelatihan atau penyampaian standar operasional prosedur (SOP) contohnya tenaga ahli kesehatan bidang peternakan”*

Informan ke 4 anggota kelompok pengelola mengatakan bahwa :

*“pernah mengikuti pelatihan dan pengarahan sebagai pembekalan sebelum terlaksananya program.”*

Informan ke 5 ketua kelompok tani mengatakan :

*“melakukan kolaborasi dan berbagi pengetahuan maupun pengalaman atau dilakukannya studi banding dengan entitas lain.”*

Informan ke 6 anggota kelompok tani mengatakan :

*“dengan memanfaatkan penggunaan media sebagai salah satu upaya media pembelajaran dalam pengelolaan program pemberdayaan masyarakat ini”*

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa dalam aspek pengembangan kapasitas entitas kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Ketahanan Pangan di Desa Janggala, Kecamatan Cidolog telah berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat dari komitmen yang ditunjukkan oleh pihak-pihak terkait dalam upaya mengembangkan kapasitas entitas kelembagaan yang menjalankan program tersebut. Kapasitas entitas kelembagaan menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, terutama dalam hal ketahanan pangan.

Komitmen dalam mengembangkan kapasitas entitas kelembagaan ini dapat diwujudkan melalui berbagai upaya, seperti pelatihan, pendampingan, penyediaan sumber daya yang memadai, serta pembentukan struktur organisasi yang jelas dan efektif. Pelatihan dan pendampingan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi anggota entitas kelembagaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sementara itu, penyediaan sumber daya seperti anggaran, fasilitas, dan infrastruktur yang memadai akan mendukung kinerja entitas kelembagaan secara optimal. Selain itu, struktur organisasi yang jelas dan efektif akan memastikan pembagian peran dan tanggung jawab yang terkoordinasi dengan baik dalam pengelolaan program.

Berdasarkan hasil observasi, program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan di Desa Janggala tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga dirancang untuk memperkuat mutu entitas dan kelembagaan di desa. Hal ini terlihat dari beberapa upaya yang dilakukan, seperti:

- a) Pelatihan dan pendampingan: Kelompok pengelola program mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas mereka dalam mengelola program dan mengembangkan usaha.
- b) Kolaborasi: Program ini mendorong kolaborasi antara berbagai pihak di desa, seperti pemerintah desa, kelompok tani, Kolaborasi ini membantu meningkatkan sinergi dan efektivitas program.

- c) Fasilitasi tenaga ahli: Tenaga ahli di bidang, peternakan, dan pengelolaan program difasilitasi untuk memberikan bimbingan dan pendampingan kepada kelompok pengelola program.
- d) Pembekalan: Kelompok pengelola program mendapatkan pembekalan materi dan alat-alat yang diperlukan untuk menjalankan program.
- e) Pemanfaatan media pembelajaran: Media pembelajaran, media sosial digunakan untuk meningkatkan pemahaman kelompok pengelola program.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Ketahanan Pangan di Desa Janggala telah menunjukkan hasil yang optimal dalam mengembangkan kapasitas entitas kelembagaan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa temuan, di antaranya:

Komitmen yang kuat terlihat dari upaya-upaya yang dilakukan, seperti pelatihan, pendampingan, kolaborasi, fasilitasi tenaga ahli, pembekalan, dan pemanfaatan media pembelajaran. Kelompok pengelola program mendapatkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pendampingan dalam mengelola program dan mengembangkan usaha. Program ini juga mendorong penguatan sinergi dan efektivitas dengan terjalinnya kolaborasi antara berbagai pihak di desa.

Lebih lanjut, adanya tenaga ahli di bidang pertanian, peternakan, dan program pengelolaan yang memberikan bimbingan dan pendampingan

kepada kelompok pengelola program turut memberikan kontribusi positif. Kelompok pengelola juga mendapatkan pembekalan materi dan alat-alat yang diperlukan untuk menjalankan program dengan baik. Terakhir, pemanfaatan media pembelajaran dan media sosial membantu meningkatkan pemahaman kelompok pengelola program terhadap pengelolaan dan pengembangan program secara berkelanjutan.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pengembangan kapasitas entitas kelembagaan yaitu kurangnya tenaga ahli yang kompeten. Tenaga ahli yang kompeten sangat diperlukan dalam merancang dan melaksanakan program pengembangan kapasitas. Kurangnya tenaga ahli yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dapat menghambat proses pengembangan entitas kelembagaan, bahkan dapat mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi dalam mengatasi hambatan ini, seperti melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang ada.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan kurangnya tenaga ahli yang kompeten dalam pengembangan kapasitas entitas kelembagaan, yaitu pemerintah desa telah mengembangkan program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi para kelompok pengelola yang sudah ada, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas mereka sesuai dengan kebutuhan entitas kelembagaan. Dengan demikian, entitas kelembagaan dapat mengatasi permasalahan kurangnya tenaga ahli yang kompeten dan memperkuat kapasitas kelembagaannya.



Berdasarkan hasil observasi penelitian, terlihat bahwa Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Ketahanan Pangan di Desa Janggala telah berhasil mengembangkan kapasitas entitas kelembagaan yang mengelola program tersebut. Hal ini sejalan dengan konsep pengembangan kapasitas yang menekankan pada peningkatan kemampuan individu, kelompok, organisasi, atau sistem untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan berkelanjutan.

Temuan-temuan dalam penelitian, seperti adanya komitmen yang kuat, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, penguatan sinergi dan efektivitas, bimbingan dan pendampingan, pembekalan materi dan alat, serta peningkatan pemahaman, sangat relevan dengan pendekatan pengembangan kapasitas yang dikemukakan oleh para ahli.

Menurut Mardikanto (2017 : 72), pengembangan kapasitas entitas lebih ditekankan pada pengembangan bersama entitas itu sendiri. Dalam konteks ini, entitas kelembagaan pengelola program di Desa Janggala telah mengalami peningkatan kualitas melalui berbagai upaya pengembangan kapasitas yang dilakukan, seperti pelatihan, pendampingan, kolaborasi, dan fasilitasi tenaga ahli.

Selain itu, temuan penelitian ini juga selaras dengan pengembangan kapasitas yang dikemukakan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) dalam Nugraha, ND (2004) yang mengartikan pengembangan kapasitas (*Capacity Building*) sebagai kemampuan individu, kelompok, organisasi, institusi dan masyarakat

untuk melaksanakan fungsi mereka, termasuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan-tujuan mereka. Menurut UNDP (UNDP) dalam Nugraha, ND (2004) Pada tingkatan organisasi atau institusi, masalah yang dijadikan ukuran adalah dukungan aspek-aspek yang ada dalam organisasi dalam menyanggah kapasitas organisasi tersebut.

Maka dari itu Program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan di Desa Janggala entitas kelembagaan pengelola mengalami peningkatan kapasitas dalam menjalankan fungsinya, menyelesaikan masalah, dan mencapai tujuan program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan, sesuai dengan konsep pengembangan kapasitas yang dikemukakan oleh UNDP. Dengan demikian, temuan penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dengan teori-teori pengembangan kapasitas yang ada. Upaya-upaya yang dilakukan dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Janggala telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan pendekatan yang direkomendasikan dalam pengembangan kapasitas entitas kelembagaan.

### **c) Terdapatnya Pengembangan Kapasitas Sistem**

Dalam konteks bina manusia, Pengembangan kapasitas sistem merupakan upaya sistematis dan terencana untuk meningkatkan kemampuan sistem pendukung yang ada dalam program pemberdayaan masyarakat. Sistem ini mencakup berbagai komponen seperti sumber daya manusia, infrastruktur, kebijakan, proses, dan mekanisme yang mendukung pelaksanaan program. Dengan mengembangkan kapasitas

sistem, kita memperkuat fondasi dan kerangka kerja yang diperlukan untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat.

Pengembangan kapasitas sistem dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya upaya sesaat. Proses ini melibatkan identifikasi kekuatan dan kelemahan sistem saat ini, serta perencanaan dan implementasi strategi untuk memperkuat komponen-komponen yang masih lemah. Pendekatan ini dapat mencakup pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur, peninjauan dan penyempurnaan kebijakan, serta optimalisasi proses dan mekanisme kerja. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pendukung memiliki kapasitas yang memadai untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.

Dengan memperkuat kapasitas sistem dapat meningkatkan peluang keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dan memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Sistem yang kuat dan andal akan memungkinkan program berjalan lebih efisien, memberikan layanan yang lebih berkualitas, dan mencapai dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas sistem merupakan investasi penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, memastikan bahwa upaya tersebut tidak hanya terjadi dalam waktu singkat, tetapi dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Untuk mengetahui bagaimana upaya pengembangan kapasitas sistem pada pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan berikut ini adalah hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan 7 informan:

Informan ke 1 kepala desa Mengatakan :

*“ya sudah terdapatnya upaya pengembangan kapasitas sistem pada program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan ini yaitu dengan dilakukannya pelatihan dan edukasi bagi kelompok pengelola program untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bidang peternakan, pertanian, dan pengelolaan program”*

Informan ke 2 Kasi Perencanaan mengatakan bahwa :

*“upaya pengembangan kapasitas sistem pada program ini pemerintah desa telah menyediakan fasilitas pendukung pada program ini “*

Informan ke 3 Kasi Kesejahteraan mengatakan bahwa :

*“pengembangan kapasitas sistem yang sudah di laksanakan yaitu adanya pembekalan mengenai pengelolaan kepada kelompok pengelola program”*

Informan ke 4 Anggota Kelompok pengelola mengatakan bahwa :

*“ya kami sudah menerima pembekalan terkait pengelolaan program”*

Informan ke 5 Ketua Kelompok Tani mengatakan :

*“upaya kami dalam mengembangkan kapasitas sistem yaitu dengan memaksimalkan kinerja dalam pengelolaan”*

Informan Ke 6 Anggota Kelompok Tani Mengatakan :

*“ya pemerintah desa telah memberikan pembinaan terkait pengelolaan program”*

Informan ke 7 Kepala Dusun Karang Tingal mengatakan bahwa :

*“pembinaan telah di lakukan kepada kelompok oleh pemerintah desa sebelum program berjalan”*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat diketahui bahwa upaya pengembangan kapasitas sistem pada program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan di Desa Janggala telah dilaksanakan dengan optimal. Hal ini terlihat dari berbagai inisiatif yang telah diambil dalam rangka meningkatkan kapasitas sistem pengelolaan program tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyelenggaraan pelatihan dan edukasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan program. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif.

Selain pelatihan dan edukasi, upaya lain yang telah dilakukan adalah penyediaan fasilitas pendukung yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program. Fasilitas ini dapat berupa infrastruktur, peralatan, atau sumber daya lainnya yang dibutuhkan. Adanya fasilitas pendukung yang memadai akan memaksimalkan kinerja pengelolaan program. Upaya lain yang dilakukan adalah pembinaan secara berkelanjutan terhadap pihak-pihak yang terlibat, serta upaya untuk memaksimalkan kinerja pengelolaan melalui evaluasi, monitoring, dan perbaikan yang diperlukan. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan kapasitas sistem pengelolaan program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan di Desa Janggala dapat terus ditingkatkan secara optimal.

Upaya pengembangan kapasitas sistem pada program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan di desa Janggala

telah dilakukan dengan optimal. Hal ini terlihat dari adanya pelatihan dan edukasi yang diberikan kepada kelompok pengelola. Pelatihan dan edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola sumber daya pangan secara berkelanjutan. Melalui pelatihan ini, kelompok pengelola program diajarkan tentang tatacara pengelolaan program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan baik di bidang peternakan kambing etawa maupun perkebunan buah naga, kelompok pengelola juga diajarkan tentang strategi pemasaran produk pertanian. Selain pelatihan dan edukasi, upaya pengembangan kapasitas sistem juga dilakukan melalui penyediaan fasilitas pendukung, pembinaan, dan upaya memaksimalkan kinerja pengelolaan. Pemerintah desa Janggala telah menyediakan fasilitas pendukung lainnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi mengenai upaya pengembangan kapasitas sistem pada program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan di Desa Janggala telah dilakukan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan beberapa langkah yang telah diambil berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti seperti:

- a) Pelatihan dan edukasi yaitu kelompok pengelola program telah mendapatkan pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan program. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan yang memadai untuk melaksanakan program secara efektif.

- b) Penyediaan fasilitas pendukung yaitu pemerintah desa telah menyediakan fasilitas pendukung yang diperlukan untuk kelancaran program, yang mana Fasilitas ini membantu kelompok pengelola program untuk menjalankan program dengan lebih efisien dan produktif.
- c) Memaksimalkan kinerja pengelolaan yaitu kelompok pengelola program menunjukkan komitmen yang tinggi untuk memaksimalkan kinerja pengelolaan program. Hal ini terlihat dari upaya mereka untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi, dalam menjalankan program.

Pada program pemberdayaan Masyarakat melalui ketahanan pangan di Desa Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis, tidak ada indikasi hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan Upaya pengembangan kapasitas sistem. Hal ini dapat terlihat dari berbagai upaya pengembangan kapasitas sistem telah dilakukan, meliputi pelatihan, edukasi, penyediaan fasilitas pendukung, pembekalan, dan pelatihan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dipaparkan, terlihat bahwa upaya pengembangan kapasitas sistem pada program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan di Desa Janggala telah dilaksanakan dengan optimal. Hal ini sejalan dengan teori pengembangan kapasitas sistem yang dikemukakan oleh Mardikanto (2017 :114), bina masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk penguatan

atau pengembangan kapasitas point ke 3 (tiga) yaitu pengembangan kapasitas sistem.

Dalam teori yang dikemukakan oleh Mardikanto (2017), pengembangan kapasitas sistem merupakan salah satu upaya penting dalam penguatan atau pengembangan kapasitas masyarakat. Hasil penelitian di Desa Janggala menunjukkan adanya kesesuaian dengan teori tersebut. Upaya yang dilakukan seperti pelatihan dan edukasi, penyediaan fasilitas pendukung, pembinaan, dan upaya memaksimalkan kinerja pengelolaan merupakan bentuk nyata dari pengembangan kapasitas sistem dalam program pemberdayaan masyarakat. Melalui pelatihan dan edukasi, kapasitas kelompok pengelola program ditingkatkan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola program secara efektif.

Selanjutnya, penyediaan fasilitas pendukung serta pembinaan juga merupakan aspek penting dalam pengembangan kapasitas sistem seperti yang ditekankan dalam teori Mardikanto (2017). Fasilitas pendukung memungkinkan kelompok pengelola untuk melaksanakan program dengan lebih baik, sementara pembinaan membantu mereka dalam mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi yang tepat. Upaya memaksimalkan kinerja pengelolaan juga sejalan dengan teori, yang menekankan pentingnya evaluasi, monitoring, dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan program. Dengan melibatkan kelompok pengelola



secara aktif dalam proses ini, kapasitas sistem dapat terus ditingkatkan dan program dapat berjalan dengan optimal.

Dengan demikian, hasil penelitian mengenai pengembangan kapasitas sistem pada dimensi bina manusia program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan menunjukkan relevansi yang kuat dengan teori pengembangan kapasitas sistem yang dikemukakan oleh Mardikanto (2017). Upaya yang dilakukan dalam program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan di desa tersebut mencerminkan penerapan prinsip-prinsip pengembangan kapasitas sistem secara baik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat peneliti simpulkan bahwa program Pemberdayaan Masyarakat melalui Ketahanan Pangan di Desa Janggala dalam aspek bina manusia belum optimal karena dari ke 3 (tiga ) indikator terdapat 1 (satu) indikator yang belum optimal yaitu pada indikator pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan masih belum terealisasinya pelatihan rutin terhadap kelompok pengelola program, yang mana seharusnya proses pengembangan kapasitas ini membutuhkan pelatihan dan pendampingan yang rutin dan berkesinambungan. Terealisasinya pelatihan rutin yang diberikan kepada kelompok pengelola ternak kambing etawa dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam aspek-aspek seperti manajemen pemeliharaan ternak, perkandangan, kesehatan hewan, pakan ternak, reproduksi ternak, dan

lain-lain. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, mereka dapat mengelola usaha peternakan kambing etawa dengan lebih baik.

Namun untuk 2 (dua) indikator lainnya sudah menunjukkan upaya yang optimal yaitu pada upaya pengembangan kapasitas entitas kelembagaan dengan adanya komitmen pemerintah desa dalam mengembangkan kapasitas entitas kelembagaan, seperti pelatihan dan pendampingan, pembuatan strategi pengembangan kapasitas entitas kelembagaan dengan Pemanfaatan media pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman kelompok pengelola program. Dan pada Upaya pengembangan kapasitas sistem telah dilakukan secara optimal, seperti pelatihan dan edukasi, penyediaan fasilitas pendukung, pembinaan, dan upaya memaksimalkan kinerja pengelolaan. Kelompok pengelola program menunjukkan komitmen yang tinggi untuk memaksimalkan kinerja pengelolaan program.

## 2. **Bina Usaha**

Dalam konteks program pemberdayaan masyarakat, bina usaha mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Ini melibatkan pemilihan komoditas dan jenis usaha, studi kelayakan, perencanaan bisnis, pembentukan badan usaha, perencanaan investasi, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengembangan karir. Bina usaha juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dengan cara penumbuhan usaha mikro dan kecil, serta memperkuat kemitraan dalam pengembangan usaha.

Selain itu, bina usaha juga merupakan bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan pengeluaran, dan meningkatkan pendapatan ekonomi. Program pemberdayaan ini diarahkan untuk memperkuat keterampilan usaha, pengelolaan bisnis skala kecil, akses terhadap teknologi, modal, pasar, dan informasi pembangunan. Melalui bina usaha, masyarakat diberdayakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik secara mandiri dan berkelanjutan.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, bina usaha juga merupakan bagian dari strategi yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, lingkungan, dan usaha. Ini dilaksanakan melalui pelibatan stakeholder kunci secara partisipatoris. Strategi bina usaha ini mencakup peningkatan keterampilan usaha, pengelolaan bisnis skala kecil, pengusaha teknologi, akses terhadap teknologi, modal, pasar, informasi pembangunan, kemitraan mutualistis, sistem insentif administrasi, pendanaan formal dan informal, serta peraturan perundangan yang mendukung proses pengentasan kemiskinan.

Untuk mengetahui hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ketahanan Pangan Di Desa Janggala Kecamatan Cidolog pada dimensi Bina Usaha Penulis akan menyajikan hasil wawancara dan observasi berdasarkan indikator-indikatornya.

#### **a) Terdapatnya Pembentukan Badan Usaha**

Badan usaha adalah organisasi atau kesatuan yang didirikan dan dioperasikan untuk menjalankan kegiatan ekonomi dan mencari keuntungan. Badan usaha memiliki peran penting dalam perekonomian, baik bagi pemilik usaha, masyarakat, maupun negara.

Pembentukan badan usaha dalam program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama, masyarakat diberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola usaha, seperti manajemen keuangan, pemasaran, dan produksi (Mardikanto, 2017). Selanjutnya, masyarakat didorong untuk mengidentifikasi peluang usaha yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal dan kebutuhan pasar. Setelah itu, mereka diberikan bantuan modal awal, baik berupa dana maupun peralatan, untuk memulai usaha (Suharto, 2014).

Sebagaimana hasil wawancara terkait dengan terdapatnya pembentukan badan usaha penulis sajikan hasil wawancara dengan informan dalam penelitian ini terdiri dari 6 informan :

Informan ke 1 Kepala Desa mengatakan bahwa :

*“tidak ada badan usaha yang secara spesifik untuk penjualan hasil dari program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan jadi hasil dari program itu di satukan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang memang sudah ada sebelum adanya program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini”*

Informan Ke 2 Kasi Perencanaan mengatakan :

*“Untuk pembentukan badan usaha sebelumnya akan di buat badan usaha yang secara khusus untuk memasarkan hasil dari program ini namun dilihat dari keefektifan nya lebih baik di satukan karena hasil dari program ini juga merupakan salah satu pendapatan asli desa.”*

Informan ke 3 Kasi Kesejahteraan mengatakan

*“Diupayakan perluasan jaringan dan kerja sama dengan pihak lain, seperti supermarket, toko, untuk memperluas jangkauan pasar hasil dari program pemberdayaan Masyarakat ini .”*

Informan ke 4 Anggota Kelompok Pengelola program mengatakan :

*“Pemasaran mengenai produk hasil dari program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini selain di serahkan ke bumdes ada juga yang di pasarkan langsung oleh kelompok pengelola”*

Informan ke 5 Ketua Kelompok Tani Mengatakan :

*“penjualan hasil dari program pernah diikuti sertakan dalam acara bazar seperti yang sudah di laksanakan yaitu pada bazar acara HUT RI yang ke 78”*

Informan Ke 6 Anggota Kelompok Tani mengatakan :

*“ Dengan memanfaatkan media yang ada seperti WhatsApp, Facebook itu juga membantu untuk memasarkan hasil produk ke masyarakat, dan juga sebagai ajang untuk memberitahu karena tidak semua masyarakat mengetahui mengenai program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini“*

Berdasarkan informasi yang diperoleh hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa ditinjau dari aspek terdapatnya pembentukan badan usaha pada program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan di Desa Janggala telah mempertimbangkan pembentukan badan usaha untuk memasarkan hasil program. Meskipun awalnya direncanakan untuk membentuk badan usaha khusus, keputusan untuk menggabungkannya dengan BUMDes yang sudah ada untuk meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan pendapatan asli desa. Pada awalnya terdapat rencana untuk membentuk badan usaha khusus dalam rangka memasarkan hasil

program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan. Namun, setelah pertimbangan lebih lanjut, keputusan yang diambil adalah untuk menggabungkan badan usaha baru tersebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah ada di Desa Janggala.

Seperti halnya berdasarkan hasil wawancara yang dikatakan oleh informan ke 2 yaitu kasi perencanaan yang mengatakan bahwa untuk pembentukan badan usaha sebelumnya akan di buat badan usaha yang secara khusus untuk memasarkan hasil dari program ini namun dilihat dari keefektifannya lebih baik di satukan karena hasil dari program ini juga merupakan salah satu pendapatan asli desa. Penggabungan dengan BUMDes dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan pendapatan asli desa.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi terkait dengan terdapatnya pembentukan badan usaha pada program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan ini sudah optimal hal ini dibuktikan dengan menggabungkannya dengan BUMDes. Kelompok pengelola juga berperan aktif dalam memasarkan hasil produk secara langsung dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Pemanfaatan media sosial juga menjadi strategi yang cukup baik untuk menjangkau masyarakat dan mempromosikan program produk.

Hambatan yang dihadapi dalam upaya pembentukan badan usaha yaitu kurangnya keahlian dalam merancang dan menjalankan strategi pemasaran yang efektif. Serta Keterbatasan akses akibat jarak yang jauh

Lokasi yang sulit dijangkau oleh konsumen atau kurang strategis dapat membatasi potensi pertumbuhan bisnis. Sumber Daya Manusia atau kelompok pengelola yang kurang memiliki pemahaman mendalam tentang pasar, perilaku konsumen, dan teknik pemasaran modern dapat menghambat badan usaha untuk mencapai tujuan pemasaran yang diinginkan.

Upaya telah dilakukan salah satunya adalah dengan meningkatkan keahlian dalam merancang dan menjalankan strategi pemasaran yang efektif. Pelatihan dan pendidikan tentang pasar, perilaku konsumen, dan teknik pemasaran modern dapat membantu Sumber Daya Manusia atau kelompok pengelola untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan keterampilan yang diperlukan dalam mencapai tujuan pemasaran yang diinginkan.

Selain itu, untuk mengatasi keterbatasan akses akibat jarak yang jauh, Pemerintah desa Janggala telah melakukan evaluasi terhadap lokasi mereka. Dengan mempertimbangkan aksesibilitas, daya tarik lokasi, dan potensi sumber daya alam yang ada, pemerintah Desa dan Kelompok pengelola program pemberdayaan Masyarakat melakukan penyesuaian lainnya untuk memperbaiki aksesibilitas. Dengan upaya-upaya ini, diharapkan badan usaha dapat mengatasi hambatan yang dihadapi dan meningkatkan kinerja pemasaran serta aksesibilitas lokasi mereka, sehingga dapat mencapai pertumbuhan dan kesuksesan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi Bina Usaha dapat disimpulkan bahwa Pembentukan badan usaha dalam program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan di Desa Janggala merupakan langkah strategis yang sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Habib (2021:107-108) yang menyebutkan bahwa salah satu bentuk nyata pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan adalah dengan pembentukan BUMDesa. BUMDesa merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat setempat. Tujuan pembentukan BUM Desa ini adalah untuk memperkuat perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.



**Gambar 4.3**  
**Pemasaran Susu Kambing Etawa**

*Sumber: Data Penelitian 2024*

Berdasarkan gambar 4.3 dapat dijelaskan bahwa terdapat upaya pemasaran produk hasil dari program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan bidang peternakan, yaitu susu kambing etawa. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa susu kambing etawa dijual dalam sebuah pameran yang diselenggarakan dalam rangka Peringatan Hari Ulang



Tahun Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan ke 5 yaitu ketua kelompok tani yang mengatakan bahwa penjualan hasil dari program pernah diikuti sertakan dalam acara bazar seperti yang sudah di laksanakan yaitu pada bazar acara HUT RI yang ke 78. Upaya pemasaran ini menunjukkan adanya strategi untuk memperkenalkan dan mempromosikan hasil program pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat, sekaligus memanfaatkan moment perayaan nasional sebagai sarana untuk meningkatkan penjualan produk.

Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan bahwa dalam indikator terdapatnya pembentukan badan usaha dalam program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan telah optimal. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya penggabungan badan usaha ke dalam BUMDes yang sudah ada dan juga terdapatnya bukti nyata pemasaran produk hasil dari program pemberdayaan masyarakat seperti halnya tercantum pada gambar 4.3, hal tersebut penting untuk memastikan keberlanjutan program dan mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara maksimal. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) bertindak sebagai lembaga ekonomi desa yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan desa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Keuangan dan akuntabilitas BUMDes sangat penting dalam membangun keberlanjutan ekonomi desa. BUMDes perlu memiliki sistem keuangan yang baik dan akuntabilitas yang tinggi untuk mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa secara maksimal. Selain itu, penggabungan badan usaha ke dalam BUMDes juga dapat membantu dalam mengoptimalkan potensi desa untuk kesejahteraan bersama, melalui pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya ekonomi desa secara mandiri.

Dari hasil penelitian, pengembangan BUMDes telah terbukti memberikan manfaat yang dirasakan oleh warga desa, seperti pemberdayaan potensi yang ada, peningkatan produk, kesejahteraan masyarakat, serta kontribusi terhadap pembangunan dan dampak langsung terhadap ekonomi dan budaya masyarakat. Dengan demikian, penggabungan badan usaha ke dalam BUMDes merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan sumber daya desa, dan mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara maksimal.

**b) Terdapatnya pengembangan sarana dan prasarana pendukung**

Pengembangan sarana dan prasarana yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan merupakan investasi penting untuk mencapai kemajuan di berbagai sektor kehidupan. Dengan membangun sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan

mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Upaya pengembangan sarana dan prasarana perlu dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat itu sendiri.

Sebagaimana hasil wawancara terkait dengan terdapatnya pengembangan sarana dan prasarana penulis sajikan hasil wawancara dengan informan dalam penelitian ini terdiri dari 6 informan

Informan ke 1 kepala desa mengatakan bahwa :

*“memberikan dana anggaran untuk sarana dan prasarana”*

Informan ke 2 kasi perencanaan mengatakan bahwa :

*“memfasilitasi kandang yang cukup baik dan ada juga tempat bagi kelompok pengelola”*

Informan ke 3 kasi kesejahteraan mengatakan bahwa :

*“memilih tenaga kerja yang memang memahami terhadap pemeliharaan program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini yaitu peternakan kambing etawa dan perkebunan buah naga”*

Informan ke 4 anggota kelompok pengelola :

*“adanya sumur bor dan air yang berkualitas di sekitar tempat program pemberdayaan masyarakat agar memudahkan juga pengelola dalam memberikan minum kepada ternak kambing etawa”*

Informan ke 5 ketua Kelompok pengelola mengatakan :

*“sudah adanya penerangan berupa lampu merkuri di sekretariat pengelolaan program pemberdayaan masyarakat”*

Informan ke 6 anggota kelompok pengelola mengatakan bahwa :

*“terdapatnya sekretariat program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan dan tempat itu lumayan luas di dalamnya”*

*terdapat kamar, kamar mandi dan juga teras yang biasa dipake ketika adanya perkumpulan”*

Berdasarkan Informasi yang diperoleh hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Ditinjau dari aspek pengembangan sarana dan prasarana, program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini tergolong baik. Program ini telah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan produktivitas dan kemandirian dalam sektor peternakan serta memperkuat ketahanan pangan di Desa Janggala . Selain itu, program ini juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang memadai untuk menunjang pelaksanaan program.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan di Desa Janggala telah menunjukkan kemajuan yang optimal dalam pengembangan sarana dan prasarana. Hal ini dibuktikan dengan diperhatikannya penyediaan sarana dan prasarana utama yaitu: Kandang yang cukup baik, tempat pengelolaan, sumur bor, dan tenaga kerja yang kompeten. serta Fasilitas pendukung seperti sekretariat program yang luas, dengan kamar, kamar mandi, teras, penerangan, dan infrastruktur pendukung seperti jalan akses.

Hambatan yang dihadapi dalam pengembangan sarana dan prasarana yaitu kurangnya dana hal ini berakibat pada proses pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah ada dan mengakibatkan seperti terhambatnya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, menurunnya kualitas program, dan meningkatnya biaya operasional.

Upaya yang telah dilakukan untuk menangani permasalahan kurangnya dana dalam pengembangan sarana dan prasarana yaitu melakukan monitoring dan evaluasi keuangan secara berkala untuk memastikan penggunaan dana yang sesuai dengan tujuan program. Upaya ini bertujuan untuk membantu entitas kelembagaan dalam memaksimalkan penggunaan dana yang ada.

Hal ini sejalan dengan pendapat Mosher (1969) (Mardikanto :192) yang mensyaratkan adanya beragam sarana dan prasarana di setiap lokalitas usaha maupun distrik usaha. Adapun salah satu sarana dan prasarana yang perlu diperhatikan yaitu peralatan yang di perlukan, biaya operasional disetiap lokalitas usaha”.



**Gambar 4.4**  
**Sarana dan Prasarana Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ketahanan Pangan**

*Sumber: Data Penelitian 2024*

Program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan di Desa Janggala telah menunjukkan kemajuan yang optimal dalam pengembangan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana utama yang telah disediakan meliputi kandang yang cukup baik, tempat pengelolaan, sumur bor, dan tenaga kerja yang kompeten. Selain itu,

fasilitas pendukung seperti sekretariat program yang luas, dengan kamar, kamar mandi, teras, penerangan, dan infrastruktur pendukung seperti jalan akses juga telah tersedia. Pengembangan sarana dan prasarana ini sangat penting dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan. Seperti yang diungkapkan oleh Mosher (1969), setiap lokalitas usaha atau distrik usaha memerlukan beragam sarana dan prasarana, termasuk peralatan yang diperlukan dan biaya operasional. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan produktivitas dan kemandirian, khususnya dalam sektor peternakan, serta memperkuat ketahanan pangan di Desa Janggala

Berdasarkan hasil penelitian dalam aspek bina usaha dapat penulis simpulkan bahwa program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan di Desa Janggala telah mencapai hasil yang optimal dalam aspek Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya dua indikator utama, yaitu: Pertama, adanya pembentukan badan usaha yang mana telah terbentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengelola hasil program, kelompok pengelola program yang juga aktif dalam memasarkan hasil produk secara langsung, serta adanya pemanfaatan media sosial untuk mempromosikan produk dan menjangkau konsumen.

Salah satu aspek penting yang disorot adalah pembentukan badan usaha dalam rangka mengelola hasil program. Dalam konteks ini, telah dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berperan sebagai

entitas bisnis yang dikelola oleh masyarakat desa. BUMDes ini bertanggung jawab dalam mengelola dan memasarkan hasil produk yang dihasilkan dari program yang dijalankan. Keberadaan BUMDes memberikan landasan kelembagaan yang kuat dan terstruktur dalam menjalankan aktivitas ekonomi desa, serta memastikan keberlanjutan program dan pemanfaatan hasil secara optimal. Dengan adanya BUMDes, pengelolaan hasil program menjadi lebih terorganisir dan profesional.

Selain pembentukan BUMDes, terdapat juga kelompok pengelola program yang aktif dalam memasarkan hasil produk secara langsung. Kelompok ini terdiri dari individu-individu yang terlibat secara langsung dalam proses produksi dan pengelolaan program. Mereka berperan penting dalam mempromosikan dan menjual hasil produk kepada konsumen secara langsung, baik melalui penjualan di sekretariat pengelolaan program maupun melalui saluran pemasaran lainnya. Untuk memperluas jangkauan pemasaran, pemanfaatan media sosial juga dilakukan dalam mempromosikan produk dan menjangkau konsumen yang lebih luas. Dengan memanfaatkan platform media sosial, informasi tentang produk dapat disebarluaskan secara efektif dan efisien, serta memungkinkan terjalinnya interaksi langsung dengan konsumen potensial.

Kedua, terdapatnya salah satu aspek penting yang disebutkan adalah Pengembangan Sarana dan Prasarana. Ini merupakan upaya dalam memastikan keberhasilan program atau kegiatan yang dijalankan. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk

mendukung operasional secara efektif dan efisien. Dalam konteks ini, disebutkan adanya penyediaan kandang ternak, tempat pengelolaan, sumur bor, dan tenaga kerja yang kompeten. Keberadaan kandang ternak yang layak menjadi tempat berlindung dan tumbuh bagi hewan ternak, sedangkan tempat pengelolaan memfasilitasi proses pengolahan dan pemeliharaan. Sumur bor menjamin ketersediaan air yang cukup, sementara tenaga kerja yang kompeten memastikan pengelolaan yang profesional.

Selain itu, fasilitas pendukung juga disediakan untuk memastikan kenyamanan dan kelancaran program. Fasilitas ini meliputi sekretariat program, kamar, kamar mandi, teras, penerangan, dan jalan akses. Sekretariat program menjadi pusat administrasi dan koordinasi kegiatan, sementara ketersediaan kamar dan kamar mandi memberikan tempat tinggal yang layak bagi pelaku program. Teras menyediakan area terbuka untuk beristirahat atau berinteraksi, sementara penerangan memastikan kenyamanan dan keamanan di malam hari. Terakhir, jalan akses yang baik memudahkan mobilitas dan akses menuju lokasi program.

Kedua indikator tersebut menunjukkan upaya pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan pada dimensi bahwa program telah memberikan dukungan yang memadai dalam mengembangkan usaha. Pembentukan badan usaha membantu dalam pengelolaan dan pemasaran hasil produk, sedangkan pengembangan sarana dan prasarana memastikan kelancaran operasional usaha. Kedua



indikator yang disebutkan, yaitu pembentukan badan usaha dan pengembangan sarana serta prasarana, menunjukkan bahwa program yang dijalankan telah memberikan dukungan yang memadai dalam mengembangkan usaha.

Keberadaan badan usaha, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), berperan signifikan dalam mengelola dan memasarkan hasil produk yang dihasilkan dari program tersebut. Dengan adanya badan usaha yang terstruktur, pengelolaan dan pemasaran hasil usaha menjadi lebih terorganisir dan profesional. Badan usaha ini memastikan keberlanjutan program serta pemanfaatan hasil secara optimal untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, pengembangan sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi faktor pendukung keberhasilan program. Penyediaan kandang ternak, tempat pengelolaan, sumur bor, dan tenaga kerja yang kompeten memastikan kelancaran operasional usaha. Fasilitas pendukung seperti sekretariat program, kamar, kamar mandi, teras, penerangan, dan jalan akses turut menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan program. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, proses produksi dan pengelolaan usaha dapat berjalan dengan efisien dan efektif, sehingga memungkinkan peningkatan produktivitas dan kualitas hasil yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori Bina Usaha yang dikemukakan oleh Mardikanto (2017:114) yang menyebutkan bahwa Bina

usaha, menjadi suatu upaya yang penting dalam setiap pemberdayaan sebab, dalam bina manusia tidak adanya upaya dalam kesejahteraan (ekonomi atau non ekonomi) tidak akan mampu memberikan hasil yang baik.

Dapat dilihat adanya relevansi yang kuat antara upaya-upaya yang dilakukan dalam program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan di Desa Janggala dengan konsep Bina Usaha. Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut telah dijalankan secara optimal dalam aspek Bina Usaha. Konsep Bina Usaha menekankan pentingnya pengembangan usaha ekonomi produktif sebagai salah satu pilar utama dalam pemberdayaan masyarakat. Di Desa Janggala, pembentukan badan usaha melalui penggabungan dengan BUMDes merupakan langkah konkret dalam mewujudkan konsep tersebut.

Selain itu, upaya-upaya lain yang dilakukan dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Janggala, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan, serta evaluasi dan penyesuaian lokasi untuk meningkatkan aksesibilitas, juga sejalan dengan prinsip-prinsip Bina Usaha yang disampaikan oleh Mardikanto. Konsep Bina Usaha tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga mencakup pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan. Dengan demikian, program pemberdayaan masyarakat di Desa Janggala telah menerapkan prinsip-prinsip Bina Usaha secara komprehensif dan saling

melengkapi, sehingga dapat dikatakan bahwa aspek Bina Usaha dalam program tersebut telah optimal.

### **3. Bina Lingkungan**

Bina lingkungan merupakan salah satu aspek penting dalam program pemberdayaan masyarakat. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018), bina lingkungan mengacu pada upaya untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah atau komunitas. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, bina lingkungan dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, memberikan edukasi dan pelatihan tentang cara-cara mengelola lingkungan secara berkelanjutan, mengembangkan kegiatan-kegiatan yang mendukung pelestarian lingkungan, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ketahanan Pangan Di Desa Janggala Kecamatan Cidolog pada dimensi Bina Lingkungan Penulis akan menyajikan hasil wawancara dan observasi berdasarkan indikator.

**a) Dipenuhinya segala kewajiban yang di tetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang terkait perlindungan, pelestarian, dan pemulihan (rehabilitasi/reklamasi) sumber daya alam dan lingkungan.**

Perlindungan, pelestarian, dan pemulihan (rehabilitasi/reklamasi) sumber daya alam dan lingkungan adalah tiga pilar penting dalam menjaga kelestarian alam dan keseimbangan ekologi. Ketiga pilar ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Upaya perlindungan, pelestarian, dan pemulihan lingkungan merupakan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dengan bekerja sama, kita dapat menjaga kelestarian alam dan memastikan keberlanjutan pembangunan yang berkelanjutan

Perlindungan sumber daya alam merujuk pada upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga, melindungi, dan memelihara sumber daya alam yang ada di bumi agar tetap tersedia dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sumber daya alam mencakup sumber daya hayati seperti hutan, satwa liar, sumber daya perikanan, dan sumber daya non-hayati seperti air, tanah, mineral, dan energi. Perlindungan sumber daya alam bertujuan untuk mencegah kerusakan, eksploitasi berlebihan, dan kepunahan yang dapat mengancam keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan di bumi

Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan merupakan upaya sistematis untuk menjaga kelangsungan dan keberlanjutan sumber daya

alam serta menjaga kualitas lingkungan hidup. Sumber daya alam seperti hutan, lahan, air, mineral, dan keanekaragaman hayati merupakan aset berharga bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan ekosistem. Namun, eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan dapat mengancam ketersediaan sumber daya tersebut di masa depan. Oleh karena itu, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain pengelolaan hutan lestari, konservasi lahan dan air, pengendalian pencemaran, daur ulang, pemanfaatan energi terbarukan, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Selain itu, penegakan hukum dan peraturan terkait perlindungan lingkungan, serta edukasi dan kampanye kepada masyarakat juga berperan penting dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Pelibatan semua pihak, baik pemerintah, swasta, organisasi non-pemerintah, maupun masyarakat umum, sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

Pemulihan sumber daya alam dan lingkungan, baik melalui rehabilitasi maupun reklamasi, merupakan upaya penting untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang telah terdegradasi atau rusak akibat aktivitas manusia. Rehabilitasi merujuk pada proses memulihkan kembali fungsi dan produktivitas sumber daya alam seperti lahan, hutan,

atau perairan yang telah mengalami kerusakan. Sementara itu, reklamasi lebih spesifik pada upaya mengembalikan kondisi lahan atau area yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas pertambangan atau industri agar dapat dimanfaatkan kembali untuk kegiatan lain yang lebih ramah lingkungan.

Proses rehabilitasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti reboisasi atau penghijauan kembali lahan kritis, pemulihan daerah aliran sungai, pengendalian erosi, dan pengelolaan hutan lestari. Reklamasi lahan bekas tambang atau industri dapat dilakukan dengan mengembalikan kondisi topografi, memperbaiki kualitas tanah, menanam kembali vegetasi, dan memulihkan habitat satwa liar. Kedua upaya ini bertujuan untuk memulihkan keseimbangan ekosistem, mengembalikan fungsi lingkungan, serta menjamin ketersediaan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Sebagaimana hasil wawancara terkait dengan Dipenuhinya segala kewajiban yang di tetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang terkait perlindungan, pelestarian, dan pemulihan (rehabilitasi/reklamasi) lingkungan. Penulis sajikan hasil wawancara dengan 9 informan dalam penelitian:

Kepala Desa selaku Informan ke 1 mengatakan bahwa :

*“pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bina lingkungan ini yaitu dengan memberikan edukasi kepada kelompok pengelola dan masyarakat terkait dengan bina lingkungan yang baik guna terciptanya kesadaran sehingga masyarakat dapat berpartisipasi khususnya dalam pelestarian lingkungan atau sama-sama menjaga kelestarian”*

Selanjutnya Kasi Perencanaan selaku informan ke 2 mengatakan :

*“dikarenakan program ini belum lama berjalan maka kami masih belum membuat regulasi atau aturan sebagai upaya perlindungan terkait dengan program ini, namun kedepannya akan di segerakan terkait aturan ini”*

Kasi Kesejahteraan selaku informan ke 3 mengatakan :

*“Dalam upaya bina lingkungan ini khususnya dalam pelestarian lingkungan saya selaku kasi kesejahteraan setiap weekend terjun langsung ke lokasi program pemberdayaan masyarakat ini untuk perawatan lingkungan”*

Informan ke 4 anggota kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat mengatakan bahwa :

*“selaku kelompok yang langsung di lapangan kami selalu memastikan lingkungan ini baik khususnya untuk ternak kambing yaitu dengan salalu memperhatikan lingkungan sekitar kandang agar kebersihannya itu selalu terjaga serta selalu memastikan rumput sekitar agar dapat dijadikan pakan yang berkualitas.”*

Informan ke 5 ketua kelompok tani mengatakan bahwa :

*“memastikan masyarakat mengetahui keberadaan program pemberdayaan masyarakat dan tujuannya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Edukasi ini kami lakukan dengan cara **sosialisasi** di berbagai pertemuan yang melibatkan masyarakat untuk menjelaskan program, manfaatnya, dan bagaimana mereka dapat berkontribusi.”*

Informan ke 6 anggota kelompok mengatakan bahwa :

*“Dalam rangka pelaksanaan program bina lingkungan, kelompok pengelola biasanya menjalin kerja sama dengan masyarakat untuk memelihara kelestarian lingkungan di sekitar lokasi program pemberdayaan dan di sepanjang jalan.”*

Informan ke 7 Kepala Dusun Karangtingal mengatakan bahwa :

*“saya membantu dalam penyampaian informasi kepada masyarakat ketika adanya gotong royong dalam pemeliharaan lingkungan pada program pemberdayaan masyarakat”*

Informan ke 8 Masyarakat :

*“saya mengetahui adanya program ini karena lokasinya memang ada di tanah milik desa yang kebetulan di pinggir jalan untuk pengelolaan lingkungan biasanya memang bareng dengan kerja bakti yang biasa di lakukan warga setempat namun itu tidak rutin”*

Informan ke 9 masyarakat mengatakan bahwa :

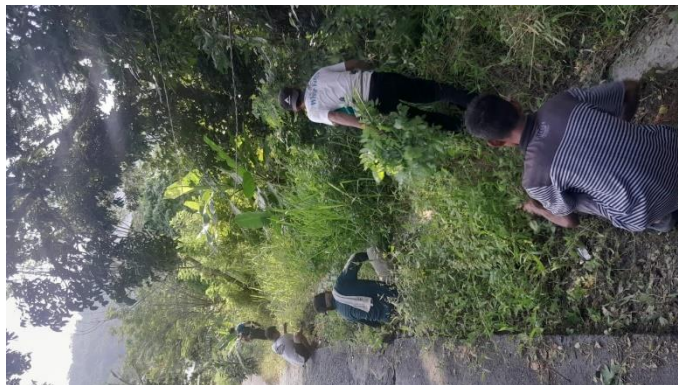
*“belum pernah mengikuti karena kadang bentrok dengan pekerjaan pribadi”*

Berdasarkan Informasi yang diperoleh hasil wawancara di atas mengenai Dipenuhinya segala kewajiban yang di tetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang terkait perlindungan, pelestarian, dan pemulihan (rehabilitasi/reklamasi) lingkungan pada program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan ini menunjukkan upaya yang baik hal ini dapat dilihat dengan Pemerintah telah melakukan upaya pembinaan kepada kelompok pengelola dan masyarakat melalui edukasi terkait dengan bina lingkungan yang baik. langkah proaktif dalam memberikan pembinaan dan edukasi kepada kelompok pengelola dan masyarakat terkait dengan praktik-praktik bina lingkungan yang baik. Pembinaan ini menjadi penting karena kelompok pengelola dan masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, upaya menjamin kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi terkait perlindungan, pelestarian, dan pemulihan sumber daya alam serta lingkungan pada program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan



pangan sudah dilakukan dengan optimal. Hal ini terlihat dari berbagai upaya pemeliharaan lingkungan yang dilaksanakan. Selain itu, optimalisasi penyediaan kewajiban tersebut juga didukung oleh keterlibatan aktif masyarakat. Masyarakat tidak hanya dilibatkan sebagai subjek yang diberdayakan, tetapi juga sebagai aktor utama dalam melaksanakan kegiatan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan. Masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan. Dengan keterlibatan langsung masyarakat, diharapkan akan tumbuh rasa kepemilikan dan tanggung jawab dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan di wilayah mereka. Hal ini penting untuk menjamin keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan dalam jangka panjang.



**Gambar 4.5**  
**Upaya pemeliharaan lingkungan Sekitar**  
*Sumber: Data Penelitian 2024*

Berdasarkan gambar 4.4 dapat di jelaskan bahwa telah dilakukannya upaya pemeliharaan lingkungan sekitar yang di lakukan oleh kelompok pengelola program dan masyarakat seperti hasil wawancara dengan Informan ke 6 yaitu anggota kelompok yang mengatakan bahwa

Dalam rangka pelaksanaan program bina lingkungan, kelompok pengelola biasanya menjalin kerja sama dengan masyarakat untuk memelihara kelestarian lingkungan di sekitar lokasi program pemberdayaan dan di sepanjang jalan.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam upaya dipenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang terkait perlindungan, pelestarian, dan pemulihan (rehabilitasi/reklamasi) sumber daya alam dan lingkungan yaitu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pengelolaan aset desa dan kemandirian pada kelompok pengelola. Tantangan ini dapat menghambat upaya memenuhi kewajiban terkait lingkungan karena kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan sumber daya alam.

Upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yaitu melalui sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan lingkungan serta kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk mengembangkan solusi yang terbaik dan berkelanjutan guna memenuhi kewajiban terkait bina lingkungan. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan merupakan langkah yang sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Melalui sosialisasi, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dampak kerusakan lingkungan dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan di Desa Janggala telah mencapai hasil yang optimal dalam aspek Bina Lingkungan telah optimal hal ini dibuktikan dengan adanya upaya pemerintah, kelompok pengelola, dan masyarakat telah menunjukkan komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan hal ini sejalan dengan pendapat Mardikanto (2017:115) menyebutkan yang termasuk tanggung jawab lingkungan, adalah kewajiban dipenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang terkait dengan perlindungan, pelestarian, dan pemulihan (rehabilitasi/reklamasi sumber daya alam dan lingkungan hidup).

Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan di Desa Janggala, terutama dalam aspek bina lingkungan. Upaya nyata yang dilakukan oleh pemerintah, kelompok pengelola, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan telah mencapai hasil yang optimal. Adanya komitmen yang kuat dari berbagai pihak merupakan faktor kunci dalam keberhasilan ini, sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mardikanto (2017) mengenai tanggung jawab lingkungan yang mencakup kewajiban untuk memenuhi persyaratan terkait perlindungan, pelestarian, dan pemulihan sumber daya alam serta lingkungan hidup.

Meskipun masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi, keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di Desa Janggala

menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan yang melibatkan berbagai pihak dan mempertimbangkan aspek lingkungan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Temuan ini relevan dengan teori Mardikanto (2017) terkait tanggung jawab lingkungan, serta konsep pemberdayaan masyarakat yang menekankan keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Penelitian ini memberikan contoh nyata bagaimana program pemberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan menjamin ketersediaan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

#### **4. Bina Kelembagaan**

Bina kelembagaan merupakan salah satu strategi penting dalam program pemberdayaan Masyarakat, yang mana bina kelembagaan ini merupakan proses pembinaan dan pengembangan kelembagaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bersama. Bina kelembagaan ini juga merupakan proses yang berkelanjutan maka dari itu membutuhkan komitmen dari berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri.

Dengan kerja sama dan sinergi dari semua pihak, bina kelembagaan menjadi suatu proses yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. Melalui kelembagaan yang kuat dan berfungsi optimal, masyarakat akan

mampu mengelola sumber daya secara efisien, mengembangkan kegiatan ekonomi yang produktif, melestarikan nilai-nilai budaya, serta menjaga keseimbangan lingkungan hidup.

**a) Terdapatnya komponen person**

Komponen person dalam program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan merupakan elemen penting dalam memastikan keberhasilan suatu program, bagi kelompok pengelola dalam program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan di Desa Janggala Kecamatan Cidolog komponen person ini sangat penting. kelompok pengelola yang efektif memerlukan individu-individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan masyarakat terkait pangan

Untuk mengetahui terkait dengan terdapatnya komponen person pada program pemberdayaan Masyarakat melalui ketahanan pangan di desa Janggala penulis sajikan hasil wawancara dengan 7 informan berikut :

Informan ke 1 kepala desa menyatakan bahwa :

*“menyeleksi orang-orang yang akan mengelola langsung program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan dan tentunya orang yang tergabung dalam kelompok ini sudah berpengalaman sebelumnya khususnya dalam pemeliharaan kambing”*

Informan ke 2 kasi perencanaan menyatakan bahwa:

*“pemerintah desa memberikan pembinaan terhadap kelompok pengelola melalui pelatihan pengelolaan peternakan kambing etawa dan buah naga”*

Informan ke 3 Kasi kesejahteraan menyatakan bahwa :

*“Desa telah memberikan fasilitas penunjang sebelum terlaksananya program yaitu dengan adanya pelatihan kepada kelompok pengelola program”*

Informan ke 4 Anggota Kelompok Pengelola kambing etawa :

*“ya saya berpengalaman terkait pengelolaan ternak karena sebelumnya saya juga mempunyai ternak domba pribadi, namun untuk pengelolaan kambing etawa ini tentunya berbeda maka kami di berikan fasilitas pelatihan pada awal pelaksanaan program”*

Informan ke 5 Ketua Kelompok Tani mengatakan bahwa :

*“ya, pemerintah desa telah memberikan pelatihan kepada kelompok tani terkait budidaya buah naga”*

Informan Ke 6 Anggota Kelompok Tani mengatakan bahwa :

*“pembinaan yang diterima dari pemerintah yaitu pelatihan terkait budidaya buah naga”*

Informan ke 7 Kepala Dusun Karangtingal mengatakan bahwa :

*“ada pelatihan terkait pengelolaan program”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa terdapatnya komponen person yang berperan aktif dalam bina kelembagaan pada pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan di Desa Janggala kecamatan Cidolog. Hal ini dapat dilihat dari terjalinnya kerja sama yang erat antara berbagai pihak dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa menunjukkan optimalisasi dalam komponen person pada program pemberdayaan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya seleksi dan penempatan personel yang tepat yaitu pemerintah

desa telah melakukan seleksi yang cermat untuk memilih individu-individu yang kompeten dan berpengalaman dalam pengelolaan program pemberdayaan masyarakat.

Mardikanto (2017:116) menyebutkan suatu bentuk relasi sosial dapat disebut sebagai sebuah kelembagaan apabila memiliki empat komponen yang pertama yaitu komponen person dimana orang-orang yang terlibat di dalam satu kelembagaan dapat diidentifikasi dengan jelas.

Hambatan yang dihadapi dalam komponen person pada pemberdayaan Masyarakat melalui ketahanan pangan yaitu kurangnya sistem *monitoring* dan evaluasi terhadap kinerja personel dan ini menjadi hambatan dalam pencapaian produktivitas yang diinginkan.. Hal ini juga dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam menilai kinerja dan potensi pengembangan kelompok pengelola. Tanpa sistem yang kuat untuk memantau kinerja personel, sulit untuk mengetahui sejauh mana kontribusi mereka terhadap tujuan organisasi dan tanpa adanya evaluasi yang terstruktur, pengembangan kelompok pengelola dapat terhambat dan potensi terbaik dari personel mungkin tidak terungkap sepenuhnya.

Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan ini yaitu memberikan evaluasi secara teratur juga merupakan langkah yang penting dalam mengatasi hambatan kurangnya sistem *monitoring* dan evaluasi. Dengan memberikan evaluasi yang jelas dan

terstruktur, personel dapat memahami area di mana mereka telah berhasil dan di mana mereka perlu meningkatkan kinerja mereka. Evaluasi yang baik juga dapat menjadi sarana motivasi bagi personel untuk terus berusaha meningkatkan kinerja mereka dan meraih tujuan yang telah ditetapkan.

**b) Terdapatnya komponen kepentingan**

Komponen kepentingan dalam bina kelembagaan adalah para pihak yang memiliki kepentingan terhadap kelembagaan yang sedang dibina. Para pihak ini dapat terdiri dari individu, kelompok, organisasi, atau institusi yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap keberhasilan kelembagaan tersebut. Komponen kepentingan ini merupakan salah satu elemen penting dalam bina kelembagaan.

Untuk mengetahui terkait dengan apa saja komponen kepentingan pada program pemberdayaan Masyarakat melalui ketahanan pangan di desa Janggala penulis sajikan hasil wawancara dengan 9 informan berikut :

Informan ke 1 Kepala Desa Mengatakan :

*“komponen kepentingan pada program pemberdayaan Masyarakat melalui ketahanan pangan ini yaitu salah satunya pengembangan kelembagaan yang mana Kelompok pengelola kambing etawa dibina agar menjadi organisasi yang sehat, transparan, dan akuntabel”*

Informan ke 2 Kasi perencanaan mengatakan bahwa:

*“Desa telah memfasilitasi kepentingan program dengan membangun infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan ini seperti, seperti kandang, gudang pakan, dan akses air bersih”*



Informan ke 3 kasi kesejahteraan mengatakan bahwa :

*“Pemerintah desa telah memberikan fasilitas prezer sebagai kepentingan untuk hasil dari pengelolaan ternak yaitu susu kambing etawa”*

Informan ke 4 anggota kelompok pengelola ternak mengatakan bahwa:

*“ya kami menerima fasilitas penunjang untuk kepentingan pengelolaan program”*

Informan Ke 5 ketua kelompok tani mengatakan bahwa :

*“pembinaan sebelum pengelolaan perkebunan buah naga merupakan kepentingan yang kita dapatkan karena dengan adanya pembinaan itu kami bisa tau bagaimana pengelolaan yang baik”*

Informan ke 6 anggota kelompok tani mengatakan bahwa :

*“sesuai yang di arahkan pada saat pelatihan bahwasanya untuk perkebunan buah naga ini penting untuk menggunakan ban bekas dan itu di fasilitasi oleh pemerintah desa”*

Informan ke 7 Kepala Dusun mengatakan :

*“ya benar adanya terkait adanya fasilitas-fasilitas penting di tempat untuk menunjang pengelolaan program”*

Informan ke 8 masyarakat :

*“ya saya melihat adanya kandang yang baik untuk ternak sebagai fasilitas penting yang utama dalam pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan ini”*

Informan ke 9 masyarakat :

*“ya saya mengetahui adanya fasilitas penunjang program”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan telah optimal karena melibatkan berbagai komponen kepentingan, mulai dari pengembangan kelembagaan, infrastruktur pendukung, fasilitas,

pelatihan, hingga dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi, juga menunjukkan pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan meliputi kelembagaan masyarakat lokal, pelatihan, penyuluhan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, serta dukungan dari pemerintah desa. Selain itu, hasil observasi juga menyoroti pentingnya peran Masyarakat dalam program pemberdayaan ini.

Hal ini sejalan dengan teori Mardikanto (2017:30) dalam konsep pemberdayaan berdasarkan indikator fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan. Mengenai terdapatnya komponen kepentingan pada program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan di Desa Janggala ini sudah optimal hal ini di buktikan dengan tersedianya fasilitas kepentingan yang utama untuk terselenggaranya program.

Pada program pemberdayaan Masyarakat melalui ketahanan pangan di Desa Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis, tidak ada indikasi hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan Upaya komponen person. Hal ini dapat terlihat dari dilibatkannya berbagai komponen kepentingan, mulai dari pengembangan kelembagaan, infrastruktur pendukung, fasilitas, pelatihan, hingga dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang disebutkan, terdapat relevansi yang kuat antara keduanya. Penelitian menunjukkan

bahwa program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan di Desa Janggala telah optimal dalam melibatkan komponen kepentingan, seperti pengembangan kelembagaan, infrastruktur pendukung, fasilitas, pelatihan, serta dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat. Hasil observasi juga menekankan pentingnya kelembagaan masyarakat lokal, pelatihan, penyuluhan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, serta dukungan dari pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan. Hal ini selaras dengan teori Mardikanto yang menyediakan fasilitas yang mampu sebagai salah satu indikator pemberdayaan.

**c) Terdapatnya komponen aturan**

Komponen aturan merupakan salah satu elemen penting dalam bina kelembagaan yang berperan untuk mengatur struktur, mekanisme kerja, dan tata kelola kelompok pemberdayaan Masyarakat. Aturan yang baik akan membantu memastikan keberlanjutan program meskipun terjadi pergantian pengurus atau anggota kelompok.

Untuk mengetahui terkait dengan terdapatnya komponen aturan pada program pemberdayaan Masyarakat melalui ketahanan pangan di desa Janggala penulis sajikan hasil wawancara dengan 7 informan berikut :

Informan ke 1 kepala desa menyebutkan bahwa :

*“sebenarnya program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan ini merupakan program pemerintah pusat yang harus mau tidak mau dan wajib di laksanakan oleh pemerintah desa tanpa melihat latar belakang desa tersebut siap atau tidak, karena itu*

*merupakan bagian dari Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Perpres ini mengatur tentang penggunaan 20% Dana Desa untuk program ketahanan pangan dan hewani. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan konsumsi pangan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan bagi masyarakat desa”*

Informan ke 2 Kasi perencanaan menyebutkan :

*“untuk aturan terkait pemberdayaan Masyarakat melalui program ketahanan pangan ini masih merujuk pada peraturan presiden”*

Informan ke 3 kasi kesejahteraan menyebutkan bahwa :

*“belum adanya peraturan desa terkait dengan program pemberdayaan Masyarakat melalui ketahanan pangan ini”*

Informan ke 4 anggota kelompok pengelola :

*“untuk aturan saya tidak mengetahuinya karena yang saya simak pada saat pelatihan hanya tata cara terkait pengelolaan”*

Informan ke 5 ketua kelompok tani :

*“saya tidak tahu terkait dengan aturan, namun yang saya ketahui program ini sumbernya dari dana desa”*

Informan ke 6 anggota kelompok tani mengatakan bahwa :

*“terkait aturan pemerintah desa tidak mensosialisasikan karna kami lebih terjun di lapangan pengelolaannya saja jadi pada saat pelatihan itu lebih ke teknik-teknik pengelolaan program“*

Informan ke 7 Kepala Dusun Karangtingal mengatakan bahwa :

*“saya kurang tahu mengenai aturan terkait program ini”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan di Desa Janggala masih menghadapi beberapa kendala terkait aturan. Meskipun program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan melibatkan

berbagai komponen kepentingan, seperti pengembangan kelembagaan, pendukung infrastruktur, fasilitas, pelatihan, serta dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat itu sendiri, namun kendala terkait aturan menunjukkan bahwa aspek hukum dalam implementasinya.

Berdasarkan hasil observasi, terkait dengan terdapatnya komponen aturan pada program pemberdayaan Masyarakat melalui ketahanan pangan ini implementasinya belum optimal karena program ini belum memiliki landasan hukum yang kuat di tingkat desa. Hal ini menyebabkan implementasi program belum optimal dan belum mencapai tujuan yang diharapkan, ketiadaan landasan hukum yang kuat di tingkat desa mengakibatkan beberapa kendala, seperti:

Kurangnya kejelasan arah dan tujuan program, Tanpa landasan hukum yang jelas, program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan di Desa Janggala ini tidak memiliki arah dan tujuan yang terarah. Hal ini dapat menyebabkan program menjadi tidak fokus dan tidak efektif dalam mencapai tujuannya.

Kemudian kurangnya akuntabilitas dan transparansi, Tanpa landasan hukum yang kuat, program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan di desa tidak memiliki akuntabilitas dan transparansi yang jelas. Hal ini dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan dana dan sumber daya program. Dan akan mendapatkan kesulitan dalam pelaksanaan dan *monitoring* program, Tanpa landasan hukum yang jelas, program pemberdayaan masyarakat

melalui ketahanan pangan di desa akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan dan *monitoring* program. Hal ini dapat menyebabkan program tidak berjalan dengan efektif dan efisien.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan di Desa Janggala adalah tidak adanya aturan atau regulasi yang jelas di tingkat desa. Meskipun program ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang dituangkan dalam Peraturan Presiden, namun belum ada aturan turunan di tingkat desa yang mengatur secara rinci pelaksanaan program tersebut. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan koordinasi antar pemangku kepentingan yang terlibat.

Upaya yang telah dilakukan yaitu berusaha untuk mengambil langkah-langkah nyata dalam mengoptimalkan kinerja program pemeliharaan. Upaya ini dilakukan sebagai langkah sementara untuk memastikan keberlangsungan program sambil menunggu adanya aturan atau regulasi yang lebih jelas dan mengikat di tingkat desa.

Berdasarkan hasil penelitian Program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan di Desa Janggala merupakan sebuah bentuk kelembagaan yang melibatkan berbagai komponen kepentingan, seperti pengembangan kelembagaan, pendukung infrastruktur, fasilitas, pelatihan, serta dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat itu sendiri. Namun, dalam implementasinya, program

ini menghadapi kendala terkait aspek hukum atau aturan. Hasil observasi menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan di Desa Janggala belum memiliki landasan hukum yang kuat di tingkat desa. Ketiadaan landasan hukum yang kuat ini menyebabkan implementasi program belum optimal dan belum mencapai tujuan yang diharapkan.

Kendala-kendala yang dihadapi akibat ketiadaan landasan hukum yang kuat antara lain kurangnya kejelasan arah dan tujuan program, kurangnya akuntabilitas dan transparansi, serta kesulitan dalam pelaksanaan dan *monitoring* program. Tanpa landasan hukum yang jelas, program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan di desa tidak memiliki arah dan tujuan yang terarah, sehingga program menjadi tidak fokus dan tidak efektif dalam mencapai tujuannya. Selain itu, program tidak memiliki akuntabilitas dan transparansi yang jelas, yang dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan dana dan sumber daya program. Lebih lanjut, pelaksanaan dan *monitoring* program menjadi sulit dilakukan tanpa adanya landasan hukum yang jelas.

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mardikanto (2017:116) yang menyatakan bahwa suatu bentuk relasi sosial dapat disebut sebagai kelembagaan apabila memiliki komponen aturan atau kesepakatan yang dipegang secara bersama. Setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang

dipegang secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut.

Dengan demikian, kendala implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan di Desa Janggala yang disebabkan oleh ketiadaan landasan hukum yang kuat di tingkat desa relevan dengan teori Mardikanto yang menekankan pentingnya komponen aturan dalam suatu kelembagaan untuk mencapai efektivitas program.

**d) Terdapatnya komponen struktur**

Komponen struktur merupakan elemen penting dalam bina kelembagaan kelompok pemberdayaan masyarakat. Struktur yang jelas dan efektif akan membantu kelompok dalam menjalankan program ketahanan pangan secara terorganisir. pentingnya komponen struktur dalam bina kelembagaan kelompok pemberdayaan masyarakat. Struktur organisasi yang jelas dan efektif merupakan elemen kunci yang memungkinkan kelompok untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat, khususnya program ketahanan pangan, secara terorganisir dan efektif.

Komponen struktur yang dimaksud dapat mencakup aspek-aspek seperti pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas, alur komunikasi yang lancar, serta mekanisme pengambilan keputusan yang transparan. Dengan adanya struktur yang jelas, masing-masing anggota kelompok memahami tugas dan tanggung jawabnya, sehingga



dapat bekerja secara terkoordinasi dan saling mendukung dalam mencapai tujuan program. Selain itu, struktur yang efektif juga memungkinkan adanya pengawasan dan evaluasi yang lebih baik terhadap pelaksanaan program. Dengan adanya pembagian peran yang jelas, setiap tahapan program dapat dipantau dan dievaluasi secara lebih terukur, sehingga memudahkan identifikasi masalah dan penyusunan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Dalam konteks program ketahanan pangan, struktur yang jelas dan efektif sangat penting untuk memastikan keberhasilan program secara keseluruhan. Program ketahanan pangan melibatkan berbagai aspek, seperti produksi pangan, distribusi, pemasaran, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Dengan adanya struktur yang terorganisir, setiap aspek tersebut dapat dikelola dengan baik dan terkoordinasi, sehingga program dapat berjalan secara efisien dan efektif.

Dengan demikian, komponen struktur merupakan elemen penting dalam bina kelembagaan kelompok pemberdayaan masyarakat. Struktur yang jelas dan efektif memungkinkan adanya pembagian peran, alur komunikasi yang lancar, pengambilan keputusan yang transparan, serta pengawasan dan evaluasi yang lebih baik. Hal ini akan membantu kelompok dalam menjalankan program ketahanan pangan secara terorganisir dan mencapai tujuan program secara optimal.

Untuk mengetahui terkait dengan terdapatnya komponen struktur pada program pemberdayaan Masyarakat melalui ketahanan pangan di desa Janggala penulis sajikan hasil wawancara dengan 7 informan berikut :

Informan ke 1 kepala desa mengatakan bahwa :

*“untuk struktur organisasi kelompok pengelola program pemberdayaan Masyarakat melalui ketahanan pangan ini tidak ada karena program ini langsung di kelola oleh desa, terkait dengan adanya pengelola itu kami sebut dengan kelompok pengelola yang terdiri dari 3 orang jadi tidak adanya struktur organisasi”*

Informan ke 2 Kasi perencanaan mengatakan bahwa :

*“struktur organisasi kepengurusan ini perangkat desa namun untuk pengelolaan di lapangan ada orang-orang yang sudah kami seleksi sebelumnya”*

Informan ke 3 Kasi kesejahteraan mengatakan bahwa :

*“untuk bidang peternakan tidak ada kalau struktur yang langsung mengelola karena hanya terdiri dari 3 orang, Adapun yang bidang Perkebunan yaitu buah naga yaitu kelompok tani yang mengelolanya, dan ada struktur organisasinya”*

Informan ke 4 anggota kelompok pengelola mengatakan bahwa :

*“ya struktur kelompok pengelolanya memang tidak ada karena hanya terdiri dari 3 orang untuk yang mengelola peternakan kambing etawa”*

Informan ke 5 Ketua kelompok tani mengatakan bahwa :

*“untuk struktur organisasi kelompok pengelolaan program pemberdayaan Masyarakat melalui ketahanan pangan ini oleh kelompok tani “*

Informan ke 6 anggota kelompok tani mengatakan bahwa :

*“ ya saya termasuk anggota kelompok tani karena untuk pengelolaan buah naga itu di kelola oleh kelompok tani”*

Informan ke 7 Kepala Dusun Karangtingal mengatakan bahwa :

*“ya saya ikut mengelola program pemberdayaan Masyarakat melalui ketahanan pangan ini karena saya juga termasuk perangkat desa”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas bersama para informan, terlihat bahwa terdapat perbedaan pendapat terkait struktur organisasi kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan. Beberapa menyatakan bahwa tidak ada struktur organisasi yang jelas karena hanya terdiri dari beberapa orang, sementara yang lain menyebutkan adanya kelompok tani yang mengelola dengan struktur organisasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan komponen struktur pada program ini belum optimal karena terdapat variasi dalam pernyataan mengenai struktur organisasi kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan

Berdasarkan hasil observasi terkait struktur organisasi kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan di Desa Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis ini sudah terdapatnya struktur organisasi yang pertama yaitu adanya struktur organisasi pemerintah desa pada pengelolaan program di bidang peternakan, Struktur organisasi di tingkat pemerintah desa ini diharapkan dapat memberikan arahan, koordinasi, dan dukungan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di bidang peternakan. Adanya struktur organisasi yang jelas di tingkat pemerintah desa memungkinkan adanya alur komunikasi dan

pengambilan keputusan yang terstruktur, serta memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan program.

Sementara itu, dalam bidang perkebunan buah naga, terdapat struktur organisasi pengelola yang berbentuk kelompok tani. Kelompok tani ini terdiri dari anggota masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan budidaya perkebunan buah naga. Struktur organisasi kelompok tani ini memungkinkan adanya pembagian tugas, koordinasi, dan pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam pengelolaan perkebunan buah naga. Kemudian adanya struktur organisasi pengelola pada pengelolaan program di bidang Perkebunan buah naga yaitu kelompok tani.

Hambatan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan di Desa Janggala adalah ketidakjelasan struktur organisasi yang terlibat, sehingga Kurangnya koordinasi dan pembagian tugas yang jelas antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah desa, kelompok tani, dan masyarakat setempat yang menimbulkan tumpang tindih tanggung jawab.

Upaya yang telah dilakukan yaitu pengelola yang tidak sibuk telah berinisiatif untuk mengambil alih sebagian tugas dan tanggung jawab yang seharusnya dipegang oleh pihak lain yang terlibat dalam program. Upaya ini, meskipun bukan solusi jangka panjang, telah membantu meminimalkan dampak negatif dari masalah tersebut dan

memungkinkan program untuk terus berjalan dengan lebih lancar sementara langkah-langkah perbaikan struktur organisasi sedang diupayakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil observasi dengan teori Mardikanto (2017) terkait komponen struktur dalam kelembagaan Program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan di Desa Janggala, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis, merupakan sebuah bentuk kelembagaan yang melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaannya. Namun, dalam implementasinya, terdapat permasalahan terkait komponen struktur organisasi kelompok pengelola program ini.

Adapun permasalahannya yaitu terdapatnya perbedaan pendapat mengenai ketiadaan struktur organisasi kelompok pengelola dalam program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan dapat menimbulkan berbagai masalah dan hambatan dalam pelaksanaan program. Struktur organisasi yang jelas dan terorganisir sangat penting untuk memastikan koordinasi yang baik, pembagian tugas yang efektif, serta alur komunikasi yang lancar di antara anggota kelompok pengelola.

Tanpa adanya struktur ini, dapat terjadi tumpang tindih tanggung jawab, ketidakjelasan peran, dan kurangnya akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Selain itu, tidak adanya struktur organisasi dapat menyebabkan kurangnya kepemimpinan dan visi yang kuat

dalam mengarahkan program. Setiap anggota kelompok pengelola mungkin memiliki persepsi dan tujuan yang berbeda-beda, sehingga dapat menimbulkan konflik internal dan tidak efisien dalam pengelolaan program. Hal ini pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tujuan program secara keseluruhan dan menyebabkan tidak efektif dalam penggunaan sumber daya yang tersedia.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa struktur organisasi kelompok pengelola program ini sudah ada, meskipun belum optimal. Terdapat struktur organisasi pemerintah desa yang mengelola program di bidang peternakan, serta struktur organisasi kelompok tani yang mengelola program di bidang perkebunan buah naga.

Selanjutnya dengan adanya struktur organisasi kelompok pengelola yang jelas dan terorganisir memberikan dampak positif yang signifikan dalam mendukung keberhasilan program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan. Struktur organisasi yang jelas dan terstruktur memungkinkan pembagian peran dan tanggung jawab yang efektif di antara anggota kelompok pengelola. Hal ini menciptakan koordinasi yang baik, alur komunikasi yang lancar, serta akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengambilan keputusan.

Mardikanto (2017:116) dalam teorinya menyebutkan bahwa suatu bentuk relasi sosial dapat disebut sebagai kelembagaan apabila memiliki komponen struktur, di mana setiap orang memiliki posisi dan peran yang harus dijalankan dengan benar, serta tidak dapat mengubah

posisinya sendiri. Teori ini menekankan pentingnya struktur organisasi dengan posisi dan peran yang jelas dalam suatu kelembagaan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa komponen struktur pada program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan di Desa Janggala belum optimal. Hal ini terlihat dari adanya variasi dalam pernyataan mengenai struktur organisasi kelompok pengelola, serta belum optimalnya struktur organisasi yang ada. Kondisi tersebut kurang sejalan dengan teori Mardikanto yang menekankan pentingnya komponen struktur dalam suatu kelembagaan. Tanpa struktur organisasi yang jelas dengan posisi dan peran yang terdefinisi, program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan di Desa Janggala ini dapat mengalami kendala dalam pengelolaan dan pencapaian tujuannya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pada program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan di Desa Janggala, Kecamatan Cidolog, terdapat bina kelembagaan yang mencakup beberapa komponen penting. Pertama, komponen person, di mana pemerintah desa telah melakukan seleksi dan menempatkan personel yang kompeten dan berpengalaman, serta memberikan pelatihan dan pembinaan kepada kelompok pengelola program.

Kedua, komponen kepentingan, di mana program ini melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang beragam, seperti pengembangan kelembagaan, penyediaan infrastruktur pendukung,

fasilitas, pelatihan, serta dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa telah memfasilitasi kepentingan program dengan menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan.

Ketiga, komponen aturan, di mana implementasi program masih menghadapi kendala terkait aturan, karena belum ada peraturan desa yang spesifik mengatur program ini. Program ini masih merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Keempat, komponen struktur, di mana terdapat perbedaan pendapat terkait struktur organisasi kelompok pengelola program. Untuk pengelolaan peternakan kambing etawa, tidak ada struktur organisasi yang jelas karena hanya terdiri dari beberapa orang, sedangkan untuk pengelolaan perkebunan buah naga, ada struktur organisasi yang dikelola oleh kelompok tani.

Secara keseluruhan, bina kelembagaan pada program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan di Desa Janggala telah optimal dalam aspek komponen person dan komponen kepentingan. Namun, masih belum optimal dalam aspek komponen aturan hal ini di buktikan dengan belum adanya peraturan desa yang spesifik mengatur program ini, sehingga masih merujuk pada peraturan di tingkat yang lebih tinggi (Peraturan Presiden). dan pada komponen struktur organisasi karena terdapat perbedaan pendapat dan ketidakjelasan terkait struktur organisasi kelompok pengelola program, khususnya untuk pengelolaan peternakan kambing etawa yang tidak memiliki struktur organisasi yang jelas.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan, program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan ini belum menunjukkan hasil yang optimal.

Dalam aspek bina manusia terdapat 1 (satu) indikator yang belum optimal yaitu dalam pengembangan kapasitas individu yang mana rencana pelatihan jangka panjang, pendek dan menengah belum dilakukan secara rutin. Sedangkan upaya pengembangan kapasitas entitas kelembagaan telah optimal karena telah dilakukannya pelatihan, pendampingan, dan strategi pengembangan kapasitas dengan memanfaatkan media pembelajaran. Selanjutnya untuk upaya pengembangan kapasitas sistem juga telah dilakukan secara optimal melalui pelatihan, edukasi, penyediaan fasilitas pendukung, pelatihan, dan upaya memaksimalkan kinerja pengelolaan. Kelompok pengelola program menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memaksimalkan kinerja program pengelolaan.

Dalam aspek bina usaha, program telah mencapai hasil optimal dengan terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengelola hasil program, serta kelompok pengelola yang aktif memasarkan hasil produk secara langsung dan memanfaatkan media sosial untuk promosi. Pada indikator pengembangan sarana dan prasarana telah menunjukkan kemajuan yang optimal. Sarana dan prasarana utama yang telah disediakan meliputi kandang yang cukup baik, tempat pengelolaan, sumur bor, dan tenaga kerja yang kompeten. Selain itu, fasilitas

pendukung seperti sekretariat program yang luas, dengan kamar, kamar mandi, teras, penerangan, dan infrastruktur pendukung seperti jalan akses juga telah tersedia.

Sementara dalam aspek bina lingkungan, pemerintah, kelompok pengelola, dan masyarakat telah menunjukkan komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan, dan Secara keseluruhan.

Bina kelembagaan pada program ini telah optimal dalam aspek komponen orang dan komponen kepentingan. Namun masih belum optimal dalam aspek komponen aturan karena belum adanya peraturan desa yang spesifik dalam program pengaturan ini, serta dalam komponen struktur organisasi karena adanya perbedaan pendapat dan ketidakjelasan terkait struktur organisasi kelompok pengelola, khususnya untuk pengelolaan peternakan kambing etawa.

Adapun ke tiga indikator yang belum optimal dan menjadi penghambat dalam keberlangsungan program Pemberdayaan Masyarakat melalui Ketahanan Pangan di Desa Janggala yaitu :

1. Belum terealisasinya pelatihan rutin yang telah rencanakan dalam upaya pengembangan kapasitas individu pada dimensi bina manusia . Hal ini mengakibatkan pengetahuan dan keterampilan terkait pengelolaan belum optimal.
2. Belum adanya peraturan desa yang spesifik untuk mengatur pelaksanaan program tersebut. Akibatnya, terdapat batasan hukum yang dapat menimbulkan penghalang dan menghalangi program mencapai tujuan yang diharapkan.

3. Adanya permasalahan dalam komponen struktur pada bina kelembagaan yaitu struktur organisasi kelompok pengelola program. Terdapat perbedaan pendapat dan ketidakjelasan terkait peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam struktur organisasi tersebut, khususnya dalam pengelolaan peternakan kambing etawa. Kondisi ini dapat menyebabkan terhambatnya koordinasi dan sinergi antar anggota kelompok pengelola, sehingga berdampak pada efektivitas pelaksanaan program.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan mengenai pemberdayaan Masyarakat melalui program ketahanan pangan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dari itu penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

### **5.2.1 Saran Teoritis**

1. Melakukan penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya pengembangan kapasitas individu dalam program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan.
2. Mengkaji lebih mendalam mengenai pentingnya regulasi atau peraturan desa yang spesifik dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat, serta dampaknya terhadap keberhasilan program.
3. Melakukan studi lebih lanjut mengenai model struktur organisasi yang efektif untuk program pemberdayaan masyarakat, serta cara mengelola perbedaan pendapat dan ketidakjelasan peran antar anggota kelompok pengelola.

### 5.2.1 Saran Praktis

1. Pada Bina Manusia pemerintah Desa Janggala harus segera merealisasikan pelatihan rutin yang telah di rencanakan dengan menyusun jadwal pelatihan rutin jangka panjang, pendek, dan menengah serta mengalokasikan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mengoptimalkan pengembangan kapasitas individu dalam program pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi kebutuhan pelatihan, menyusun jadwal pelatihan yang realistis, mengalokasikan anggaran yang memadai, menjalin kemitraan dengan lembaga pelatihan, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pelatihan.
2. Pada Bina Usaha perlu adanya pengoptimalan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengelola dan memasarkan hasil produk program, serta memanfaatkan media sosial dan strategi pemasaran yang efektif untuk memperluas jangkauan pemasaran. Pengelola BUMDes dapat memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan pemasaran.. Pemasaran produk BUMDes menjadi sangat penting, terutama dalam era digital saat ini, di mana berbagai model pemasaran dapat dilakukan, termasuk pemasaran berbasis digital atau internet
3. Pada Bina Lingkungan pemerintah harus memastikan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan dalam jangka panjang, penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. mempertahankan dan bahkan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program-program serupa di masa depan. Ini dapat dilakukan dengan terus

mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan memberikan pelatihan serta dukungan yang diperlukan. Ini akan membantu mengidentifikasi tantangan dan peluang baru, serta memungkinkan penyesuaian dan perbaikan program sesuai dengan kebutuhan.

4. Pada Bina Kelembagaan Pemerintah desa perlu menyusun peraturan desa (Perdes) yang mengatur secara khusus tentang program Pemberdayaan Masyarakat melalui Ketahanan Pangan di Desa Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis. Peraturan desa (perdes) ini nantinya memberikan landasan hukum yang jelas dan mengikat untuk pelaksanaan program, sehingga dapat meminimalkan batasan hukum. Pemerintah Desa Janggala juga perlu melakukan evaluasi dan perbaikan struktur organisasi kelompok pengelola agar lebih jelas dan efektif. Memperbaiki Struktur Organisasi Kelompok Pengelola bisa dilakukan dengan mengadakan rapat atau musyawarah dengan melibatkan seluruh anggota kelompok pengelola untuk berdiskusi dan menyepakati struktur organisasi yang jelas kemudian menetapkan tugas, tanggung jawab, dan mengizinkan masing-masing pihak dalam struktur organisasi secara rinci sampai dengan membentuk tim khusus untuk mengelola peternakan kambing etawa dengan struktur yang jelas dan pembagian tugas yang terkoordinasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Ardikanto, T. K. (2017). Pengembangan Kapasitas Individu dan Lembaga. Bandung: Alfabeta
- Edi Suharto (2014). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat. Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial.
- Bahri, ES (2019). Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan . Penerbitan FAM.
- Maryani, D., & Nainggolan, RRE (2019). *Pemberdayaan masyarakat* .
- Nasdian, F. T. (2014). Pengembangan Masyarakat. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Patilayi dkk 2022. Pemberdayaan Masyarakat
- Sugiyono (2022) Metode Penelitian Kualitatif
- Totok Mardikanto, Poerwoko Soebianto (2015) Pemberdayaan Masyarakat dalam perspektif kebijakan publik

### Undang-Undang

- Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi (Kemendes PDTT) yang menerbitkan Pemendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang terhadap terlaksananya tujuan pembangunan nasional berkelanjutan
- Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

### Jurnal

- Adrian, BAPAK (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Kampung Belajar Tanoker di Ledokombo, Kabupaten Jember* (Disertasi Doktor, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Ardiansyah, BK, & Ma'rifah, A. (2020). Pemberdayaan peternak sapi perah Di Desa galengdowo kecamatan wonosalam oleh dinas peternakan kabupaten jombang. J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) , 103-125.

- Anita, D. (2020). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pembangunan Pedesaan. *Jurnal Ilmi*
- Bili, SR, & Ra'is, DU (2019). Dampak dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)* , 6 (3).
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135-
- Hafni, R., RS, P. H., & Nanda, E. D. (2021). PkM Mendigitalisasi Desa Menuju Capaian SDGs. *Abdi Sabha (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(3), 109-114.
- Hermawan, E., Pebriyani, D., Julianty, D. N., Safitri, F., & Laksono, G. T. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tirtawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 191-198.
- Habib, MAF (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. *Ar Rehla: Jurnal Pariwisata Islami, Makanan Halal, Traveling Islami, dan Ekonomi Kreatif* , 1 (2), 82-110.
- Margayaningsih, DI (2018). Peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan syarakat di desa. *Publikasi* , 11 (1), 72-88.
- Nugraha, ND (2004). Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* , 1 (3), 1-10.
- Nurman, A. (2015). Strategi pembangunan desa. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 3(1), 1-8
- Permata, F. S., & Sirat, M. M. P. (2024). Transfer teknologi kolam ikan bioflok melalui pendekatan tripartit: akademisi, praktisi budidaya ikan dan kelompok masyarakat. *Jurnal Pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Lampung*, 3(1), 40-49
- Pramani, Y. (2019). Refleksi konseptual atas media baru, generasi muda dan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal ekonomi, sosial & humaniora* , 1 (01), 50-59.
- Ravik Karsidi, "Pemberdayaan Masyarakat untuk Usaha Kecil dan Mikro", *Jurnal Penyuluhan*, Vol.3 No.2 (Surakarta Jawa Tengah: 2007).hlm. 137-138
- Rosmedi, & Riza, M. (2019). Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 3(2), 1-13
- Saepudin, E. (2022). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 11(3), 227-23

Saputra, D. H., Masdani, M., Asdin, A., & Triaji, B. (2024). Kegiatan Mendorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat Produktif Melalui Bisnis Ramah Lingkungan Bersama Fina Foundation. *Madaniya*, 5(2), 466-472.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran 1. Surat Keputusan Bimbingan Skripsi



## UNIVERSITAS GALUH

### FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Administrasi Publik (S1) Terakreditasi  
Ilmu Pemerintahan (S1) Terakreditasi

Kampus : Jalan R.E. Martadinata No. 150 Tlp./Fax. (0265) 776790 Ciamis 46274

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS GALUH**

Nomor : 0752/35/SK/AK/D/XII/2023


**TENTANG**  
**PENGUKUHAN MAHASISWA PESERTA BIMBINGAN SKRIPSI**  
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GALUH**  
**TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GALUH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan Program Pendidikan S-1 bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, diharuskan melakukan penulisan dan penyusunan Skripsi;
  - b. bahwa untuk membantu dalam menyelesaikan proses penulisan dan penyusunan Skripsi dibutuhkan dosen pembimbing;
  - c. bahwa sebagai tindak lanjut a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Rektor Universitas Galuh Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Akademik Universitas Galuh Tahun 2022;
  5. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Galuh.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- Kesatu** : **Nama** : SYARA AGITA  
**NIM** : 3506200044  
Sebagai Peserta Bimbingan Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Tahun Akademik 2023/2024, dengan judul Skripsi : **"Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ketahanan Pangan di Desa Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis"**.
- Kedua** : Mahasiswa tersebut pada butir kesatu di atas, dalam melakukan penyusunan Skripsi dibimbing oleh :  
1. Regi Refian Garis, S.IP., M.Si., sebagai pembimbing I  
2. Asep Nurdin Rosihan Anwar, S.IP., M.Si., sebagai pembimbing II
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis  
S. Pada tanggal : 28 Desember 2023  
Dekan,  
  
**H. Cecep Cahya Supena, S.H., M.H., M.Si.**  
NIDN. 6024117001

## Lampiran II. Surat Izin Penelitian



**UNIVERSITAS GALUH**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Program Studi : Administrasi Publik (S1) Terakreditasi  
 Ilmu Pemerintahan (S1) Terakreditasi

Kampus : Jalan R.E. Martadinata No. 150 Telp./Fak. (0285) 778780 Ciamis 48274

Nomor : 0074/15/SP/AK/DI/II/2024 Ciamis, 1 Februari 2024  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada  
 Yth. Kepala Desa Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis  
 di  
 Tempat

Bersama ini kami hadapkan, mahasiswa berikut ini :

Nama : Syura Agita  
 NIM : 3506200044  
 Tingkat : IV  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan

bermaksud akan mengadakan penelitian di Desa Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis mulai tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan 30 April 2024.

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk memenuhi proses pembuatan Karya Ilmiah (Skripsi), dengan judul :

**"Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ketahanan Pangan di Desa Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis"**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon agar Bapak/Ibu dapat memberikan izin/rekomendasi demi kelancaran kegiatan termaksud.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :


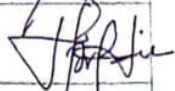
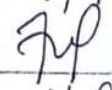
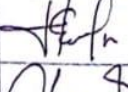
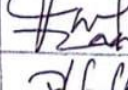
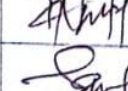
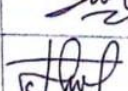
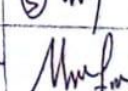
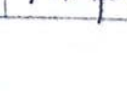
I. Arsip

## Lampiran 3. Berita Acara

## BERITA ACARAA WAWANCARA

Nama Peneliti : Syara Agita  
 NIM : 3506200044  
 Lokus Penelitian : Desa Janggala, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis  
 Judul Penelitian : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ketahanan Pangan di Desa Jangga Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis

## Identitas Informan :

NO	Tanggal Wawancara	Tempat Wawancara	Nama Informan	Jabatan Informan	Tanda Tangan Informan
1.	Jumat 19/04/2024	kantor Desa Janggala	A Fauzi	kepala Desa	
2.	Jumat 19/04/2024	kantor Desa Janggala	Listiana DAI	Kasi Perencanaan	
3.	Jum'at 19/04/2024	"	Usep	Anggota Kelompok	
4.	Senin 22/04/2024	Rumah Informan	Engang H	Kasi Kesetahtraan	
5.	Kamis 25/04/2024	Rumah Peneliti	Abdul Azis	Anggota kelompok	
6.	"	Rumah Peneliti	Yoni	Kadus ke-Tingal	
7.	Sabtu 27/04/2024	Rumah Informan	SAR	ketua kelompok tani	
8.	"	tempat pe ngelolaan.	SOLEH	Masyara kat.	
9.	Senin 29/04/2024	Rumah Informan	Ade Manah	masyarakat	

## Lampiran 4. Pedoman Wawancara

### 1. Bina Manusia

A. Terdapatnya pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan

- 1) Bagaimana upaya bina manusia yang dilakukan oleh pemerintah desa Jangagala
- 2) Hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan Bina Manusia
- 3) Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menangani hambatan yang terjadi pada saat dilakukannya Bina Manusia

B. Terdapatnya Pengembangan kapasitas entitas kelembagaan

- 1) Bagaimana pengembangan kapasitas entitas kelembagaan ?
- 2) Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pengembangan kapasitas entitas kelembagaan?
- 3) Bagaimana upaya yang dilakukan pada saat menangani hambatan yang terjadi ?

C. Terdapatnya pengembangan kapasitas sistem

- 1) Bagaimana pengembangan interaksi antar entitas (organisasi) di dalam dan di luar sistem yang sama ?
- 2) Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pengembangan kapasitas sistem?
- 3) Bagaimana upaya yang dilakukan pada saat menangani hambatan yang terjadi dalam pengembangan kapasitas sistem

### 2. Bina Usaha

A. Terdapatnya pembentukan badan usaha

- 1) Apakah sudah terdapatnya pembentukan badan usaha pada program pemberdayaan ini?
- 2) Hambatan apa saja yang terjadi pada saat pembentukan badan usaha?
- 3) Bagaimana upaya yang di lakukan pada saat menangani pembentukan badan usaha?

B. Terdapatnya pengembangan sarana dan prasarana

- 1) Bagaimana kondisi sarana dan prasarana dalam fasilitas ternak kambing etawa?
- 2) Hambatan apa saja yang terjadi pada saat pengembangan sarana dan prasarana?
- 3) Bagaimana upaya yang dilakukan pada saat menangani hambatan dalam pengembangan sarana dan prasarana?

C. Terdapatnya pengelolaan sumberdaya manusia dan pengembangan karir

- 1) Bagaimana pengelolaan sumberdaya manusia dan pengembangan karir pengelola ternak kambing etawa?
- 2) Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pengelolaan sumberdaya manusia dan pengembangan karir pengelola ternak kambing etawa?
- 3) Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan ketika pengelolaan sumberdaya manusia dan pengembangan karir pengelola ternak kambing etawa?

3. Bina Lingkungan

A. Kewajiban dipenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan oprasi yang terkait perlindungan, pelestarian, dan pemulihan (rehabilitasi/reklamasi) sumber daya.

- 1) Bagaimana proses pelaksanaan perlindungan, pelestarian pemulihan sumber daya. Perawatan lingkungan
- 2) Hambatan apa saja yang terjadi pada saat pelaksanaan perlindungan, pelestarian pemulihan sumber daya?

- 3) Upaya apa saja yang dilakukan dalam menangani hambatan dalam pelaksanaan perlindungan, pelestarian pemulihan sumberdaya?
- B. Kewajiban dipenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan oprasi yang terkait perlindungan, pelestarian, dan pemulihan (rehabilitasi/reklamasi) lingkungan.
- 1) Bagaimana proses pelaksanaan perlindungan, pelestarian pemulihan sumber daya.
  - 2) Hambatan apa saja yang terjadi pada saat pelaksanaan perlindungan, pelestarian pemulihan sumber daya?
  - 3) Upaya apa saja yang dilakukan dalam menangani hambatan dalam pelaksanaan perlindungan, pelestarian pemulihan sumberdaya?
4. Bina Kelembagaan
- A. Terdapatnya komponen person
- 1) Apakah orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini dapat di identifikasi dengan jelas?
  - 2) Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pembinaan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini
  - 3) Bagaimana upaya penanganan yang di lakukan dalam menangani hambatan pada saat bina kelembagaan ?
- B. Terdapatnya Komponen kepentingan
- 1) Apakah orang orang yang mengelola pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini mempunyai suatu kepentingan dan tujuan?
  - 2) Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pembinaan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini

- 3) Bagaimana upaya penanganan yang di lakukan dalam menangani hambatan pada saat bina kelembagaan ?
- C. Terdapatnya komponen aturan
- 1) Apakah sudah terdapat komponen aturan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini?
  - 2) Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pembinaan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini
  - 3) Bagaimana upaya penanganan yang di lakukan dalam menangani hambatan pada saat bina kelembagaan ?
- D. Terdapatnya Komponen Struktur
- 1) Bagaimana struktur kelembagaan program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini
  - 2) Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pembinaan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini?
  - 3) Bagaimana upaya penanganan yang di lakukan dalam menangani hambatan



Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan Observasi dan Wawancara

Sumber : Dokumentasi pribadi yang diambil dilapangan



Gambar 1

Wawancara pada tanggal 19 April 2024 bersama Kepala Desa Janggala  
Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis

Sumber : Dokumentasi yang di ambil dilapangan



Gambar 2

Wawancara pada tanggal 19 April 2024 bersama Kasi Perencanaan Desa Janggala  
Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis

Sumber : Dokumentasi pribadi yang diambil dilapangan



Gambar 3

Wawancara pada tanggal 22 April 2024 bersama Kasi Kesejahteraan Desa  
Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis  
Sumber : Dokumentasi pribadi yang diambil dilapangan



Gambar 4 dan 5

Wawancara pada tanggal 25 April 2024 Bersama Anggota Kelompok  
Pengelola program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan  
(bidang peternakan kambing etawa) dan Kepala Dusun Karangtingal Desa  
Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis

Sumber : Dokumentasi pribadi yang diambil dilapangan



Gambar 6  
Wawancara pada tanggal 27 April 2024 bersama ketua kelompok tani sekaligus yang mengelola program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan di Desa Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis (bidang perkebunan buah naga)

Sumber : Dokumentasi pribadi yang diambil dilapangan



Gambar 7

Wawancara pada tanggal 19 April 2024 bersama Anggota Kelompok tani yang mengelola program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan di Desa Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis (bidang perkebunan buah naga)

Sumber : Dokumentasi pribadi yang diambil dilapangan



Gambar 8

Wawancara pada tanggal 27 April 2024 Dengan Masyarakat Desa Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis  
Sumber : Dokumentasi pribadi yang diambil dilapangan



Gambar 9

Wawancara pada tanggal 29 April 2024 Dengan Masyarakat Desa Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis  
Sumber : Dokumentasi pribadi yang diambil dilapangan

## TRANSKIP WAWANCARA

### A. Informan 1

Nama : Ahmad Fauzi Pangestu, S.H.,M.H.  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Jabatan : Kepala Desa Janggala  
 Tanggal pelaksanaan wawancara : Jum'at, 19 April 2024

#### 1. Bina Manusia

A. Terdapatnya pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan ke profesionalan

Bagaimana upaya pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan ke profesionalan yang dilakukan oleh pemerintah desa Janggala?

*“Pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan dilakukan terhadap kelompok pengelola dengan cara mengadakan sosialisasi terhadap program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini.”*

Hambatan apa saja yang terjadi dalam upaya pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan ke profesionalan?

*“Perbedaan tingkat pendidikan dan pemahaman antar individu dalam kelompok pengelola dalam pengembangan kapasitas individu untuk program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan”*

Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menangani hambatan yang terjadi pada saat dilakukannya pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan ke profesionalan?

*“Dilakukannya sosialisasi mengenai tatacara pengelolaan program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini.”*

### B. Terdapatnya Pengembangan kapasitas entitas kelembagaan

Bagaimana pengembangan kapasitas entitas kelembagaan pada program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan di Desa Janggala ?

*“Dengan adanya pelatihan dan pendampingan terhadap kelompok pengelola program perdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan baik kelompok pengelola ternak kambing etawa maupun kelompok tani yang mengelola perkebunan buah naga.”*

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pengembangan kapasitas entitas kelembagaan?

*“Belum terlaksananya pelatihan rutin yang telah kami rencanakan.”*

Bagaimana upaya yang dilakukan pada saat menangani hambatan yang terjadi ?

*“Upaya yang dilakukan yaitu dengan selalu berkoordinasi dengan kelompok yang mengelola langsung dilapangan.”\*

### C. Terdapatnya pengembangan kapasitas sistem

Bagaimana pengembangan interaksi anatar entitas (organisasi) di dalam dan di luar sistem yang sama ?

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pengembangan kapasitas sistem?

Bagaimana upaya yang di lakukan pada saat menangani hambatan yang terjadi dalam pengembangan kapasitas sistem

## 2. Bina Usaha

### A. Terdapatnya pembentukan badan usaha

Apakah sudah terdapatnya pembentukan badan usaha pada program pemberdayaan ini?

*“tidak ada badan usaha yang secara spesipikasi untuk penjualan hasil dari program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan jadi hasil dari program itu di satukan di Badan Usaha Milik Desa*

*(BUMDES) yang memang sudah ada sebelum adanya program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini”*

Hambatan apa saja yang terjadi pada saat pembentukan badan usaha?

*“Tidak ada hambatan karena hasil program ini juga sama merupakan pendapatan asli desa jadi di gabung dengan Bumdes.”*

Bagaimana upaya yang di lakukan pada saat menangani pembentukan badan usaha?

*“memberikan dana anggaran untuk sarana dan prasarana.”*

**B. Terdapatnya pengembangan sarana dan prasarana**

Bagaimana kondisi sarana dan prasarana dalam fasilitas ternak kambing etawa?

*“sarana dan prasarana baik karena pemerintah memberikan dana anggaran untuk sarana dan prasarana”*

Hambatan apa saja yang terjadi pada saat pengembangan sarana dan prasarana?

*“Tidak ada hambatan dalam pengembangan sarana dan prasarana karena semua bisa dikatakan baik dari segi kandang,sekre maupun fasilitas lainnya.”*

Bagaimana upaya yang dilakukan pada saat menangani hambatan dalam pengembangan sarana dan prasarana?

**3. Bina Lingkungan**

**A. Kewajiban dipenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan oprasi yang terkait perlindungan, pelestarian, dan pemulihan (rehabilitasi/reklamasi) sumber daya alam dan lingkungan**

Bagaimana proses pelaksanaan perlindungan, pelestarian pemulihan sumber daya, dan Perawatan lingkungan di sekitar tempat program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan ?

*“pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bina lingkungan ini yaitu dengan memberikan edukasi kepada kelompok pengelola dan masyarakat terkait dengan bina lingkungan yang baik guna terciptanya*

*kesadaran sehingga masyarakat dapat berpartisipasi khususnya dalam pelestarian lingkungan atau sama-sama menjaga kelestarian.”*

Hambatan apa saja yang terjadi pada saat pelaksanaan perlindungan, pelestarian pemulihan sumber daya?

*“Tidak ada hambatan karena baik kelompok pengelola program, pemerinthah desa dan masyarakat turut berpartisipasi khususnya dalam pelestarian lingkungan atau sama-sama menjaga kelestarian lingkungan sekitar”*

#### **4. Bina Kelembagaan**

##### **A. Terdapatnya komponen person**

Apakah orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini dapat diidentifikasi dengan jelas?

*“Ya karena sebelumnya menyeleksi orang-orang yang akan mengelola langsung program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan dan tentunya orang yang tergabung dalam kelompok ini sudah berpengalaman sebelumnya khususnya dalam pemeliharaan kambing”*

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pembinaan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini?

*“Tidak ada hambatan karena kelompok yang mengelola sudah terbiasa dalam mengelola peternakan dan juga perkebunan.”*

##### **B. Terdapatnya Komponen kepentingan**

Apakah orang-orang yang mengelola pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini mempunyai suatu kepentingan dan tujuan?

*“komponen kepentingan pada program pemberdayaan Masyarakat melalui ketahanan pangan ini yaitu salah satunya pengembangan kelembagaan yang mana Kelompok pengelola kambing etawa dibina agar menjadi organisasi yang sehat, transparan, dan akuntabel”*

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pembinaan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini?



“Tidak ada hambatan karena kelompok yang mengelola sudah terbiasa dalam mengelola peternakan dan juga perkebunan.”

#### C. Terdapatnya komponen aturan

Apakah sudah terdapat komponen aturan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini?

*“sebenarnya program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan ini merupakan program pemerintah pusat yang harus mau tidak mau dan wajib di laksanakan oleh pemerintah desa tanpa melihat latar belakang desa tersebut siap atau tidak, karena itu merupakan bagian dari Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Perpres ini mengatur tentang penggunaan 20% Dana Desa untuk program ketahanan pangan dan hewani. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan konsumsi pangan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan bagi masyarakat desa.”*

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat memenuhi komponen aturan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini?

Belum terdapatnya peraturan desa mengenai program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan ini

Bagaimana upaya penanganan yang di lakukan dalam menangani hambatan pada saat bina kelembagaan ?

*“Belum ada upaya yang dilakukan selain dari rencana dibuatkannya perdes nanti”*

#### D. Terdapatnya Komponen Struktur

Bagaimana struktur kelembagaan program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini?

*“untuk struktur organisasi kelompok pengelola program pemberdayaan Masyarakat melalui ketahanan pangan ini tidak ada karena program ini langsung di kelola oleh desa, terkait dengan adanya pengelola itu kami*

*sebut dengan kelompok pengelola yang terdiri dari 3 orang jadi tidak adanya struktur organisasi.”*

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pembinaan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini?

*“Tidak ada hambatan yang signifikan karena struktur kepengurusan masih oleh pemerintah desa janggala sendiri”*

## B. Informan 2

Nama : Listiana Damaya Nursoviani S.Pd.  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Jabatan : Kasi Perencanaan Desa Janggala  
 Tanggal pelaksanaan wawancara : Jum'at 19 April 2024

### 1. Bina Manusia

A. Terdapatnya pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan

Bagaimana upaya pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan yang dilakukan oleh pemerintah desa Janggala?

*“Pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan yaitu dengan di buatnya rencana pelatihan jangka pendek, menengah, panjang.”*

Hambatan apa saja yang terjadi dalam upaya pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan?

*“Tidak ada karena sudah adanya pelatihan yang dilakukan, dan juga terdapatnya rencana pelatihan jangka panjang, menengah dan pendek.”*

B. Terdapatnya Pengembangan kapasitas entitas kelembagaan

Bagaimana pengembangan kapasitas entitas kelembagaan pada program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan di Desa Janggala ?

*“dibuatnya strategi pengembangan kapasitas entitas kelembagaan jangka panjang yang terintegrasi dengan program-program lain di desa.”*

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pengembangan kapasitas entitas kelembagaan?

*“Alhamdulillah tidak ada hambatan yang signifikan”*

C. Terdapatnya pengembangan kapasitas sistem

Bagaimana pengembangan kapasitas sistem pada program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan?

*“ sudah terdapatnya upaya pengembangan kapasitas sistem pada program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan ini yaitu dengan dilakukannya pelatihan dan edukasi bagi kelompok pengelola program untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bidang peternakan, pertanian, dan pengelolaan program”*

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pengembangan kapasitas sistem?

*“Sejauh ini tidak ada hambatan yang signifikan”*

**2. Bina Usaha**

A. Terdapatnya pembentukan badan usaha

Apakah sudah terdapatnya pembentukan badan usaha pada program pemberdayaan ini?

*“Untuk pembentukan badan usaha sebelumnya akan di buat badan usaha yang secara khusus untuk memasarkan hasil dari program ini namun dilihat dari keefektifan nya lebih baik di satukan karena hasil dari program ini juga merupakan salah satu pendapatan asli desa.”*

Hambatan apa saja yang terjadi pada saat pembentukan badan usaha?

*“Tidak ada hambatan karena hasil program ini juga sama merupakan pendapatan asli desa jadi di gabung dengan Bumdes.”*

B. Terdapatnya pengembangan sarana dan prasarana

Bagaimana kondisi sarana dan prasarana dalam fasilitas ternak kambing etawa?

*“memfasilitasi kandang yang cukup baik dan ada juga tempat bagi kelompok pengelola”*

Hambatan apa saja yang terjadi pada saat pengembangan sarana dan prasarana?

*“Tidak ada hambatan yang signifikan”*

### **3. Bina Lingkungan**

**A.** Kewajiban dipenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan oprasi yang terkait perlindungan, pelestarian, dan pemulihan (rehabilitasi/reklamasi) sumber daya alam dan lingkungan

Bagaimana proses pelaksanaan perlindungan, pelestarian pemulihan sumber daya. Perawatan lingkungan

*“Dalam rangka pelaksanaan program bina lingkungan, kelompok pengelola biasanya menjalin kerja sama dengan masyarakat untuk memelihara kelestarian lingkungan di sekitar lokasi program pemberdayaan dan di sepanjang jalan.”*

Hambatan apa saja yang terjadi pada saat pelaksanaan perlindungan, pelestarian pemulihan sumber daya?

*“Tidak adanya hambatan dalam bina lingkungan”*

Upaya apa saja yang dilakukan dalam menangani hambatan dalam pelaksanaan perlindungan, pelestarian pemulihan sumberdaya?

### **4. Bina Kelembagaan**

**A.** Terdapatnya komponen person

Apakah orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini dapat diidentifikasi dengan jelas?

*“dikarenakan program ini belum lama berjalan maka kami masih belum membuat regulasi atau aturan sebagai upaya perlindungan terkait dengan program ini, namun kedepannya akan di segerakan terkait aturan ini.”*

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pembinaan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini?

*“Tidak ada hambatan yang signifikan”*

B. Terdapatnya Komponen kepentingan

Apakah orang-orang yang mengelola pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini mempunyai suatu kepentingan dan tujuan?

*“Ya Desa telah memfasilitasi kepentingan program dengan membangun infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan ini seperti, seperti kandang, gudang pakan, dan akses air bersih”*

Apakah hambatan yang terjadi pada saat pembinaan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini

*“Tidak ada hambatan yang signifikan”*

C. Terdapatnya komponen aturan

Apakah sudah terdapat komponen aturan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini?

*“untuk aturan terkait pemberdayaan Masyarakat melalui program ketahanan pangan ini masih merujuk pada peraturan presiden.”*

Apakah hambatan yang terjadi pada saat pembinaan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini

*“belum adanya peraturan desa mengenai program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan”*

D. Terdapatnya Komponen Struktur

Bagaimana struktur kelembagaan program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini?

*“struktur organisasi kepengurusan ini perangkat desa namun untuk pengelolaan di lapangan ada orang-orang yang sudah kami seleksi sebelumnya.”*

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pembinaan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini?

*“Tidak ada hambatan yang signifikan”*

### C. Informan 3

Nama : Enjang Hasan  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Usia :  
 Jabatan : Kasi kesejahteraan Desa Janggala  
 Tanggal pelaksanaan wawancara : Senin 22 April 2024

#### 1. Bina Manusia

A. Terdapatnya pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan ke profesionalan

Bagaimana upaya pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan ke profesionalan yang dilakukan oleh pemerintah desa Janggala?

*“Pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan yaitu dengan melakukan studi banding.”*

Hambatan apa saja yang terjadi dalam upaya pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan ke profesionalan?

*“Belum terealisasinya pelatihan rutin”*

Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menangani hambatan yang terjadi pada saat dilakukannya pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan ke profesionalan?

1. Terdapatnya Pengembangan kapasitas entitas kelembagaan

Bagaimana pengembangan kapasitas entitas kelembagaan pada program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan di Desa Janggala ?

*“memfasilitasi tenaga ahli dalam pelatihan atau penyampaian standar operasional prosedur (SOP) contohnya tenaga ahli kesehatan bidang peternakan.”*

2. Terdapatnya pengembangan kapasitas sistem



Bagaimana pengembangan interaksi anatar entitas (organisasi) di dalam dan di luar sistem yang sama ?

*“pengembangan kapasitas sistem yang sudah di laksanakan yaitu adanya pembekalan mengenai pengelolaan kepada kelompok pengelola proram.”*

## **B. Bina Usaha**

### A. Terdapatnya pembentukan badan usaha

Apakah sudah terdapatnya pembentukan badan usaha pada program pemberdayaan ini?

*“Diupayakan perluasan jaringan dan kerja sama dengan pihak lain, seperti supermarket, toko, untuk memperluas jangkauan pasar hasil dari program pemberdayaan Masyarakat ini.”*

### B. Terdapatnya pengembangan sarana dan prasarana

Bagaimana kondisi sarana dan prasarana dalam fasilitas ternak kambing etawa?

Hambatan apa saja yang terjadi pada saat pengembangan sarana dan prasarana?

Bagaimana upaya yang dilakukan pada saat menangani hambatan dalam pengembangan sarana dan prasarana?

## **C. Bina Lingkungan**

### A. Kewajiban dipenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan oprasi yang terkait perlindungan, pelestarian, dan pemulihan (rehabilitasi/reklamasi) sumber daya alam dan lingkungan

Bagaimana proses pelaksanaan perlindungan, pelestarian pemulihan sumber daya. Perawatan lingkungan

Dalam upaya bina lingkungan ini khususnya dalam pelestarian lingkungan saya selaku kasi kesejahteraan setiap weekend terjun langsung ke lokasi program pemberdayaan masyarakat ini untuk perawatan lingkungan

Hambatan apa saja yang terjadi pada saat pelaksanaan perlindungan, pelestarian pemulihan sumber daya?

Upaya apa saja yang dilakukan dalam menangani hambatan dalam pelaksanaan perlindungan, pelestarian pemulihan sumberdaya?

#### **D. Bina Kelembagaan**

##### **A. Terdapatnya komponen person**

Apakah orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini dapat diidentifikasi dengan jelas?

Desa telah memberikan fasilitas penunjang sebelum ter-laksananya program yaitu dengan adanya pelatihan kepada kelompok pengelola program

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pembinaan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini

Bagaimana upaya penanganan yang di lakukan dalam menangani hambatan pada saat bina kelembagaan ?

##### **B. Terdapatnya Komponen kepentingan**

Bagaimana komponen kepentingan program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini

*“Pemerintah desa telah memberikan fasilitas prezer sebagai kepentingan untuk hasil dari pengelolaan ternak yaitu susu kambing etawa”*

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pembinaan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini

Bagaimana upaya penanganan yang di lakukan dalam menangani hambatan pada saat bina kelembagaan ?

##### **C. Terdapatnya komponen aturan**

Apakah sudah terdapat komponen aturan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini?

*“belum adanya peraturan desa terkait dengan program pemberdayaan Masyarakat melalui ketahanan pangan ini”*

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pembinaan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini

Bagaimana upaya penanganan yang di lakukan dalam menangani hambatan pada saat bina kelembagaan ?

D. Terdapatnya Komponen Struktur

Bagaimana struktur kelembagaan program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini?

*“untuk bidang peternakan tidak ada kalau struktur yang langsung mengelola karena hanya terdiri dari 3 orang, Adapun yang bidang Perkebunan yaitu buah naga yaitu kelompok tani yang mengelolanya, dan ada struktur organisasinya”*

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pembinaan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini?

**D. Informan 4**

Nama : Listiana Damaya Nursoviani S.Pd.  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Usia :  
 Jabatan : Kasi Perencanaan Desa Janggala  
 Tanggal pelaksanaan wawancara :

**1. Bina Manusia**

A. Terdapatnya pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan ke profesionalan

Bagaimana upaya pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan ke profesionalan yang dilakukan oleh pemerintah desa Janggala?

*“dilakukannya pelatihan kepada kami langsung di tempat yang memang sudah menjadi fasilitas untuk mengelola program.”*

Hambatan apa saja yang terjadi dalam upaya pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan ke profesionalan?

Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menangani hambatan yang terjadi pada saat dilakukannya pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan ke profesionalan?

B. Terdapatnya Pengembangan kapasitas entitas kelembagaan

Bagaimana pengembangan kapasitas entitas kelembagaan pada program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan di Desa Janggala ?

*“pernah mengikuti pelatihan dan pengarahan sebagai pembekalan sebelum terlaksananya program.”*

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pengembangan kapasitas entitas kelembagaan?

Bagaimana upaya yang dilakukan pada saat menangani hambatan yang terjadi ?

C. Terdapatnya pengembangan kapasitas sistem

Bagaimana pengembangan interaksi anatar entitas (organisasi) di dalam dan di luar sistem yang sama ?

*“kami sudah menerima pembekalan terkait pengelolaan program”*

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pengembangan kapasitas sistem?

Bagaimana upaya yang di lakukan pada saat menangani hambatan yang terjadi dalam pengembangan kapasitas sistem

**2. Bina Usaha**

A. Terdapatnya pembentukan badan usaha

Apakah sudah terdapatnya pembentukan badan usaha pada program pemberdayaan ini?

*“Pemasaran mengenai produk hasil dari program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini selain di serahkan ke bumdes ada juga yang di pasarkan langsung oleh kelompok pengelola”*

Hambatan apa saja yang terjadi pada saat pembentukan badan usaha?

Bagaimana upaya yang di lakukan pada saat menangani pembentukan badan usaha?

B. Terdapatnya pengembangan sarana dan prasarana

Bagaimana kondisi sarana dan prasarana dalam fasilitas ternak kambing etawa?

*adanya sumur bor dan air yang berkualitas di sekitar tempat program pemberdayaan masyarakat agar memudahkan juga pengelola dalam memberikan minum kepada ternak kambing etawa”*

Hambatan apa saja yang terjadi pada saat pengembangan sarana dan prasarana?

Bagaimana upaya yang dilakukan pada saat menangani hambatan dalam pengembangan sarana dan prasarana?

### 3. Bina Lingkungan

A. Kewajiban dipenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan oprasi yang terkait perlindungan, pelestarian, dan pemulihan (rehabilitasi/reklamasi) sumber daya alam dan lingkungan

Bagaimana proses pelaksanaan perlindungan, pelestarian pemulihan sumber daya. Perawatan lingkungan

*“selaku kelompok yang langsung di lapangan kami selalu memastikan lingkungan ini baik khususnya untuk ternak kambing yaitu dengan salalu memperhatikan lingkungan sekitar kandang agar kebersihannya itu selalu terjaga serta selalu memastikan rumput sekitar agar dapat dijadikan pakan yang berkualitas.”*

Hambatan apa saja yang terjadi pada saat pelaksanaan perlindungan, pelestarian pemulihan sumber daya?

Upaya apa saja yang dilakukan dalam menangani hambatan dalam pelaksanaan perlindungan, pelestarian pemulihan sumberdaya?

### 4. Bina Kelembagaan

A. Terdapatnya komponen person

Apakah orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini dapat diidentifikasi dengan jelas?

*“ya saya berpengalaman terkait pengelolaan ternak karena sebelumnya saya juga mempunyai ternak domba pribadi, namun untuk pengelolaan kambing etawa ini tentunya berbeda maka kami di berikan fasilitas pelatihan pada awal pelaksanaan program”*

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pembinaan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini

Bagaimana upaya penanganan yang di lakukan dalam menangani hambatan pada saat bina kelembagaan ?

B. Terdapatnya Komponen kepentingan

Apakah orang-orang yang mengelola pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini mempunyai suatu kepentingan dan tujuan?

*“ya kami menerima fasilitas penunjang untuk kepentingan pengelolaan program”*

Apakah saja hambatan yang terjadi pada saat pembinaan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini

Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan dalam menangani hambatan pada saat pembinaan kelembagaan ?

C. Terdapatnya komponen aturan

Apakah sudah terdapat komponen aturan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini?

*“untuk aturan saya tidak mengetahuinya karena yang saya simak pada saat pelatihan hanya tata cara terkait pengelolaan”*

Apakah saja hambatan yang terjadi pada saat pembinaan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini

Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan dalam menangani hambatan pada saat pembinaan kelembagaan ?

D. Terdapatnya Komponen Struktur

Bagaimana struktur kelembagaan program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini

*“ya struktur kelompok pengelolanya memang tidak ada karena hanya terdiri dari 3 orang untuk yang mengelola peternakan kambing etawa”*

Apakah saja hambatan yang terjadi pada saat pembinaan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini?

**E. Informan 5**

Nama : Sair Rais  
 Jenis Kelamin : laki-laki  
 Jabatan : Ketua kelompok tani Desa Janggala  
 Tanggal pelaksanaan wawancara : Sabtu 27 April 2024

**1. Bina Manusia**

A. Terdapatnya pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan ke profesionalan

Bagaimana upaya pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan ke profesionalan yang dilakukan oleh pemerintah desa Janggala?

*“terdapatnya pelatihan dan pembekalan dan pernah ada juga pengarahan dari camat kecamatan cidolog terkait dengan pengelolaan program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini”*

Hambatan apa saja yang terjadi dalam upaya pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan ke profesionalan?

*“Tidak ada hambatan yang fatal hanya saja pelatihan yang kurang kepada kami selalku kelompok pengelola”*

Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menangani hambatan yang terjadi pada saat dilakukannya pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan ke profesionalan?

B. Terdapatnya Pengembangan kapasitas entitas kelembagaan

Bagaimana pengembangan kapasitas entitas kelembagaan pada program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan di Desa Janggala ?

*“melakukan kolaborasi dan berbagi pengetahuan maupun pengalaman atau dilakukannya studi banding dengan entitas lain.”*



Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pengembangan kapasitas entitas kelembagaan?

“Tidak ada hambatan”

Bagaimana upaya yang dilakukan pada saat menangani hambatan yang terjadi ?

C. Terdapatnya pengembangan kapasitas sistem

Bagaimana pengembangan interaksi anatar entitas (organisasi) di dalam dan di luar sistem yang sama ?

*“upaya kami dalam mengembangkan kapasitas sistem yaitu dengan memaksimalkan kinerja dalam pengelolaan”*

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pengembangan kapasitas sistem?

Bagaimana upaya yang di lakukan pada saat menangani hambatan yang terjadi dalam pengembangan kapasitas sistem

## 2. Bina Usaha

A. Terdapatnya pembentukan badan usaha

Apakah sudah terdapatnya pembentukan badan usaha pada program pemberdayaan ini?

*“penjualan hasil dari program pernah diikuti sertakan dalam acara bazar seperti yang sudah di laksanakan yaitu pada bazar acara HUT RI yang ke 78”*

Hambatan apa saja yang terjadi pada saat pembentukan badan usaha?

Bagaimana upaya yang di lakukan pada saat menangani pembentukan badan usaha?

B. Terdapatnya pengembangan sarana dan prasarana

Bagaimana kondisi sarana dan prasarana dalam fasilitas ternak kambing etawa?

*“sudah adanya penerangan berupa lampu merkuri di sekretariat pengelolaan program pemberdayaan masyarakat ”*

Hambatan apa saja yang terjadi pada saat pengembangan sarana dan prasarana?

Bagaimana upaya yang dilakukan pada saat menangani hambatan dalam pengembangan sarana dan prasarana?

### 3. Bina Lingkungan

A. Kewajiban dipenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan oprasi yang terkait perlindungan, pelestarian, dan pemulihan (rehabilitasi/reklamasi) sumber daya alam dan lingkungan

Bagaimana proses pelaksanaan perlindungan, pelestarian pemulihan sumber daya. Perawatan lingkungan

*“memastikan masyarakat mengetahui keberadaan program pemberdayaan masyarakat dan tujuannya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Edukasi ini kami lakukan dengan cara **sosialisasi** di berbagai pertemuan yang melibatkan masyarakat untuk menjelaskan program, manfaatnya, dan bagaimana mereka dapat berkontribusi.”*

Hambatan apa saja yang terjadi pada saat pelaksanaan perlindungan, pelestarian pemulihan sumber daya?

Upaya apa saja yang dilakukan dalam menangani hambatan dalam pelaksanaan perlindungan, pelestarian pemulihan sumberdaya?

### 4. Bina Kelembagaan

A. Terdapatnya komponen person

Apakah orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini dapat diidentifikasi dengan jelas?

*“ya, pemerintah desa telah memberikan pelatihan kepada kelompok tani terkait budidaya buah naga”*

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pembinaan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini

Bagaimana upaya penanganan yang di lakukan dalam menangani hambatan pada saat bina kelembagaan ?

B. Terdapatnya Komponen kepentingan

Apakah orang-orang yang mengelola pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini mempunyai suatu kepentingan dan tujuan?

*“pembinaan sebelum pengelolaan perkebunan buah naga merupakan kepentingan yang kita dapatkan karena dengan adanya pembinaan itu kami bisa tau bagaimana pengelolaan yang baik”*

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pembinaan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini

Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan dalam menangani hambatan pada saat pembinaan kelembagaan ?

C. Terdapatnya komponen aturan

Apakah sudah terdapat komponen aturan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini?

*“saya tidak tahu terkait dengan aturan, namun yang saya ketahui program ini sumbernya dari dana desa”*

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pembinaan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini

Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan dalam menangani hambatan pada saat pembinaan kelembagaan ?

D. Terdapatnya Komponen Struktur

Bagaimana struktur kelembagaan program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini

*“untuk struktur organisasi kelompok pengelolaan program pemberdayaan Masyarakat melalui ketahanan pangan ini oleh kelompok tani “*

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pembinaan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini?

**F. Informan 6**

Nama : Usep S.  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Jabatan : Anggota Kelompok Tani Desa Janggala  
 Tanggal pelaksanaan wawancara : Jum'at, 19 April 2024

**1. Bina Manusia**

A. Terdapatnya pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan ke profesionalan

Bagaimana upaya pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan ke profesionalan yang dilakukan oleh pemerintah desa Janggala?

*“sudah adanya pelatihan sebagai upaya bina manusia namun tidak rutin pelatihannya, jadi kami kelompok pengelola selain mengandalkan fasilitas pelatihan juga dengan cara mempelajari melalui media sosial terkait pengelolaan itu”*

Hambatan apa saja yang terjadi dalam upaya pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan ke profesionalan?

Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menangani hambatan yang terjadi pada saat dilakukannya pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan ke profesionalan?

B. Terdapatnya Pengembangan kapasitas entitas kelembagaan

Bagaimana pengembangan kapasitas entitas kelembagaan pada program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan di Desa Janggala ?

*“dengan memanfaatkan penggunaan media sebagai salah satu upaya media pembelajaran dalam pengelolaan program pemberdayaan masyarakat ini”*

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pengembangan kapasitas entitas kelembagaan?

Bagaimana upaya yang dilakukan pada saat menangani hambatan yang terjadi ?

C. Terdapatnya pengembangan kapasitas sistem

Bagaimana pengembangan interaksi anatar entitas (organisasi) di dalam dan di luar sistem yang sama ?

*“ya pemerintah desa telah memberikan pembinaan terkait pengelolaan program”*

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pengembangan kapasitas sistem?

Bagaimana upaya yang di lakukan pada saat menangani hambatan yang terjadi dalam pengembangan kapasitas sistem

## 2. Bina Usaha

A. Terdapatnya pembentukan badan usaha

Apakah sudah terdapatnya pembentukan badan usaha pada program pemberdayaan ini?

*“Dengan memanfaatkan media yang ada seperti WhatsApp, Facebook itu juga membantu untuk memasarkan hasil produk ke masyarakat, dan juga sebagai ajang untuk memberitahu karena tidak semua masyarakat mengetahui mengenai program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini“*

Hambatan apa saja yang terjadi pada saat pembentukan badan usaha?

Bagaimana upaya yang di lakukan pada saat menangani pembentukan badan usaha?

B. Terdapatnya pengembangan sarana dan prasarana

Bagaimana kondisi sarana dan prasarana dalam fasilitas ternak kambing etawa?

*“terdapatnya sekretariat program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan dan tempat itu lumayan luas di dalamnya terdapat kamar, kamar mandi dan juga teras yang biasa dipake ketika adanya perkumpulan”*

Hambatan apa saja yang terjadi pada saat pengembangan sarana dan prasarana?

Bagaimana upaya yang dilakukan pada saat menangani hambatan dalam pengembangan sarana dan prasarana?

### 3. Bina Lingkungan

A. Kewajiban dipenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan oprasi yang terkait perlindungan, pelestarian, dan pemulihan (rehabilitasi/reklamasi) sumber daya alam dan lingkungan

Bagaimana proses pelaksanaan perlindungan, pelestarian pemulihan sumber daya. Perawatan lingkungan

*“Dalam rangka pelaksanaan program bina lingkungan, kelompok pengelola biasanya menjalin kerja sama dengan masyarakat untuk memelihara kelestarian lingkungan di sekitar lokasi program pemberdayaan dan di sepanjang jalan.”*

Hambatan apa saja yang terjadi pada saat pelaksanaan perlindungan, pelestarian pemulihan sumber daya?

Upaya apa saja yang dilakukan dalam menangani hambatan dalam pelaksanaan perlindungan, pelestarian pemulihan sumberdaya?

### 4. Bina Kelembagaan

A. Terdapatnya komponen person

Apakah orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini dapat diidentifikasi dengan jelas?

*“pembinaan yang diterima dari pemerintah yaitu pelatihan terkait budidaya buah naga”*

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pembinaan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini

Bagaimana upaya penanganan yang di lakukan dalam menangani hambatan pada saat bina kelembagaan ?

B. Terdapatnya Komponen kepentingan

Apakah orang-orang yang mengelola pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini mempunyai suatu kepentingan dan tujuan?

*“sesuai yang di arahkan pada saat pelatihan bahwasanya untuk perkebunan buah naga ini penting untuk menggunakan ban bekas dan itu di fasilitasi oleh pemerintah desa”*

Apakah hambatan yang terjadi pada saat pembinaan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini

Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan dalam menangani hambatan pada saat bina kelembagaan ?

C. Terdapatnya komponen aturan

Apakah sudah terdapat komponen aturan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini?

*“terkait aturan pemerintah desa tidak mensosialisasikan karena kami lebih terjun di lapangan pengelolaannya saja jadi pada saat pelatihan itu lebih ke teknik-teknik pengelolaan program”*

Apakah hambatan yang terjadi pada saat pembinaan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini

Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan dalam menangani hambatan pada saat bina kelembagaan ?

D. Terdapatnya Komponen Struktur

Bagaimana struktur kelembagaan program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini

*“ya saya termasuk anggota kelompok tani karena untuk pengelolaan buah naga itu di kelola oleh kelompok tani”*

Apakah hambatan yang terjadi pada saat pembinaan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini?

**G. Informan 7**

Nama : Iyom M  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Usia :  
 Jabatan : kepala Dusun Kr.tingal  
 Tanggal pelaksanaan wawancara : Kamis 25 April 2024

**1. Bina Manusia**

A. Terdapatnya pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan ke profesionalan

Bagaimana upaya pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan ke profesionalan yang dilakukan oleh pemerintah desa Janggala?

*“sudah ada pelatihan kepada kelompok terkait pengelolaan sebelum merealisasikan program”*

Hambatan apa saja yang terjadi dalam upaya pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan ke profesionalan?

Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menangani hambatan yang terjadi pada saat dilakukannya pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan ke profesionalan?

B. Terdapatnya Pengembangan kapasitas entitas kelembagaan

Bagaimana pengembangan kapasitas entitas kelembagaan pada program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan di Desa Janggala ?

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pengembangan kapasitas entitas kelembagaan?

Bagaimana upaya yang dilakukan pada saat menangani hambatan yang terjadi ?



C. Terdapatnya pengembangan kapasitas sistem

Bagaimana pengembangan interaksi antar entitas (organisasi) di dalam dan di luar sistem yang sama ?

*“pembinaan telah di lakukan kepada kelompok oleh pemerintah desa sebelum program berjalan”*

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pengembangan kapasitas sistem?

Bagaimana upaya yang di lakukan pada saat menangani hambatan yang terjadi dalam pengembangan kapasitas sistem

**2. Bina Usaha**

A. Terdapatnya pembentukan badan usaha

Apakah sudah terdapatnya pembentukan badan usaha pada program pemberdayaan ini?

*“Pemasaran mengenai produk hasil dari program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini di serahkan ke bumdes*

Hambatan apa saja yang terjadi pada saat pembentukan badan usaha?

Bagaimana upaya yang di lakukan pada saat menangani pembentukan badan usaha?

B. Terdapatnya pengembangan sarana dan prasarana

Bagaimana kondisi sarana dan prasarana dalam fasilitas ternak kambing etawa?

*“memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana program yang cukup baik”*

Hambatan apa saja yang terjadi pada saat pengembangan sarana dan prasarana?

Bagaimana upaya yang dilakukan pada saat menangani hambatan dalam pengembangan sarana dan prasarana?

**3. Bina Lingkungan**

A. Kewajiban dipenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan oprasi yang terkait perlindungan, pelestarian,

dan pemulihan (rehabilitasi/reklamasi) sumber daya alam dan lingkungan

Bagaimana proses pelaksanaan perlindungan, pelestarian pemulihan sumber daya. Perawatan lingkungan

*“saya membantu dalam penyampaian informasi kepada masyarakat ketika adanya gotong royong dalam pemeliharaan lingkungan pada program pemberdayaan masyarakat”*

Hambatan apa saja yang terjadi pada saat pelaksanaan perlindungan, pelestarian pemulihan sumber daya?

Upaya apa saja yang dilakukan dalam menangani hambatan dalam pelaksanaan perlindungan, pelestarian pemuliharaan sumberdaya?

#### **4. Bina Kelembagaan**

##### **A. Terdapatnya komponen person**

Apakah orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini dapat diidentifikasi dengan jelas?

*“ada pelatihan terkait pengelolaan program”*

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pembinaan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini

Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan dalam menangani hambatan pada saat bina kelembagaan ?

##### **B. Terdapatnya Komponen kepentingan**

Apakah orang-orang yang mengelola pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini mempunyai suatu kepentingan dan tujuan?

*“ya benar adanya terkait adanya fasilitas-fasilitas penting di tempat untuk menunjang pengelolaan program”*

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pembinaan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini

Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan dalam menangani hambatan pada saat bina kelembagaan ?

### C. Terdapatnya komponen aturan

Apakah sudah terdapat komponen aturan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini?

*“saya kurang tahu mengenai aturan terkait program ini”*

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pembinaan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini

Bagaimana upaya penanganan yang di lakukan dalam menangani hambatan pada saat bina kelembagaan ?

### D. Terdapatnya Komponen Struktur

Bagaimana struktur kelembagaan program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini

*“ya saya ikut mengelola program pemberdayaan Masyarakat melalui ketahanan pangan ini karena saya juga termasuk perangkat desa”*

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pembinaan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini?

## H. Informan 8

Nama : Soleh  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Jabatan : Masyarakat Desa Janggala  
 Tanggal pelaksanaan wawancara : Sabtu 27 April 2024

### 1. Bina Manusia

A. Terdapatnya pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan ke profesionalan

Bagaimana upaya pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan ke profesionalan yang dilakukan oleh pemerintah desa Janggala?

*“Pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan ke profesionalan yaitu dengan melakukan pelatihan”*

Hambatan apa saja yang terjadi dalam upaya pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan ke profesionalan?

Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menangani hambatan yang terjadi pada saat dilakukannya pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan ke profesionalan?

B. Terdapatnya Pengembangan kapasitas entitas kelembagaan

Bagaimana pengembangan kapasitas entitas kelembagaan pada program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan di Desa Janggala ?

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pengembangan kapasitas entitas kelembagaan?

Bagaimana upaya yang dilakukan pada saat menangani hambatan yang terjadi ?

C. Terdapatnya pengembangan kapasitas sistem

Bagaimana pengembangan interaksi antar entitas (organisasi) di dalam dan di luar sistem yang sama ?

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pengembangan kapasitas sistem?

Bagaimana upaya yang di lakukan pada saat menangani hambatan yang terjadi dalam pengembangan kapasitas sistem

## **2. Bina Usaha**

### **A. Terdapatnya pembentukan badan usaha**

Apakah sudah terdapatnya pembentukan badan usaha pada program pemberdayaan ini?

*“yang saya ketahui adanya penjualan produk dari hasil program ini di sekretariat pengelolaan program “*

Hambatan apa saja yang terjadi pada saat pembentukan badan usaha?

Bagaimana upaya yang di lakukan pada saat menangani pembentukan badan usaha?

### **B. Terdapatnya pengembangan sarana dan prasarana**

Bagaimana kondisi sarana dan prasarana dalam fasilitas ternak kambing etawa?

Hambatan apa saja yang terjadi pada saat pengembangan sarana dan prasarana?

Bagaimana upaya yang dilakukan pada saat menangani hambatan dalam pengembangan sarana dan prasarana?

## **3. Bina Lingkungan**

### **A. Kewajiban dipenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan oprasi yang terkait perlindungan, pelestarian, dan pemulihan (rehabilitasi/reklamasi) sumber daya alam dan lingkungan**

Bagaimana proses pelaksanaan perlindungan, pelestarian pemulihan sumber daya. Perawatan lingkungan

Hambatan apa saja yang terjadi pada saat pelaksanaan perlindungan, pelestarian pemulihan sumber daya?

Upaya apa saja yang dilakukan dalam menangani hambatan dalam pelaksanaan perlindungan, pelestarian pemulihan sumberdaya?

#### 4. Bina Kelembagaan

##### A. Terdapatnya komponen person

Apakah orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini dapat diidentifikasi dengan jelas?

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pembinaan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini

Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan dalam menangani hambatan pada saat bina kelembagaan ?

##### B. Terdapatnya Komponen kepentingan

Apakah orang-orang yang mengelola pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini mempunyai suatu kepentingan dan tujuan?

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pembinaan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini

Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan dalam menangani hambatan pada saat bina kelembagaan ?

##### C. Terdapatnya komponen aturan

Apakah sudah terdapat komponen aturan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini?

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pembinaan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini

Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan dalam menangani hambatan pada saat bina kelembagaan ?

##### D. Terdapatnya Komponen Struktur

Bagaimana struktur kelembagaan program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pembinaan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini?

**I. Informan 9**

Nama : Ade Mamah  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Usia :  
 Jabatan : Masyarakat Desa Janggala  
 Tanggal pelaksanaan wawancara : 29 April 2024

**1. Bina Manusia**

A. Terdapatnya pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan ke profesionalan

Bagaimana upaya pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan ke profesionalan yang dilakukan oleh pemerintah desa Janggala?

Hambatan apa saja yang terjadi dalam upaya pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan ke profesionalan?

Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menangani hambatan yang terjadi pada saat dilakukannya pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan ke profesionalan?

B. Terdapatnya Pengembangan kapasitas entitas kelembagaan

Bagaimana pengembangan kapasitas entitas kelembagaan pada program pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan pangan di Desa Janggala ?

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pengembangan kapasitas entitas kelembagaan?

Bagaimana upaya yang dilakukan pada saat menangani hambatan yang terjadi ?

C. Terdapatnya pengembangan kapasitas sistem

Bagaimana pengembangan interaksi antar entitas (organisasi) di dalam dan di luar sistem yang sama ?



Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pengembangan kapasitas sistem?

Bagaimana upaya yang dilakukan pada saat menangani hambatan yang terjadi dalam pengembangan kapasitas sistem

## **2. Bina Usaha**

### **A. Terdapatnya pembentukan badan usaha**

Apakah sudah terdapatnya pembentukan badan usaha pada program pemberdayaan ini?

Hambatan apa saja yang terjadi pada saat pembentukan badan usaha?

Bagaimana upaya yang dilakukan pada saat menangani pembentukan badan usaha?

### **B. Terdapatnya pengembangan sarana dan prasarana**

Bagaimana kondisi sarana dan prasarana dalam fasilitas ternak kambing etawa?

Hambatan apa saja yang terjadi pada saat pengembangan sarana dan prasarana?

Bagaimana upaya yang dilakukan pada saat menangani hambatan dalam pengembangan sarana dan prasarana?

## **3. Bina Lingkungan**

### **A. Kewajiban dipenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang terkait perlindungan, pelestarian, dan pemulihan (rehabilitasi/reklamasi) sumber daya alam dan lingkungan**

Bagaimana proses pelaksanaan perlindungan, pelestarian pemulihan sumber daya. Perawatan lingkungan

Hambatan apa saja yang terjadi pada saat pelaksanaan perlindungan, pelestarian pemulihan sumber daya?

Upaya apa saja yang dilakukan dalam menangani hambatan dalam pelaksanaan perlindungan, pelestarian pemulihan sumberdaya?

#### 4. Bina Kelembagaan

##### A. Terdapatnya komponen person

Apakah orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini dapat diidentifikasi dengan jelas?

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pembinaan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini

Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan dalam menangani hambatan pada saat bina kelembagaan ?

##### B. Terdapatnya Komponen kepentingan

Apakah orang-orang yang mengelola pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini mempunyai suatu kepentingan dan tujuan?

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pembinaan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini

Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan dalam menangani hambatan pada saat bina kelembagaan ?

##### C. Terdapatnya komponen aturan

Apakah sudah terdapat komponen aturan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini?

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pembinaan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini

Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan dalam menangani hambatan pada saat bina kelembagaan ?

##### D. Terdapatnya Komponen Struktur

Bagaimana struktur kelembagaan program pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini

Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pembinaan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan ini?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### DATA PRIBADI

---

Nama Lengkap	: Syara Agita
Tempat, Tanggal Lahir	: Ciamis, 12 November 2001
Jenis Kelamin	: Perempuan
NIM	: 3506200044
e-mail	:syaraagita81@gmail.com
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Alamat Lengkap	: Dusun Karangtingal RT 022 RW 011 Desa Janggala Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis
Nomor Kontak	: 087788334039

### RIWAYAT PENDIDIKAN

---

MIS JANGGALA 1	2008-2014
MTs AYSYIFAA CIDOLOG	2014-2017
MAN KOTA BANJAR	2017-2020
UNIVERSITAS GALUH	2020-2024

### PENGALAMAN ORGANISASI

---

Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan	2021-2022
Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP UNIGAL	2022-2023

PAPER NAME

**CHECK BAB 1**

AUTHOR

**Syara Agita**

WORD COUNT

**1292 Words**

CHARACTER COUNT

**8741 Characters**

PAGE COUNT

**6 Pages**

FILE SIZE

**63.8KB**

SUBMISSION DATE

**Jun 21, 2024 10:46 AM GMT+7**

REPORT DATE

**Jun 21, 2024 10:46 AM GMT+7****● 29% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 28% Internet database
- 22% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

**● Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material